

**ANALISIS EFISIENSI TEKNIS TEMPAT PELELANGAN
IKAN DAN TINGKAT KEBERDAYAAN PENGELOLA
TEMPAT PELELANGAN IKAN SERTA STRATEGI
PEMBERDAYAANNYA DI WILAYAH PANTAI UTARA
JAWA TENGAH**

Tesis

**Program Studi
Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan**



Oleh

**TRI WIDAYATI
C 4B006094**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
JULI
2008**

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

**ANALISIS EFISIENSI TEKNIS TEMPAT PELELANGAN IKAN
DAN TINGKAT KEBERDAYAAN PENGELOLA TEMPAT
PELELANGAN IKAN SERTA STRATEGI PEMBERDAYAANNYA
DI WILAYAH PANTAI UTARA JAWA TENGAH**

Disusun Oleh

**Tri Widayati
C 4B006094**

telah dipertahankan didepan Dewan Penguji
pada tanggal 31 Juli 2008
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama

.....
Prof. Drs. Waridin, MS. P hD

Pembimbing Pendamping

.....
Evi Yulia Purwanti, SE, M Si

Anggota Penguji

.....
Dr. Dwisetia Poerwono, MSc

.....
Dr. Syafrudin Budiningharto

.....
Arif Pujiono, SE, MSi

**Telah Disetujui dan dinyatakan lulus
Dari Program Studi MIESP**

Prof Drs Waridin M S P hD

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak ada karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka

Kupersembahkan buat :

Ibuku tercinta, almarhum ayahku,
dan Mirza anakku

ABSTRACT

Fish Landing Auction plays an important role in a fishing port and has to be managed properly in order to get optimal benefit. However, a Fish Landing Auction has sometimes not met necessary requirements, resulting in its efficiency. In general, managing Fish Landing Auctions in Central Java hasn't reached economically good balance of the input and the output. The objectives of the research are analyzing the efficiency rate, analyzing of empowerment of Fish Landing Auction and KUD officials in researched areas and devising strategies in order to empower them all.

The data used in this research are primary and secondary ones. The sampling used is Multistages one – obtained from 90 respondents of Fish Landing Auction and KUD Mina officials. Technical efficiency of TPIs were held at 11 TPIs in northwest coast of Central Java, namely Klidang Lor, TPI Wonokerto, TPI Mojo, TPI PPNP, TPI Ketapang, TPI Tanjungsari, TPI Asemtoyong, TPI Tegalsari, TPI Suradadi, TPI Muararaja, TPI Pelabuhan.

The result of the research shows some inefficient TPIs. Those which score 100% are TPI Mojo, TPI PPNP, TPI Pelabuhan, TPI Ketapang, TPI Tanjungsari, TPI Klidang Lor and TPI Asemtoyong. Those which score 23,34 % is TPI Tegalsari, TPI Muarareja 47,71 %, TPI Suradadi 66,92 % and TPI Wonokerto 74,37 %..

The empowerment of the officials is not optimal when doing tupoxy both economically or not economically, but they are good at lobbying capability. The strategy for Fish Landing Auction empowerment for example is primarily improving the quality of auction to attract fish sellers and agribusiness companies to buy fish at TPIs. Next, obeying coastline planning to minimize ecosystem damage, and last but not least improving their performance in order to support Fishery Development Program.

Keywords: *Efficiency, TPI, Empowerment and Empowerment Strategy.*

ABSTRAKSI

Tempat Pelelangan Ikan memegang peranan penting dalam suatu Pelabuhan Perikanan dan perlu untuk dikelola sebaik-baiknya agar dapat tercapai manfaat yang optimal. Tetapi dalam Tempat Pelelangan Ikan belum tentu memenuhi persyaratan yang ada, sehingga berakibat pada efisiensi Tempat Pelelangan Ikan tersebut. Pada umumnya, dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Jawa Tengah, rasio antara pemakaian input dan output yang dihasilkan adalah belum layak secara ekonomis (Susilowati dkk, 2003). Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis tingkat efisiensi TPI, menganalisis tingkat keberdayaan pengelola Tempat Pelelangan Ikan dan pengurus KUD di daerah penelitian serta menentukan strategi pemberdayaan agar TPI, pengelola TPI dan KUD menjadi berdaya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Multistages Sampling*. Sampel yang digunakan adalah pengelola Tempat Pelelangan Ikan dan Pengurus Koperasi Unit Desa Mina, dengan jumlah responden sebanyak 90 orang. Efisiensi Teknis dari Tempat Pelelangan Ikan dilakukan di 11 TPI di Pantura Barat Jawa Tengah, yaitu TPI Klidang Lor (Kabupaten Batang), TPI Wonokerto (Kabupaten Pekalongan), TPI PPNP Pekalongan, TPI Mojo, TPI Ketapang, TPI Tanjungsari dan TPI Asemdayong (Kabupaten Pemalang), TPI Tegalsari dan TPI Muararaja, TPI Pelabuhan (Kota Tegal) serta TPI Surodadi di Kabupaten Tegal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa TPI yang belum efisien. TPI yang memiliki skor efisiensi 100 % adalah TPI Mojo, TPI PPNP, TPI Pelabuhan, TPI Ketapang, TPI Tanjungsari, TPI Klidang Lor dan TPI Asemdayong. TPI Tegalsari mempunyai skor efisiensi 22,34 %, TPI Muarareja skor efisiensinya 47,71 %, TPI Surodadi 66,92 %, TPI Wonokerto 74,37 %.

Tingkat keberdayaan pengelola dilihat dari aspek ekonomi maupun non ekonomi menunjukkan bahwa keberdayaan dalam melakukan tupoksi masih kurang berdaya, namun untuk kemampuan lobi masuk katagori intens.

Strategi untuk pemberdayaan TPI antara lain, untuk prioritas pertama adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan lelang untuk menarik bakul/juragan dan perusahaan agrobisnis perikanan membeli ikan di TPI. *Kedua*, mematuhi Rencana Tata Ruang Pesisir yang ada untuk meminimalkan kerusakan ekosistem, *ketiga* meningkatkan kinerja organisasi untuk mendukung Program Pembangunan Perikanan.

Kata Kunci : Efisiensi, Tempat Pelelangan Ikan, Keberdayaan dan Strategi Pemberdayaan

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah , Penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, atas segala karunia, rahmat dan hidayah yang senantiasa dilimpahkan. Hanya karena kebesaran dan keagungan Allah semata, apa yang dilakukan oleh hambanya dapat terjadi di muka bumi. Pemilihan judul “Analisis Efisiensi Tempat Pelelangan Ikan dan Tingkat Keberdayaan Pengelola Tempat Pelelangan Ikan dan Strategi Pemberdayaannya di Wilayah Pantura Jawa Tengah” dilakukan karena adanya permasalahan yang berkaitan dengan hal ini.

Beberapa penelitian mengenai efisiensi TPI menunjukkan bahwa beberapa TPI dinyatakan belum efisien secara teknis, dimana penelitian dilakukan pada TPI Kelas 1, 2 dan 3. Tingkat keberdayaan pengelola TPI dan pengurus KUD dan kondisi internal dan eksternal TPI perlu dikaji untuk menentukan strategi pemberdayaannya.

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada

1. Bapak Prof Drs. Waridin,MS,PhD, selaku Ketua Program MIESP Undip, sekaligus Pembimbing Utama, yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu dalam penyelesaian tesis ini
2. Bapak Prof. Dr. Fx Sugiyanto, Bapak Drs. Bagio Mudakir, MP, selaku mantan Pengelola Prodi MIESP UNDIP Semarang
3. Ibu Dra. Evi Yulia Purwanti, M Si selaku pembimbing pendamping yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan bimbingan sehingga tesis ini bisa terselesaikan.

4. Bapak Dr.Dwisetia Poerwono, M Sc, selaku Penguji Tesis yang telah banyak memberikan masukan
5. Bapak Dr Syafrudin Budiningharto, selaku Penguji Tesis yang telah banyak memberikan masukan
6. Bapak Arif Pujiono, SE, MSi selaku Penguji Tesis yang telah banyak memberikan masukan
7. Ibu Prof. Dr.Indah Soesilowati, M Sc, atas masukan dan referensi yang diberikan kepada penulis
8. Bapak Dr Suradi Wijaya Saputra dan Bapak Ir Herry Busono, M Pi, atas pinjaman referensinya
9. Kepala TPI dan pengurus KUD di wilayah penelitian dan Pengurus PUSKUD Mina Baruna Jawa Tengah
10. Bapak Samani, Mbak Anik di Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah
11. Bapak Firmansyah, SE, M Si dan Bapak Syakir K, SE, M Si,Mas Nugroho SBM, Bu Hasta, SE, M Si atas masukannya dan bimbingannya
12. Bagian Admisi MIESP Undip : Mbak Tanti, Mbak Indri, Mbak Ingá dan Mas Muji serta mbak Sekar
13. Mas Himawan, atas pinjaman referensi dan programnya
14. Almarhum ayahku tercinta, semoga Allah memberi tempat yang indah bagimu, karena semangat yang kau tanamkan buatku yang membuatku bisa bertahan, Ibuku, atas doa dan pengorbanan yang diberikan,Anakku, Mirza, atas doa, dan kerelaannya kehilangan waktu bersama ibu,Saudara-saudara,

atas dorongan moril dan material, Nikeisha yang memberikan semangat luar biasa.

15. Teman-temanku Angkatan XII, Ujik, Harno, Ana, Bu Titin, Dumadi, Mbak Sri, Adit, Nata, Chris, Ara, Titis, Bu Wiwik, Haris, Eva- atas bantuan surveinya.

16. Himawan, atas pinjaman software, buku-buku dan masukkannya

17. Bu Emiliana, Bu Ninik, Mbak Eni dan Pak Heru, atas dorongan semangatnya

18. Sahabat-sahabatku : Diah, Parmi, Sumini, yang selalu memperhatikan, mendorong, membantu dan mendoakan, teman-temanku, Dik Ana, Edi Supeno.

19. Teman-teman di Duta Citra, mbak Ida, mbak har, Joko, Hendi, pak Nurhadi, pak Kiran, Pak Sulaini. Juga buat Antok dan Susi.

Teman-temanku dan pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu Akhirnya penulis berharap, semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan khasanah pengetahuan dalam bidang ekonomi

Semarang, Agustus 2008

Tri Widayati

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAKSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR SINGKATAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Efisiensi.....	13
2.2 Fungsi Produksi.....	18
2.2.1.Pengertian.....	18
2.2.2. Hukum Pertambahan Hasil Yang Semakin Ber- Kurang.....	20
2.2.3. Hubungan Fungsi Produksi dengan Efisiensi.....	23
2.3.Pemberdayaan.. ..	24
2.3.1. Prinsip-prinsip Pemberdayaan.....	27
2.3.2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat.....	29
2.3.3. Dimensi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia.....	30
2.3.4. Indikator Keberdayaan.....	31
2.3.4. Tahap-tahap Pemberdayaan.....	32
2.3.5. Strategi dan Klasifikasinya.....	33
2.3.6. Strategi Pemberdayaan.....	34

2.4.	Teori Kinerja.....	36
2.4.1.	Kinerja Karyawan.....	36
2.4.2.	Kinerja Organisasi/ Lembaga.....	37
2.5.	Kelembagaan Sektor Perikanan.....	38
2.6.	Pelabuhan Perikanan.....	40
2.7.	Tempat Pelelangan Ikan.....	42
2.7.1.	Pelaksanaan lelang Ikan di TPI.....	44
2.8.	Implementasi Perda 10 tahun 2003.....	45
2.8.	Penelitian Terdahulu	47
2.9.	Kerangka Pemikiran Teoritis	53
BAB III METODE PENELITIAN		54
3.1.	Populasi dan Sampel.....	54
3.1.1.	Populasi	54
3.1.2.	Sampel	54
3.2.	Jenis dan Metode Pengambilan Data.....	58
3.2.1.	Jenis Data	58
3.2.2.	Metode Pengumpulan Data.....	59
3.3.	Teknik Analisis Data.....	60
3.3.1.	Analisis Efisiensi TPI.....	60
3.3.3.1.	Prosedur Pengukuran Efisiensi dengan DEA.....	65
3.3.2.	Analisis Tingkat Keberdayaan.....	66
3.3.3.	Analisis Strategi Pemberdayaan.....	67
BAB IV GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN.....		78
4.1.	Letak Geografis Kabupaten/ Kota Sampel... ..	78
4.1.1.	Kota Pekalongan.....	78
4.1.2.	Kabupaten Pekalongan.....	78
4.1.3.	Kabupaten Pemasang.....	79
4.1.4.	Kota Tegal.....	79
4.1.5.	Kabupaten Batang.....	79

5.3. Strategi Pemberdayaan.....	118
5.3.1. TPI Klidang Lor.....	119
5.3.1.1. Analisis Faktor Strategi Eksternal (EFE).....	119
5.3.1.2. Analisis Faktor Strategi Internal (IFE).....	120
5.3.1.3. Matriks Analisis SWOT.....	121
5.3.1.4. Matriks Internal- Eksternal.....	124
5.3.2. TPI Tanjungsari.....	127
5.3.2.1. Analisis Faktor Strategi Eksternal (EFE).....	127
5.3.2.2. Analisis Faktor Strategi Internal (IFE).....	128
5.3.2.3. Matriks Analisis SWOT.....	129
5.3.2.4. Matriks Internal- Eksternal.....	131
5.3.3. TPI Wonokerto.....	131
5.3.3.1. Analisis Faktor Strategi Eksternal (EFE).....	133
5.3.3.2. Analisis Faktor Strategi Internal (IFE).....	134
5.3.3.3. Matriks Analisis SWOT.....	134
5.3.3.4. Matriks Internal- Eksternal.....	137
5.3.4. TPI Ketapang.....	138
5.3.4.1. Analisis Faktor Strategi Eksternal (EFE).....	139
5.3.4.2. Analisis Faktor Strategi Internal (IFE).....	140
5.3.4.3. Matriks Analisis SWOT.....	141
5.3.4.4. Matriks Internal- Eksternal.....	143
5.3.5. TPI Mojo.....	144
5.3.5.1. Analisis Faktor Strategi Eksternal (EFE).....	145
5.3.5.2. Analisis Faktor Strategi Internal (IFE).....	145
5.3.5.3. Matriks Analisis SWOT.....	146
5.3.5.4. Matriks Internal- Eksternal.....	149
5.3.6. TPI Asemdayong.....	150
5.3.6.1. Analisis Faktor Strategi Eksternal (EFE).....	150
5.3.6.2. Analisis Faktor Strategi Internal (IFE).....	151
5.3.6.3. Matriks Analisis SWOT.....	153
5.3.6.4. Matriks Internal- Eksternal.....	155

4.1.6. Kabupaten Tegal.....	80
4.2. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kab/Kota Sampel..	80
4.3. Kondisi Perekonomian Kabupaten/Kota Daerah penelitian.....	81
4.4. Gambaran TPI dan KUD Sampel di Kota Pekalongan	82
4.4.1. TPI PPNP.....	82
4.4.2 KUD Makaryo Mino.....	84
4.5. Gambaran TPI dan KUD Sampel di Kab Pekalongan	84
4.5.1. TPI Wonokerto.....	84
4.6. Gambaran TPI Sampel di Kab Pematang	87
4.6.1. TPI Tanjung Sari.....	87
4.6.2. TPI Asem Doyong.....	91
4.6.3. TPI Mojo.....	93
4.6.4. TPI Ketapang.....	94
4.7. Gambaran TPI dan KUD Sampel di Kota Tegal...	95
4.7.1. TPI Tegalsari.....	95
4.7.2. TPI Pelabuhan Kota Tegal.....	97
4.7.3. TPI Muararaja.....	98
4.8. Gambaran Umum TPI Sampel di Kabupaten Batang.....	99
4.8.1 TPI Klidang Lor.....	99
4.9. Gambaran Umum TPI Sampel di Kabupaten Tegal.....	100
4.9.1. TPI Surodadi.....	100
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	102
5.1. Analisis Efisiensi TPI.....	102
5.1.1. TPI Tegalsari.....	105
5.1.2. TPI Wonokerto.....	106
5.1.2. TPI Surodadi.....	107
5.1.2. TPI Muarareja.....	108
5.2. Analisis Tingkat Keberdayaan.....	110
5.2.1. Gambaran Umum Responden.....	110
5.2.2. Tingkat Keberdayaan.....	112

5.3.7. TPI Tegalsari.....	156
5.3.7.1. Analisis Faktor Strategi Eksternal (EFE).....	156
5.3.7.2. Analisis Faktor Strategi Internal (IFE).....	157
5.3.7.3. Matriks Analisis SWOT.....	158
5.3.7.4. Matriks Internal- Eksternal.....	160
5.3.8. TPI Muarareja.....	161
5.3.8.1. Analisis Faktor Strategi Eksternal (EFE).....	161
5.3.8.2. Analisis Faktor Strategi Internal (IFE).....	162
5.3.8.3. Matriks Analisis SWOT.....	163
5.3.8.4. Matriks Internal- Eksternal.....	166
5.3.9. TPI Pelabuhan.....	167
5.3.9.1. Analisis Faktor Strategi Eksternal (EFE).....	167
5.3.9.2. Analisis Faktor Strategi Internal (IFE).....	168
5.3.9.3. Matriks Analisis SWOT.....	169
5.3.9.4. Matriks Internal- Eksternal.....	171
5.3.10. TPI PPNP.....i.....	172
5.3.10.1. Analisis Faktor Strategi Eksternal (EFE).....	172
5.3.10.2. Analisis Faktor Strategi Internal (IFE).....	173
5.3.10.3. Matriks Analisis SWOT.....	174
5.3.10.4. Matriks Internal- Eksternal.....	177
5.3.11. TPI Suradadi.....	178
5.3.11.1. Analisis Faktor Strategi Eksternal (EFE).....	178
5.3.11.2. Analisis Faktor Strategi Internal (IFE).....	179
5.3.11.3. Matriks Analisis SWOT.....	180
5.3.11.4. Matriks Internal- Eksternal.....	183
 BAB VI PENUTUP.....	 184
6.1. Simpulan.....	184
6.1. Saran.....	188
DAFTAR PUSTAKA.....	189
LAMPIRAN.....	194

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Produksi Perikanan Laut yang Dijual di TPI Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2007	5
Tabel 1.2	Tingkat Efisiensi TPI di Pantura	6
Tabel 2.1	Strategi Utama Fred R Davis	33
Tabel 2.2	Hasil Penelitian Yang Pernah Dilakukan	49
Tabel 3.1	TPI Sampel Berdasarkan kelas	55
Tabel 3.2	Distribusi Sampel Pengelola TPI	56
Tabel 3.3	Input-Output Efisiensi TPI	62
Tabel 3.4	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	65
Tabel 3.5	Matriks EFE Tempat Pelelangan Ikan	71
Tabel 3.6	Matriks IFE Tempat Pelelangan Ikan	73
Tabel 3.7	Matriks SWOT	75
Tabel 3.8	Matriks I – E	76
Tabel 4.1	Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kab/Kota Sampel	80
Tabel 4.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota Sampel	81
Tabel 4.3	Produksi dan Raman TPI PPNP	82
Tabel 4.4	Produksi dan Raman TPI Wonokerto	84
Tabel 4.5	Produksi dan Raman TPI Tanjungsari	88
Tabel 4.6	Produksi dan Raman TPI Asemdayong	92
Tabel 4.7	Produksi dan Raman TPI Mojo	93
Tabel 4.8	Produksi dan Raman TPI Ketapang	94
Tabel 4.9	Produksi dan Raman TPI Tegalsari	95
Tabel 4.10	Produksi dan Raman TPI Pelabuhan Tegal	96
Tabel 4.11	Produksi dan Raman TPI Muarareja	97
Tabel 4.12	Produksi dan Raman TPI Klidang Lor	99
Tabel 4.13	Produksi dan Raman TPI Suradadi	100

Tabel 5.1	Skor Efisiensi TPI	102
Tabel 5.2	Peningkatan Efisiensi TPI Tegalsari	104
Tabel 5.3	Peningkatan Efisiensi TPI Wonokerto	105
Tabel 5.4	Peningkatan Efisiensi TPI Suradadi	107
Tabel 5.5	Peningkatan Efisiensi TPI Muarareja	108
Tabel 5.6	Responden Berdasarkan Kelompok Umur	110
Tabel 5.7	Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	110
Tabel 5.8	Kemampuan Pengelola Dalam Menjalankan Fungsi/Peran TPI Mensejahterkan nelayan	111
Tabel 5.9	Kemampuan Pengelola Dalam Menjalankan Fungsi/Peran TPI Menstabilkan Harga	112
Tabel 5.10	Kemampuan Pengelola Dalam Menjalankan Fungsi/Peran TPI Meningkatkan pendapatan Daerah	114
Tabel 5.11	Akses dalam melakukan Kegiatan Sosial	115
Tabel 5.12	Kemampuan Responden Untuk Melakukan Lobi	118
Tabel 5.13	Matriks Faktor Strategi Eksternal TPI Klidang Lor	119
Tabel 5.14	Analisis Faktor Strategi Internal TPI Klidang Lor	120
Tabel 5.15	Matriks Analisis SWOT	121
Tabel 5.16	Rencana Strategi Dalam Analisis SWOT Untuk Penentuan Strategi Pemberdayaan	123
Tabel 5.17	Matriks Faktor Strategi Eksternal TPI Tanjungsari	127
Tabel 5.18	Analisis Faktor Strategi Internal TPI Tanjungsari	128
Tabel 5.19	Rencana Strategi Dalam Analisis SWOT Untuk Penentuan Strategi Pemberdayaan	129
Tabel 5.20	Matriks Faktor Strategi Eksternal TPI Wonokerto	133
Tabel 5.21	Analisis Faktor Strategi Internal TPI Wonokerto	134
Tabel 5.22	Rencana Strategi Dalam Analisis SWOT Untuk Penentuan Strategi Pemberdayaan	135
Tabel 5.23	Matriks Faktor Strategi Eksternal TPI Ketapang	139
Tabel 5.24	Analisis Faktor Strategi Internal TPI Ketapang	140
Tabel 5.25	Rencana Strategi Dalam Analisis SWOT Untuk Penentuan	

	Strategi Pemberdayaan	141
Tabel 5.26	Matriks Faktor Strategi Eksternal TPI Mojo	145
Tabel 5.27	Analisis Faktor Strategi Internal TPI Mojo	146
Tabel 5.28	Rencana Strategi Dalam Analisis SWOT Untuk Penentuan Strategi Pemberdayaan	147
abel 5.29	Matriks Faktor Strategi Eksternal TPI Asemdayong	151
Tabel 5.30	Analisis Faktor Strategi Internal TPI Asemdayong	152
Tabel 5.31	Rencana Strategi Dalam Analisis SWOT Untuk Penentuan Strategi Pemberdayaan	153
Tabel . 5.32	Matriks Faktor Strategi Eksternal TPI Tegalsari	156
Tabel 5.33	Analisis Faktor Strategi Internal TPI Tegalsari	157
Tabel 5.34	Rencana Strategi Dalam Analisis SWOT Untuk Penentuan Strategi Pemberdayaan	158
Tabel 5.35	Matriks Faktor Strategi Eksternal TPI Muarareja	162
Tabel 5.36	Analisis Faktor Strategi Internal TPI Muarareja	163
Tabel 5.37	Rencana Strategi Dalam Analisis SWOT Untuk Penentuan Strategi Pemberdayaan	164
Tabel 5.38	Matriks Faktor Strategi Eksternal TPI Pelabuhan	167
Tabel 5.39	Analisis Faktor Strategi Internal TPI Pelabuhan	168
Tabel 5.40	Rencana Strategi Dalam Analisis SWOT Untuk Penentuan Strategi Pemberdayaan	169
Tabel 5.41	Matriks Faktor Strategi Eksternal TPI PPNP	173
Tabel 5.42	Analisis Faktor Strategi Internal TPI PPNP	174
Tabel 5.43	Rencana Strategi Dalam Analisis SWOT Untuk Penentuan Strategi Pemberdayaan	175
Tabel 5.44	Matriks Faktor Strategi Eksternal TPI Suradadi	179
Tabel 5.45	Analisis Faktor Strategi Internal TPI Suradadi	180
Tabel 5.46	Rencana Strategi Dalam Analisis SWOT Untuk Penentuan Strategi Pemberdayaan	181

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar	2.1 Efisiensi Unit Isokuanasi	15
Gambar	2.2 Pengukuran In Efisiensi Teknik dan Alokatif (Harga)	17
Gambar	2.3 Tahap-tahap Produksi	22
Gambar	2.4 Rincian dan Strategik Fungsional	32
Gambar	2.5 Struktur Lembaga di Perikanan Rakyat	40
Gambar	2.6 Kerangka Pemikiran Teoritis	54
Gambar	4.1 Struktur organisasi TPI Wonokerto	86
Gambar	4.2 Struktur organisasi TPI Tanjungsari	90

DAFTAR LAMPIRAN

			Halaman
Lampiran	1	Kuesioner	194
Lampiran	2	Skor Efisiensi	207
Lampiran	3	Foto Dokumentasi	223
Lampiran	4	Perhitungan Robot dan rating	231
Lampiran	5	Peta Lokasi	232

DAFTAR SINGKATAN

BPPI	: Balai Pelelangan dan Penangkapan Ikan
EFE	: Eksternal Factor Evaluation
IFE	: Internal Factor Evaluation
KPLI	: Kekurangan Pembayaran Lelang Ikan
KUD	: Koperasi Unit Desa
PPNP	: Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan
TPI	: Tempat Pelelangan Ikan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan perikanan dan kelautan baik dalam skala global maupun dalam skala lokal telah mengalami banyak perubahan. Dalam skala global, dua perubahan utama telah terjadi sejak akhir Perang Dunia II. Pertama, perubahan dari pertumbuhan produksi global yang cepat ke pertumbuhan yang stagnan. Kedua, terjadinya ekstensi yuridiksi oleh negara-negara pantai. Selain itu, beberapa perkembangan penting juga telah terjadi seiring dengan kedua perubahan tersebut. Perubahan tersebut selain dipicu oleh faktor biologi, dimana hampir 75% stok sumberdaya global telah mengalami *biological overfishing* (FAO, 2000), juga dipicu oleh perubahan sosio ekonomi-kelembagaan serta politik yang memaksa beberapa negara pantai melakukan *turning the tide* terhadap kebijakan perikanan dan kelautan mereka (Akhmad Fauzi, 2005).

Di Indonesia, pembangunan perikanan dan kelautan seolah menghadapi dilema. Di satu sisi, kita dihadapkan pada sumberdaya perikanan dan kelautan yang kaya dan mampu menghasilkan potensi ekonomi yang tidak sedikit. Tetapi kenyataannya, di sisi lain, potensi tersebut belum juga mampu meningkatkan ekonomi para pelakunya secara signifikan (Akhmad Fauzi, 2005).

Data selama ini menunjukkan bahwa pembangunan perikanan telah mampu meningkatkan produksi, devisa dan tingkat konsumsi ikan masyarakat Indonesia. Akan tetapi pembangunan perikanan nasional masih belum berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan, terutama nelayan tradisional dan

buruh nelayan. Selain itu, sektor perikanan memiliki beberapa karakteristik, yaitu : (Akhmad Fauzi, 2005).

1. Kondisi kepemilikan yang bersifat *common property* dibarengi dengan rezim akses terbuka dan eksploitasinya, menimbulkan masalah eksternalitas. Eksternalitas di bidang perikanan, dapat terjadi dalam bentuk eksternalitas perebutan daerah tangkap. Selain itu eksternalitas dapat terjadi karena penggunaan alat tangkap dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan pada alat lain.
2. Masyarakat nelayan, terutama nelayan marjinal menghadapi apa yang disebut dengan *highliner illusion* (ilusi untuk menjadi nelayan sukses)
3. Usaha perikanan mengalami apa yang disebut dengan *cycle asymetri* (siklus nonsimetris). Copes (1986) seorang perintis teori ekonomi perikanan mengemukakan karakteristik itu dari sifat kapital perikanan yang sulit untuk ditarik kembali. Usaha perikanan mengalami fluktuasi karena faktor alam.
4. Kemiskinan yang persisten disebabkan karena sulitnya penyesuaian terhadap produktivitas dimana pergerakan surplus tenaga kerja disektor perikanan sangat bersifat dapat balik (*reversible*). Nelayan dengan sifat rezim akses terbuka, dapat kembali ke dalam komunitasnya dimana ia memperoleh *free access* atas sumberdaya perikanan.
5. Sektor perikanan, seperti halnya sektor primer lainnya, sering mengalami masalah finansial, misalnya kurang modal serta sulitnya akses untuk masuk ke lembaga keuangan

Nelayan merupakan kelompok sosial yang selama ini terpinggirkan, baik secara sosial, ekonomi maupun politik. Nelayan di Indonesia masih belum berdaya secara ekonomi dan politik. Organisasi ekonomi nelayan belum solid, nelayan masih terikat pada ikatan tradisional dengan para tengkulak, dan belum ada institusi yang bisa menjamin kehidupan nelayan selain insitusi patron klien tersebut. Secara politikpun, masyarakat nelayan masih dijadikan obyek mobilisasi politik maupun pemerintah, sehingga ketika nelayan menjadi korban pembangunanpun mereka tidak dapat berbuat apa-apa (Mulyadi, 2005)

Terobosan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberdayakan nelayan kecil dan pembudidayaan ikan, serta pengembangan SDM dan kelompok nelayan dapat dilihat dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Berdasarkan Undang-undang ini, disebutkan pula bahwa Pemerintah berkewajiban untuk membangun dan membina prasarana perikanan (pelabuhan perikanan dan saluran irigasi tambak). Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan salah satu fungsi utama dalam kegiatan perikanan dan juga merupakan salah satu faktor yang menggerakkan dan meningkatkan usaha dan kesejahteraan nelayan.

Ditjen Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan RI telah melaksanakan Proyek *CO-Fish* (*Coastal Community Development and Fisheries Resources Management*) di lima lokasi di seluruh Indonesia, yaitu kabupaten Bengkalis Propinsi Riau, Kota Tegal Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Trenggalek dan Banyuwangi Propinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat. Pada masing-masing lokasi pengelolaan proyek dilaksanakan oleh *Project Implementation Unit* (PIU). Proyek *Co-Fish* Jawa

Tengah berkedudukan di Kota Tegal (Sulaksono, 2004). Pembangunan fasilitas perikanan ini diharapkan akan dapat meningkatkan nelayan dalam melaksanakan aktivitas produktifnya, baik dalam hal pendaratan ikan, pelelangan, pengolahan, maupun proses pemasarannya, serta diharapkan mengurangi kebocoran hasil tangkapan.

Banyak kajian telah membuktikan bahwa tekanan kemiskinan struktural yang melanda kehidupan nelayan tradisional sesungguhnya disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks (Suyanto dalam Suhartini, 2005). Faktor-faktor itu tidak saja hanya berkaitan dengan fluktuasi musim-musim ikan, keterbatasan sumberdaya manusia, modal, akses dan jaringan perdagangan ikan yang eksploitatif terhadap nelayan sebagai produsen, tetapi juga disebabkan oleh dampak negatif modernisasi perikanan atau Revolusi Biru yang mendorong terjadinya pengurasan sumberdaya laut secara berlebihan.

Untuk mengakomodir usaha penangkapan ikan di laut, maka di Jawa Tengah terdapat 77 buah TPI (Tempat Pelelangan Ikan), dimana 67 buah diantaranya terdapat di Pantai Utara dan 8 buah TPI berada di pantai Selatan. Dari 77 buah TPI yang ada, tiga buah TPI termasuk dalam Unit Pelaksana Teknis Pusat, yaitu PPNP (Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan), PPSC (Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap), dan Pelabuhan Basis Perikanan Karimunjawa. (Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah 2004-2008)

Jumlah TPI di Kabupaten/ Kota di Wilayah Pantura Jawa Tengah, dapat dilihat dalam Tabel 1.1. berikut :

Tabel 1.1.
 Produksi Perikanan Laut yang Dijual di TPI
 Menurut Kabupaten/Kota Tahun di Jawa Tengah 2007

No	Kabupaten/ Kota	Banyaknya TPI	Produksi (Kg)
	BPPI Wilayah Pati		
1	Kabupaten Rembang	13	26.995.157
2	Kabupaten Pati	7	31.332.455
3	Kabupaten Jepara	12	838.505
4	Kabupaten Demak	3	892.563
6	Kota Semarang	3	110.824.100
	BPPI Wilayah Pekalongan		
1	Kabupaten Kendal	4	1.132.413
6	Kabupaten Batang	4	16.772.677
7	Kabupaten Pekalongan	2	5.272.782
8	Kabupaten Pemalang	6	9.315.442
9	Kabupaten Tegal	3	329.749
10	Kabupaten Brebes	8	1.148.504
12	Kota Tegal	3	20.591.607
13	Kota Pekalongan	1	58.891.159
	BPPI Wilayah Cilacap		
14	Kabupaten Cilacap	7	3.652.771,05
15	Kabupaten Kebumen	3	1.851.667,85

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah, 2007

Beberapa TPI di Jawa Tengah yang menunjukkan kondisi inefisiensi, dapat dilihat dalam Tabel 1.2 :

Tabel 1.2
Tingkat Efisiensi TPI di Pantura

No	Tempat Pelelangan Ikan	Skor Efisiensi	TPI Referensi	Peneliti dan tahun penelitian
1	PPNP	100 %		Sulistiyani Dyah P (2005)
2	Pelabuhan Tegal	100 %		Sulistiyani Dyah P (2005)
3	Klidang Lor	100 %		Sulistiyani Dyah P (2005)
4	Tanjungsari	100 %		Sulistiyani Dyah P (2005)
5	Suradadi	38,65 %	Pangaradan, Tanjungsari, Asem Doyong	A Budy Risharyanto (2006)
6	Pelabuhan	100 %		A Budy Risharyanto (2006)
7	Tegalsari	39,7 %	Pelabuhan, Asem Doyong	A Budy Risharyanto (2006)
8	Tanjungsari	100 %		A Budy Risharyanto (2006)
9	Asem Doyong	100 %		A Budy Risharyanto (2006)
6	Klidang Lor	100 %		DRD dan Puskud Mina BarunaJawa Tengah (2007)
7	Tegalsari	86,18 %		DRD dan Puskud Mina BarunaJawa Tengah (2007)
8	Ketapang	64,09 %		DRD dan Puskud Mina BarunaJawa Tengah (2007)
9	Surodadi	40,20 %		DRD dan Puskud Mina BarunaJawa Tengah (2007)
10	Muarareja	1,14 %		DRD dan Puskud Mina BarunaJawa Tengah (2007)

Sumber : Laporan Dewan Riset Daerah, Budi Risharyanto, Sulistiyani Diah 2005-2007

Penelitian pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Cirebon dan kabupaten Cilacap (Ary Wahyono dkk, 2001) bertujuan untuk merumuskan suatu

model pemberdayaan masyarakat nelayan yang mempertimbangkan aspirasi dan upaya-upaya mereka sebagai bagian dari *survival strategy* untuk menghadapi ketidakberdayaan dan kemiskinan. Keterbatasan nelayan tidak terwujud dalam bentuk keterasingan, karena secara fisik masyarakat nelayan tidak lagi dapat dikatakan terisolasi dan terasing. Keterbatasan sosial lebih terwujud pada ketidakmampuan masyarakat nelayan dalam mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi pasar secara menguntungkan, yang ditunjukkan oleh lemahnya mereka dalam mengembangkan organisasi ke luar lingkungan kerabat mereka atau komunitas lokal. Karena itulah mereka mengalami nasib terpinggirkan (*marginal*) dari proses kemajuan. Keterbatasan politik dari masyarakat nelayan terwujud dalam tidak dilibatkannya mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, walaupun ini untuk kepentingan mereka sendiri.

PUSKUD Mina Baruna merupakan koperasi sekunder di Provinsi Jawa Tengah, yang salah satu tugas utamanya adalah menyelenggarakan kegiatan pelelangan ikan di seluruh Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2003, pengelolaan tempat pelelangan ikan dilakukan oleh PUSKUD Mina Baruna. Pelaksana pelelangan pada setiap TPI adalah KUD Mina di kabupaten/kota, sedangkan sebagai penanggungjawab adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah memiliki 22 KUD Mina yang tersebar di PANTURA Jawa Tengah (13 Kabupaten/Kota) dan PANSEL Jawa Tengah (2 kabupaten). Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan salah satu fasilitas fungsional yang harus ada dalam suatu pelabuhan perikanan (PP)/pangkalan pendaratan ikan (TPI), dan merupakan suatu tempat bertemunya

produsen (dalam hal ini nelayan) dengan pembeli (pedagang ikan) dan konsumen (Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Tengah, 2006).

Pengelola TPI dan pengurus KUD merupakan dua unsur yang terkait dalam mengatur pemasaran hasil tangkapan nelayan. Mereka adalah bagian dari sistem kelembagaan dalam perikanan yang turut menentukan kesejahteraan nelayan. Proses peningkatan keberdayaan nelayan menuntut peran mereka dalam mengelola sumberdaya perikanan..

Pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya. Proses ini pada akhirnya akan dapat menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada rakyat. Bank Dunia meletakkan pemberdayaan sebagai salah satu obyek utama dalam partisipasi masyarakat (Paul dalam Susilowati, 2004).Upaya pemberdayaan masyarakat pesisir di Bangladesh (Hongskul dalam Susilowati, 2004) dilakukan melalui beberapa cara, antara lain melalui kesadaran berorganisasi, memberdayakan masyarakat melalui memperkenalkan sumber-sumber pendapatan alternatif; memperbaiki akses untuk mendapatkan kemudahan dan layanan sosial ekonomi; memperkuat hubungan antar organisasi masyarakat dan institusi pemerintah.

Strategi pemberdayaan yang dikembangkan di masyarakat pesisir Jawa Timur adalah dengan diperlakukannya masyarakat sebagai subyek pemberdayaan; kegiatan yang dilakukan bersifat non fisik; kegiatan pemberdayaan berbasis kelembagaan sosial ekonomi, kerakyatan serta bertujuan memperkuat eksistensi kelembagaan organisasi sosial; bersifat berkelanjutan; didukung oleh jaringan

kemitraan yang luas, dimana perlu dukungan kebijakan dan fasilitas dari pemerintah, partisipasi pihak swasta, keterlibatan perbankan dan kontribusi dari pihak lain yang peduli pada pembangunan masyarakat di kawasan pesisir.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perlu dilakukan suatu kajian yang mendalam terhadap efisiensi Tempat Pelelangan Ikan, tingkat keberdayaan pengelola TPI untuk mendapatkan suatu strategi pemberdayaan yang dapat digunakan sebagai pijakan dalam melakukan perbaikan kinerja dan efisiensi pelelangan ikan yang dapat mensejahterakan masyarakat nelayan dan pengelolanya.

1.2. Rumusan Masalah

Berbagai persoalan kritis di bidang sosial ekonomi memunculkan sebab-sebab yang kompleks. Berbagai persoalan tersebut berkaitan dengan isu-isu tentang keterbatasan peralatan tangkap, kesulitan akses terhadap sumberdaya modal, kelemahan sumberdaya manusia (nelayan), hubungan ekonomi eksploitatif dengan penyedia modal informal, dan belum berfungsinya lembaga-lembaga ekonomi seperti KUD Mina/TPI secara optimal untuk membantu kegiatan nelayan. Permasalahan yang dihadapi oleh beberapa TPI di Pantai Utara Jawa Tengah bagian Barat adalah :

1. Adanya kendala dalam pembayaran secara tunai kepada nelayan yang disebabkan tersendatnya pembayaran dari para bakul (KPLI/Kekurangan Pembayaran Lelang Ikan)

2. Terjadinya alasan sosiologis dimana nelayan telah menjalin hubungan dengan pemodal dalam hubungan “*patron client*”, yaitu juragan/pemodal memberikan fasilitas kredit kepada nelayan, dan nelayan mempunyai kewajiban untuk menjual hasil tangkapan kepada juragan.
3. Dibeberapa daerah, nelayan banyak yang menjual di luar TPI dikarenakan mereka akan mendapat uang penjualan secara tunai, sementara untuk proses lelang di TPI pembayaran baru akan diberikan 2-3 hari kemudian.

TPI memegang peranan penting dalam suatu Pelabuhan Perikanan dan perlu untuk dikelola sebaik-baiknya agar dapat tercapai manfaat yang optimal. Tetapi dalam TPI belum tentu memenuhi persyaratan yang ada, sehingga berakibat pada efisiensi TPI tersebut. Pada umumnya, dalam pengelolaan TPI di Jawa Tengah, rasio antara pemakaian input dan output yang dihasilkan adalah belum layak secara ekonomis (Susilowati dkk, 2003). Oleh karena itu perlu dilakukan kajian tentang analisis pengelolaan TPI, dalam hal ini TPI kelas 1,2,3 di Pantura Jawa Tengah.

KUD Mina yang diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi nelayan selama ini juga belum optimal dalam menjalankan fungsinya. Secara ideal KUD Mina diharapkan dapat menjadikan nelayan memiliki *posisi bargaining* secara kolektif untuk membangun kerjasama dengan institusi lainnya dalam mengakses sumber dana dan memiliki kekuatan penekan kepada pemerintah agar secara politik diberikan keberpihakan dalam pengembangan usaha di bidang perikanan

Dua aspek yang menentukan dalam kaitannya dengan kegiatan kenelayanan dan berpengaruh langsung terhadap peningkatan kesejahteraan hidupnya adalah aspek kelembagaan/pranata produksi dan distribusi hasil tangkapan. Hubungan sosial yang melingkupi kedua aspek tersebut kurang menguntungkan nelayan. Oleh karena itu TPI perlu diberdayakan sesuai dengan kebutuhan untuk mengatasi ketimpangan hubungan sosial tersebut.

Ketidakterdayaan yang terjadi antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan mereka dalam menjalankan fungsi TPI dan KUD, akses terhadap kemampuan sosial dan politik (tidak mempunyai kemampuan lobi dan mempresentasikan diri dan kelompoknya). Hal ini disebabkan oleh rendahnya kapabilitas mereka, dan sebagai akibatnya dapat memperlemah kompetensi dan daya saing dalam mengelola TPI dan KUD Mina. Oleh karena itu perlu dilakukan sebuah strategi untuk membantu memandirikan (memberdayakan) mereka untuk mengelola organisasi (TPI dan KUD).

Pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efisiensi Tempat Pelelangan Ikan ?
2. Bagaimana tingkat keberdayaan pengelola Tempat Pelelangan Ikan dan pengurus KUD dilihat dari kemampuan mereka menjalankan fungsi kelembagaan secara optimal dan melakukan lobi untuk pengambilan keputusan?
3. Bagaimana Strategi Pemberdayaan yang akan diterapkan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis tingkat efisiensi TPI di daerah penelitian
2. Menganalisis tingkat keberdayaan pengelola Tempat Pelelangan Ikan dan pengurus KUD di daerah penelitian
3. Menganalisis strategi pemberdayaan yang tepat agar TPI, pengelola TPI dan KUD menjadi berdaya.

1.4. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kota / Kabupaten yang menjadi daerah penelitian dalam menentukan kebijakan terutama berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan nelayan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengelola TPI dan pengurus KUD Mina.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Efisiensi

Efisiensi merupakan tindakan memaksimalkan hasil dengan menggunakan modal (tenaga kerja, material dan alat) yang maksimal (Stoner, 1995). Efisiensi merupakan rasio antara input dan output, dan perbandingan antara masukan dan pengeluaran. Apa saja yang dimaksudkan dengan masukan serta bagaimana angka perbandingan tersebut diperoleh, akan tergantung dari tujuan penggunaan tolok ukur tersebut. Secara sederhana, menurut Nopirin (1997) efisiensi dapat berarti tidak adanya pemborosan.

Efisiensi adalah kemampuan untuk mencapai hasil yang diharapkan (output) dengan mengorbankan tenaga atau biaya (input) yang minimum atau dengan kata lain, suatu kegiatan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan kegiatan telah mencapai sasaran (output) dengan pengorbanan (input) terendah. Jika pengertian efisiensi dijelaskan dengan pengertian input-output maka efisiensi merupakan rasio antara output dengan input, atau dinyatakan dengan rumus sebagai berikut :

$$E = O/I$$

Dimana :

E = efisiensi

O = output

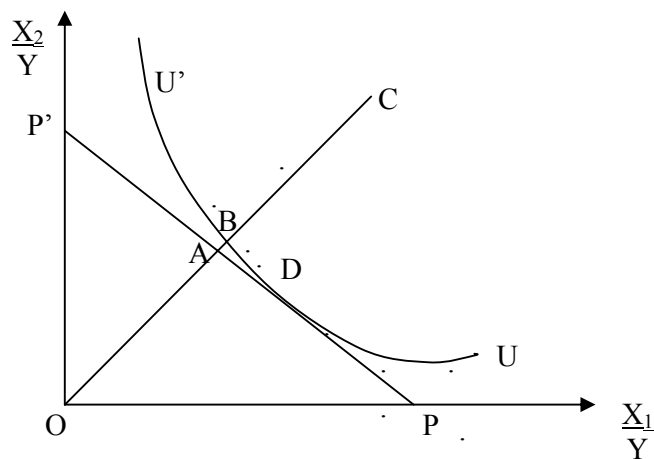
I = input

Efisiensi dapat dikatakan sebagai suatu upaya penggunaan input yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan produksi yang sebesar-besarnya (Soekartawi,1990).Menurut Soedarsono (1983) efisiensi produksi menggambarkan besarnya biaya atau pengorbanan yang harus dibayar/ditanggung untuk menghasilkan produksi.

Pengertian efisiensi dalam produksi, bahwa efisiensi merupakan perbandingan output dan input berhubungan dengan tercapainya output maksimum dengan sejumlah input, artinya jika ratio output besar, maka efisiensi dikatakan semakin tinggi. Dapat dikatakan bahwa efisiensi adalah penggunaan input yang terbaik dalam memproduksi barang (Shone dalam Susantun, 2000). Farel membedakan efisiensi menjadi tiga yaitu: (1) efisiensi teknik, (2) efisiensi alokatif (efisiensi harga), dan (3) efisiensi Ekonomi.

Efisiensi teknik mengenai hubungan antara input dan output. Timmer dalam Susantun (2000) mendefinisikan efisiensi teknik sebagai ratio input yang benar-benar digunakan dengan output yang tersedia. Efisiensi alokatif menunjukkan hubungan biaya dan output. Efisiensi alokatif tercapai jika perusahaan tersebut mampu memaksimalkan keuntungan yaitu menyamakan produk marjinal setiap faktor produksi dengan harganya. Efisiensi ekonomi produk dari efisiensi teknik dan efisiensi harga. Jadi efisiensi ekonomis dapat dicapai jika kedua efisiensi tercapai.

Gambar 2.1
Efisiensi Unit *Isoquant*



Sumber : Soekartawi, 1990

Pemikiran Farel (dalam Soekartawi, 1990) dapat disederhanakan dalam grafik (gambar 2.1), dimana menggambarkan suatu perusahaan dengan dua input dan satu output. Pada gambar tersebut UU' adalah garis *isoquant* yang menggambarkan tempat kedudukan titik-titik kombinasi penggunaan input X1 dan X2 untuk mendapatkan sejumlah output tertentu yang optimum, garis ini sekaligus menunjukkan garis *frontier* dari fungsi produksi Cobb Douglas. Garis PP' adalah garis biaya yang merupakan tempat kedudukan titik-titik kombinasi dari biaya yang dialokasikan untuk mendapatkan sejumlah input X1 dan X2 untuk mendapatkan biaya yang optimal. *Garis* OC yang menggambarkan “jarak” sampai seberapa teknologi dari suatu usaha yang dilakukan (baik pertanian maupun non-pertanian).

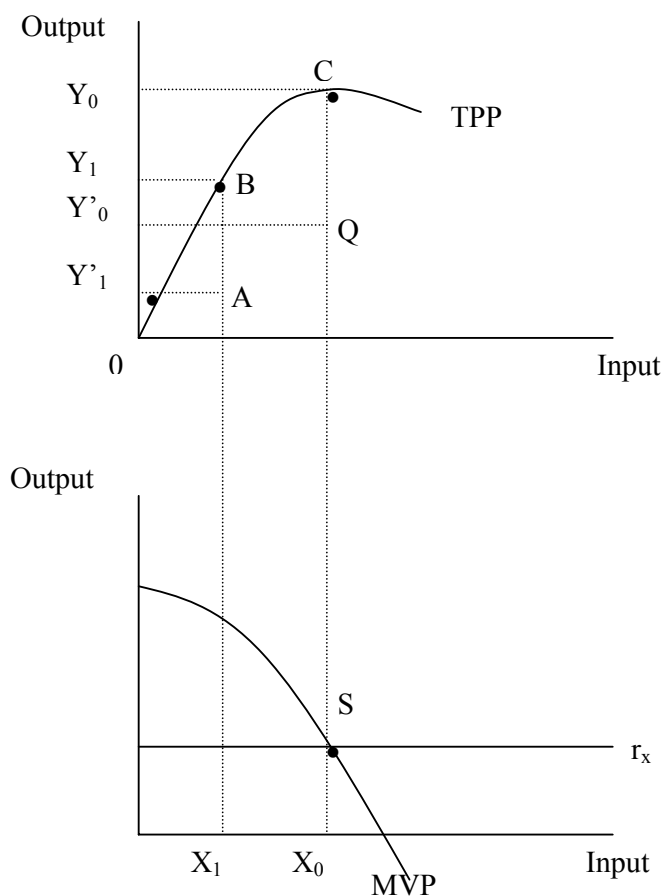
Karena UU' adalah garis *isoquant*, maka semua titik yang terletak di garis tersebut adalah titik yang menunjukkan bahwa di titik tersebut terdapat produksi yang maksimum. Dengan demikian bila titik tersebut berada di bagian luar garis

isoquant misalnya di titik C, maka dapat dikatakan bahwa teknologi produksi belum mencapai tingkat yang maksimum. Di pihak lain, karena garis PP' adalah garis biaya, maka setiap titik yang berada pada garis tersebut menunjukkan biaya yang optimal yang dapat digunakan untuk membeli input X1 dan X2 untuk mendapatkan produksi yang optimum. Untuk mengukur besarnya nilai ketiga efisiensi adalah sebagai berikut:

- a. Efisiensi teknik (ET) = $OB/OC \leq 1$;
- b. Efisiensi harga (EH) = $OA/OB \leq 1$;
- c. Efisiensi ekonomi (EE) = $OA/OB \times OB/OC = OA/OC$

Pengukuran in-efisiensi teknik dan alokatif (harga) menurut Mondac dan Hert dalam Sufriidson, et al. (1989) dapat dijelaskan dalam Gambar 2.2. sebagai berikut:

Gambar 2.2
Pengukuran inefisiensi teknik dan alokatif (harga)



Pada gambar 2.2 dapat dijelaskan bahwa kondisi kedua efisiensi tercapai pada saat input yang digunakan adalah X_2 dengan nilai produk marginal (NPM) sama dengan harga input (r_x) dengan tingkat output optimum pada titik C. Pada titik Q secara teknik belum efisien karena output yang dicapai Y_0' lebih kecil dari pada Y_0 . Bila input yang digunakan X_1 maka output yang dihasilkan adalah Y_1 secara teknik dikatakan sudah efisien tetapi secara alokatif input belum efisien.

Cara pengukuran in-efisiensi menurut Modac dan Hert dalam Sufriyson et al. (1989) adalah :

$$\text{Inefisiensi teknik} = ET = \frac{Y_1 - Y_1'}{Y_1'} \text{ dan}$$

$$\text{Inefisiensi alokatif} = EH = \frac{Y_0 - Y_1'}{Y_0'}$$

2.2.Fungsi Produksi

2.2.1. Pengertian

Menurut Miller dan Meiners (1997), produksi diartikan sebagai penggunaan atau pemanfaatan sumberdaya yang mengubah suatu komoditi menjadi komoditi lainnya yang sama sekali berbeda, baik dalam pengertian apa, dan di mana atau kapan komoditi-komoditi itu dialokasikan, maupun dalam pengertian apa yang dapat dikerjakan oleh konsumen terhadap komoditi itu.

Tedy Herlambang dkk (2002) menyatakan bahwa produksi adalah suatu kegiatan yang mengubah input menjadi output. Kegiatan tersebut dalam ekonomi biasa dinyatakan dalam fungsi produksi. Fungsi produksi menunjukkan jumlah maksimum output yang dapat dihasilkan dari pemakaian sejumlah input dengan menggunakan teknologi tertentu. Secara matematika fungsi produksi dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Q = f(K, L, X, E) \dots \dots \dots (2.1)$$

di mana

Q = output

K, L, X, E = input (kapital, tenaga kerja, bahan baku, keahlian keusahawanan)

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa output tidak hanya tergantung dari jumlah faktor produksi saja tetapi juga dari sejarah total produksi perusahaan. Produktivitas dari perusahaan diperoleh dari pengetahuan sepanjang produksi (pengalaman). Sehingga fungsi produksi dapat ditulis sebagai berikut :

$$Q = f(K, L, \sum Z) \dots \dots \dots (2.2)$$

$\sum Z$ = pengalaman

Menurut Sadono Sukirno (2005), fungsi produksi adalah hubungan diantara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakannya. Faktor-faktor produksi dikenal dengan istilah input dan jumlah produksi disebut sebagai output. Fungsi produksi dinyatakan dalam bentuk rumus sebagai berikut :

$$Q = f(K, L, R, T) \dots \dots \dots (2.3)$$

di mana, K adalah jumlah stok modal, L adalah jumlah tenaga kerja, R adalah kekayaan alam dan T adalah tingkat teknologi yang diciptakan. Sedangkan Q adalah jumlah produksi yang dihasilkan oleh berbagai jenis faktor-faktor produksi tersebut.

Soekartawi (2003) menyatakan bahwa fungsi produksi adalah hubungan fisik antara variabel yang dijelaskan (Y) dan variabel yang menjelaskan (X). Variabel yang dijelaskan biasanya berupa output dan variabel yang menjelaskan biasanya berupa input, secara matematis hubungan ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, \dots, X_i, \dots, X_n) \dots \dots \dots (2.4)$$

Dengan fungsi seperti tersebut di atas, maka hubungan antara X dan Y dapat diketahui sekaligus hubungan X_1, \dots, X_n dan X lainnya juga dapat diketahui.

Dalam teori ekonomi terdapat perbedaan antara faktor produksi jangka pendek dengan faktor produksi jangka panjang. Analisa kegiatan produksi dikatakan dalam jangka pendek apabila sebagian dari faktor produksi dianggap tetap jumlahnya. Dalam jangka panjang semua faktor produksi dapat mengalami perubahan, ini berarti bahwa dalam jangka panjang setiap faktor produksi dapat ditambah jumlahnya kalau memang hal tersebut diperlukan (Sukirno, 2005).

2.2.2. Hukum Pertambahan Hasil Yang Semakin Berkurang

Herlambang dkk (2002) menyatakan bahwa *Total Product* (TP) merupakan produksi total yang dihasilkan oleh suatu proses produksi. *Marginal Product* (MP) menunjukkan perubahan produksi yang diakibatkan oleh perubahan penggunaan satu satuan faktor produksi variabel. Misalnya ; faktor produksi yang berubah adalah tenaga kerja (L) maka :

$$MP_L = Q/\Delta L \dots \dots \dots (2.5)$$

Average Product (AP) menunjukkan besarnya rata-rata produksi yang dihasilkan oleh setiap penggunaan satu satuan faktor produksi variabel.

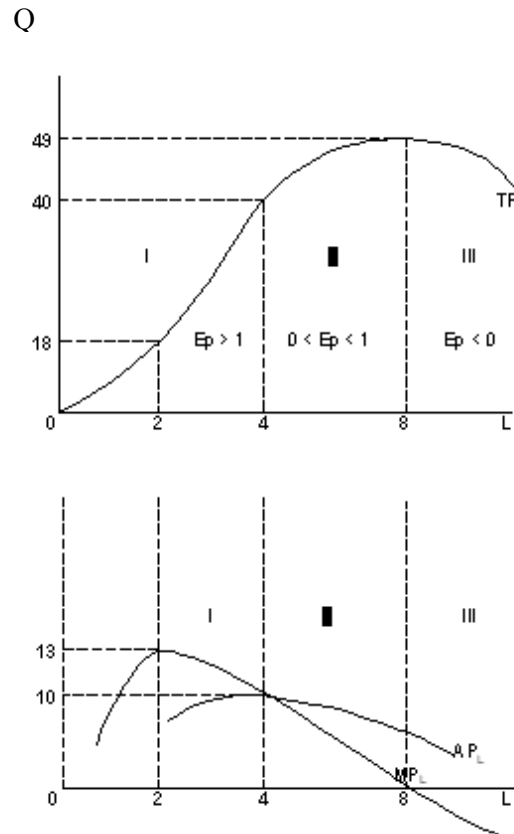
$$AP_L = Q/L \dots \dots \dots (2.6)$$

Dalam teori produksi selalu terjadi suatu hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Hukum tersebut menjelaskan sifat pokok dari hubungan diantara tingkat produksi dan tenaga kerja yang digunakan untuk mewujudkan produksi tersebut. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang menyatakan bahwa apabila

faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya (tenaga kerja) terus menerus ditambah sebanyak satu unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak pertumbuhannya, tetapi sesudah mencapai tingkat tertentu produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. Sifat pertambahan produksi seperti ini menyebabkan pertambahan produksi total semakin lambat dan akhirnya mencapai tingkat yang maksimum dan kemudian menurun (Sukirno, 2005).

Menurut Herlambang dkk (2002), hukum kenaikan hasil yang berkurang merupakan kaidah yang menunjukkan pola yang berlaku bagi perubahan MP dari suatu faktor produksi. Pada tahap awal MP akan berubah dengan laju yang meningkat (*increasing rate*) kemudian jika faktor produksi ditambah terus maka kenaikannya akan menurun (*decreasing rate*). Berlakunya hukum kenaikan hasil yang berkurang disebabkan oleh kelangkaan faktor produksi (makin memburuknya kualitas input) dan kejenuhan (laju keausan yang meningkat) dari faktor produksi. Untuk menghindari hukum tersebut dapat dilakukan dengan memperbaiki teknologi dan membagi waktu produksi dalam dua periode yang berbeda.

Gambar 2.3
Tahap-Tahap Produksi



Sumber : Herlambang dkk, 2002.

Gambar 2.3 dapat dibagi menjadi tiga bagian daerah produksi, yaitu pada saat AP_L naik hingga AP_L maksimum (daerah I), dari AP_L maksimum hingga TP maksimum atau $MP_L = 0$ (daerah II) dan daerah TP yang menurun (daerah III). Pada Daerah I dikatakan “*irrational region*” karena penggunaan input masih menaikkan TP sehingga pendapatan masih dapat terus diperbesar. Daerah II adalah “*rational region*” karena pada daerah ini dimungkinkan pencapaian pendapatan maksimum, pada daerah ini pula tercapai TP maksimum. Sedangkan

pada daerah III adalah “*irrational region*” karena TP adalah menurun. Pada saat AP_L mencapai maksimum, MP_L berpotongan dengan AP_L . Hal ini disebabkan karena pola dari MP. Pada saat MP_L naik maka AP_L juga naik. Pada saat MP_L menurun maka AP_L akan naik selama nilai $MP_L > AP_L$. Pada saat MP_L terus turun dan nilai $MP_L < AP_L$ maka AP_L akan menurun. Karena pola seperti inilah maka MP_L memotong AP_L pada saat AP_L maksimal.

2.2.3. Hubungan Fungsi Produksi dengan Efisiensi

Hubungan fisik antara output dan input sering disebut dengan fungsi produksi. Efisiensi dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara keluaran (output) dengan masukan (input), atau jumlah keluaran yang dihasilkan dari satu input yang digunakan.

Efisiensi dapat diestimasi dengan teknik analisis *Data Envelopment Analysis* (DEA) yang memiliki karakter berbeda dengan konsep efisiensi pada umumnya (yang didekati dengan pendekatan parametrik, seperti regresi). Ada beberapa alasan mengapa alat analisis DEA dapat dipakai untuk mengukur efisiensi suatu proses produksi, yaitu (1) efisiensi yang diukur adalah bersifat teknis, bukan ekonomia. Ini dimaksudkan bahwa, analisis DEA hanya memperhitungkan nilai absolut dari suatu variabel. Satuan dasar pengukuran yang mencerminkan nilai ekonomis dari tiap-tiap variabel seperti harga, berat, panjang, isi dan lainnya tidak dipertimbangkan. Oleh karenanya dimungkinkan suatu pola perhitungan kombinasi berbagai variabel dengan satuan yang berbeda-beda. (2) nilai efisiensi yang dihasilkan bersifat relatif atau hanya berlaku dalam sekumpulan Unit Kegiatan Ekonomi (UKE) yang dibandingkan (Nugroho, 1995)

Selanjutnya, efisiensi untuk mengukur kinerja proses produksi dalam arti luas dengan mengoperasionalkan variabel-variabel yang mempunyai satuan yang berbeda-beda, yang kebanyakan seperti dalam pengukuran barang-barang publik atau barang yang tidak mempunyai pasar tertentu, maka analisis DEA merupakan pilihan yang sesuai (Mumu dan Susilowati, 2004)

Data Envelopment Analysis (DEA) merupakan suatu pendekatan non parametrik yang pada dasarnya merupakan teknik berbasis *linear programming*. DEA bekerja dengan langkah mengidentifikasi unit-unit yang akan dievaluasi, input serta output unit tersebut Kemudian menghitung nilai produktivitas dan mengidentifikasi unit mana yang tidak menggunakan input secara efisien atau tidak menghasilkan output secara efektif. Produktivitas yang diukur bersifat komparatif atau relatif karena hanya membandingkan antar unit pengukuran dari 1 set data yang sama.

2.3. Pemberdayaan

Prinsip pemberdayaan memberikan alasan bahwa setiap tahap kegiatan perencanaan, dilaksanakan dengan kapasitas, yaitu memfasilitasi pengembangan pendidikan dan kelembagaan desa. Proses pemberdayaan dan kapasitas ini tidak lain adalah proses pembelajaran penduduk dan kelembagaan desa agar memiliki kemampuan pengelolaan sumber daya desa. Proses ini perlu difasilitasi oleh fasilitator (Surochiem, 2001)

Pada awal kegiatan, peranan fasilitator masih cukup besar, tetapi peranan tersebut akan berangsur-angsur surut dengan bertambah berdayanya penduduk

dan kelembagaan desa. Dan pada akhirnya berperan sebagai fasilitator jarak jauh. Jadi 3 kunci peran serta adalah kesadaran dan kemauan untuk dating, ikut aktif dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Konsepsi pemberdayaan (*empowerment*) sebagai salah satu efek dari pembangunan hanya menjadikan masyarakat sekedar menjadi obyek semata menuju masyarakat yang benar-benar menjadi subyek pembangunan itu sendiri. Strategi pembangunan yang sejalan dengan itu adalah pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat (*People Centered Development*) khususnya masyarakat yang selama ini paling tidak diuntungkan oleh hasil-hasil pembangunan. (Surochiem, 2001)

Pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, social dan ransformasi budaya. Proses ini pada akhirnya akan dapat menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada rakyat. Menurut Uphof dalam Indah Susilowati, dkk (2004), pemberdayaan diartikan sebagai berikut :

“ empowerment is particularly challenging because of inhenrent ambiguity and elusiveness of what is to be measured. It can be argued with justification that empowerment does not really a reflection of other things that do exist. While this does not mean that we can not measure empowerment...” “Power” to identify what are kinds of power based proposed by political scientists and economist over many years. He concluded there are six categoies of resources or asset that can ce accumulated and utilized tho achieve objectives (1) economics (2) Social,, (3) political, (4) informational; (5) moral, and (6) physical.

Menurut Moelyarto dalam Wahono dkk (2001) pengertian pemberdayaan masyarakat mengacu pada kata “*empowerment*” yaitu, sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat.

Kartasmita dalam Surochiem (2001) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan baru pembangunan, yaitu *people centered, participatory, empowering and sustainable*. Konsep ini tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) dan mencegah proses kemiskinan lebih lanjut (*safety net*) dimana upaya yang dilakukan akan diarahkan langsung kepada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat. Bagian yang tertinggal dalam masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya dengan mengembangkan dan mendinamiskan potensinya, pendek kata memberdayakannya. Dengan demikian rakyat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah ekonomis. Rakyat miskin atau yang berada pada posisi belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat bukan hanya ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya. Dengan demikian dapat diartikan pemberdayaan tidak hanya menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomis, tetapi juga nilai tambah sosial dan nilai tambah budaya.

Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai proses untuk mengaktualisasikan potensi manusia (Soetomo, 2006). Dalam kaitan dengan potensi manusia yang perlu diaktualisasikan agar dapat terpenuhi kehidupan sesuai dengan harkat dan martabat manusia, didalamnya terkandung tiga nilai, yaitu kelestarian hidup, harga diri dan kebebasan (Korten dalam Soetomo, 2006).

Dengan pemberdayaan diharapkan akan dapat meningkatkan akses kelompok miskin dalam proses pengambilan keputusan, akses terhadap fasilitas dan pelayanan, akses terhadap bantuan hukum, meningkatkan posisi tawar, serta mengurangi peluang terjadinya eksploitasi oleh kelompok lain.

2.3.1. Prinsip-prinsip Pemberdayaan

Pada dasarnya, pemberdayaan masyarakat nelayan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial, dan hal ini menjadi basis membangun *fondasi civil society* di kawasan pesisir. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan dukungan kualitas sumberdaya manusia (SDM), kapasitas dan fungsi kelembagaan social ekonomi yang optimal dalam kehidupan warga, serta tingkat partisipasi politik warga yang tinggi (Kusnadi, 2006). Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang komprehensif dan tujuan yang terukur, yang pencapaiannya dilakukan secara bertahap, dengan memperhatikan kemampuan sumber daya pembangunan yang dimiliki oleh masyarakat lokal.

Tujuan pemberdayaan di atas dapat tercapai dengan baik, jika terjadi interaksi dialetika yang konstruktif, antara Negara, masyarakat dan kebijakan atau strategi pengelolaan sumberdaya sosial, ekonomi dan lingkungan. Beberapa dasar pemikiran filosofis yang harus dipertimbangkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan adalah sebagai berikut (Kusnadi, 2007)

1. Potensi sumberdaya alam yang ada di kawasan pesisir adalah karunia Allah SWT yang harus dijaga kelestariannya

2. Pengelolaan potensi sumberdaya alam pesisir dan laut harus dilaksanakan oleh masyarakat pengguna berdasarkan sikap hati-hati
3. Negara bertanggungjawab terhadap masa depan kehidupan warganya dan menjamin perwujudan hak-hak warga terhadap akses sumberdaya ekonomi dan lingkungan sebagai upaya menjaga kelangsungan hidup masyarakat di kawasan pesisir
4. Negara, masyarakat dan pihak lain bertanggung jawab untuk melindungi kelestarian sumber daya alam dari berbagai ancaman
5. Kawasan pesisir merupakan “halaman depan” Negara Kepulauan Republik Indonesia, sehingga pembangunan kawasan pesisir harus ditujukan untuk memperkuat ketahanan bangsa (masyarakat nelayan) menghadapi berbagai ancaman yang datang dari arah laut. Kerapuhan sosial ekonomi masyarakat nelayan berpotensi menjadi sumber ketidakstabilan politik kawasan.

Disamping landasan filosofis di atas, asas-asas yang harus dijadikan referensi dalam mengaplikasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan adalah sebagai berikut (Kusnadi, 2007)

1. Azaz kemanusiaan.

Asas ini menenmpatkan pemberdayaan sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dalam rangka memanusiakan manusia. Oleh karena itu harus dihindari timbulnya percikan pemikiran dan aktivitas-aktivitas pemberdayaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

2. Asas Keadilan Sosial

Asas ini menempatkan kesejahteraan sosial dan kemakmuran ekonomi yang merata, proporsional, dan adil sebagai tujuan pembangunan dan menjadi sarana mewujudkan kebahagiaan dunia khairat masyarakat di kawasan pesisir

3. Asas demokrasi Partisipatif

Asas ini menempatkan bahwa kegiatan untuk mencapai tujuan pemberdayaan merupakan proses panjang yang harus menjadi tanggungjawab semua pihak. Demokratisasi dalam pemberdayaan merupakan upaya mewujudkan tanggungjawab kolektif dalam mengemban amanat pembangunan. Oleh karena itu, asas demokrasi partisipatif sangat menghargai dan menjunjung tinggi prakarsa lokal dan partisipasi masyarakat.

2.3.2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan menurut Sulistyani (2004) adalah membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri, apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif,

konatif, psikomotorik, afektif, dengan penerahan sumberdaya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.

Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, afektif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan. Karena dengan demikian dalam masyarakat terjadi kecukupan wawasan, yang dilengkapi dengan kecakapan-ketrampilan memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhannya tersebut.

2.3.3. Dimensi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Ada lima konsep atau teori tentang pemberdayaan Sumber Daya Manusia yang dikemukakan oleh para pakar sebagai berikut (Syarif Makmur,2007):

- a. Bennis dan Mische (1995:45) mengemukakan bahwa pemberdayaan berarti menghilangkan batasan birokratis yang mengotak-ngotakkan orang dan membuat mereka menggunakan seefektif mungkin ketrampilan, pengalaman, energi dan ambisinya.
- b. Cook dan Steve (1996:6) mengemukakan bahwa pemberdayaan meliputi memindah tanggung jawab kepada staf garis depan, diperhitungkan dalam pengambilan keputusan dan diberi kesempatan untuk menjadi seorang individu
- c. Kartasmita (1996:3) menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis, mengembangkan diri dan mencapai kemajuan.

- d. Stewart (1988; 77) mengemukakan bahwa pemberdayaan menuntut lebih banyak kecakapan dan sumber daya manajerial yang menuntut digunakannya seperangkat kecakapan baru yaitu membuat mampu (*enabling*), memperlancar (*facilitating*), berkonsultasi (*consulting*), bekerjasama (*collaborating*), membimbing (*mentoring*) dan mendukung (*supporting*)

2.3.4. Indikator Keberdayaan Nelayan

Beberapa indikator kualitatif yang menandai bahwa suatu masyarakat nelayan memiliki keberdayaan adalah sebagai berikut (Kusnadi, 2006):

- 1) Tercapainya kesejahteraan sosial ekonomi : individu, rumah tangga, dan masyarakat, yang ditandai dengan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kemandirian ekonomi berkembang dan orientasi kewirausahaan meningkat.
 - b. Nilai tabungan dan investasi bertambah
 - c. Kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi, optimal dan berkelanjutan
 - d. Kondisi kualitas SDM berkembang baik
- 2) Kelembagaan ekonomi berfungsi optimal dan aktivitas ekonomi stabil kontinuitasnya
- 3) Kelembagaan sosial berfungsi dengan baik sebagai instrumen pembangunan lokal
- 4) Berkembangnya kemampuan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi : informasi, kapital, pasar dan teknologi

- 5) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan di kawasan pesisir dan tumbuhnya kesadaran kritis warga terhadap persoalan-persoalan pembangunan yang ada di kawasan pesisir.
- 6) Kawasan pesisir menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dan ekonomi nasional yang dinamis, serta memiliki daya tarik investasi.

2.3.5. Tahap-tahap Pemberdayaan

Menurut Sumodiningrat (dalam Sulistyani, 2004) pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Meskipun demikian dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.

Tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses belajar adalah :

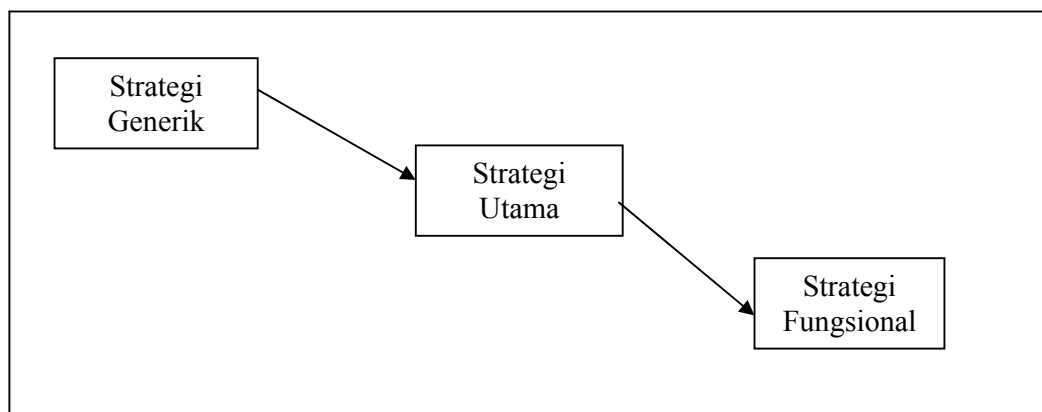
1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-ketrampilan agar terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan ketrampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan kepada kemandirian.

2.3.6. Strategi dan Klasifikasinya

Hamel dan Prahalad dalam Umar (2003) mendefinisikan strategi sebagai tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Klasifikasi strategi menurut Umar (2003) adalah sebagai berikut

Gambar 2.4
Rincian Dari Strategik sampai Fungsional



Sumber :Umar,2003

1. Strategi Generik

Menurut Davis dalam Umar (2003) pada umumnya, *strategi generic* dapat dikelompokkan atas empat kelompok strategi, yaitu :

a. Strategi Integrasi Vertikal

Strategi ini menghendaki agar melakukan pengawasan yang lebih terhadap distributor, pemasok atau pesaing

b. Strategi Intensif

Strategi ini memerlukan usaha-usaha yang intensif untuk meningkatkan posisi persaingan yang ada.

c. Strategi Diversifikasi

Strategi ini dimaksudkan untuk menambah produk-produk baru.

d. Strategi Bertahan

Strategi ini bermaksud untuk melakukan tindakan penyelamatan agar terlepas dari kerugian yang besar (kebangkrutan).

2. Strategi Utama

Macam-macam strategi utama dari Strategi Generik Davis dapat dijelaskan dalam tabel 2.1

Tabel 2.1
Strategi Utama Fred R Davis

Strategi Generik	Strategi Utama
Strategi Intengrasi Vertikal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Strategi Integrasi ke Depan ▪ Strategi Integrasi Ke Belakang ▪ Strategi Integrasi Horizontal
Strategi Intensif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Strategi Pengembangan Pasar ▪ Strategi Pengembangan Produk ▪ Strategi Penetrasi Pasar
Strategi Diversifikasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Strategi Diversifikasi Konsentrik ▪ Strategi Diversifikasi Konglomerat ▪ Strategi Diversifikasi Horizontal
Strategi Bertahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Strategi Usaha Patungan ▪ Strategi Penciutan Biaya ▪ Strategi Penciutan Usaha ▪ Strategi Likuidasi

Sumber : Umar,2003

2.3.5.1.Strategi Pemberdayaan

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Menurut Hamel dan Prahadad dalam Freddy (2006), Strategi merupakan tindakan yang bersifat

incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang harus diharapkan pelanggan.

Dalam rangka memperbaiki taraf hidup dan memberi peluang kepada nelayan supaya terlepas dari kemiskinan struktural ada strategi yang harus diperhatikan, yaitu (Suyanto,2003) :

1. Sejak awal harus disadari bahwa upaya pemberdayaan nelayan tradisional tidak mungkin dilakukan hanya dengan cara mentransplantasikan teknologi modern kepada kelompok nelayan tradisional secara top down. Pemberdayaan nelayan seyogyanya mempertimbangkan dan bahkan bertumpu keberadaan pranata sosial budaya di masing-masing komunitas lokal nelayan tradisional.
2. Apapun bantuan yang diberikan kepada kelompok nelayan tradisional seyogyanya tidak berorientasi pada kepentingan jangka pendek, sekedar menekankan kepada efisiensi pengembalian dana. Padahal semestinya harus berorientasi pada pemupukan investasi sosial yang berjangka panjang dan bersifat strategis.
3. Memberdayakan dan meningkatkan kadar kekenyalan, serta sekaligus mengurangi kadar kerentanan nelayan tradisional yang miskin dengan cara mendorong terjadinya proses diversifikasi hasil tangkapan dan diversifikasi non perikanan
4. Berusaha menurangi kadar kerentanan keluarga nelayan tradisional dengan cara meningkatkan daya tahan dan nilai tawar dari produk yang mereka hasilkan.

5. Pemberdayaan perempuan dan lansia mendukung proses penguatan penyangga ekonomi keluarga nelayan tradisional. Di lingkungan komunitas nelayan, sudah lazim terjadi ada semacam pembagian kerja, bahwa lelaki bertugas mencari ikan di laut, sedangkan peran perempuan cenderung pada tahap pengolahan dan pemasaran ikan hasil tangkapan.
6. Bagaimana memutus mata rantai eksploitasi yang selama ini merugikan posisi nelayan tradisional. Caranya, tidak semata-mata mengandalkan kebijakan regulatif dari pemerintah atau pemerintah daerah, tetapi yang utama harus bertumpu pada pemberdayaan komunitas nelayan tradisional itu sendiri sebagai sebuah kelompok sosial.
7. Perlu disadari bahwa yang namanya nelayan atau komunitas desa pantai, sebetulnya bukanlah kelompok yang homogen. Buruh nelayan dan nelayan tradisional umumnya adalah golongan masyarakat pesisir yang berada pada lapisan sosial paling bawah, yang dalam banyak hal memiliki kerentanan, ketidakberdayaan, kelemahan jasmani, kemiskinan, dan keterisolasian yang lebih parah dibandingkan dengan nelayan modern
8. Sebagai tindak lanjut dari program perlindungan dan pemberdayaan keluarga nelayan tradisional melalui program pengembangan diversifikasi usaha.

Pada dasarnya kegiatan pemberdayaan diharapkan memberikan kontribusi besar untuk (Kusnadi, 2007):

- a. Membangun kemandirian masyarakat nelayan
- b. Meningkatkan *bargaining position* terhadap pemerintah (negara) dan pihak swasta dalam menentukan kebijakan pembangunan kawasan

- c. Memperkuat akses ekonomi-politik kelembagaan sosial masyarakat beserta jaringan kerja sama dengan berbagai pihak, dan
- d. Mewujudkan tata kelola pemerintahan (*good governance*)

2.4. Teori Kinerja

2.4.1. Kinerja Karyawan

Kinerja pada dasarnya merupakan hasil yang diperoleh seseorang atau lembaga dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. Kinerja secara umum diartikan sebagai hubungan antara hasil nyata maupun fisik (barang/jasa) dengan masukan yang sebenarnya, atau dengan kata lain perbandingan antara hasil luaran dan masukan. Masukan disini sering dibatasi dengan tenaga kerja, sedang luaran diukur dalam kesatuan fisik bentuk nilai. Dengan kata lain kinerja dapat dinyatakan sebagai rasio antara luaran terhadap masukan, atau rasio hasil yang diperoleh terhadap sumberdaya yang diakui.

Meier (dalam As'ad 1989), memberikan batasan kinerja sebagai kesuksesan seseorang (organisasi) dalam melaksanakan pekerjaan/tugasnya. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Robbins (1991), bahwa kinerja merupakan suatu hasil yang dicapai oleh pekerja (organisasi) dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan.

Menurut Simamora (dalam Prabunegara, 2005), kinerja (*performance*) dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu :

1. Faktor Individual yang terdiri dari kemampuan dan keahlian, latar belakang dan Demografi

2. Faktor Psikologis yang terdiri dari persepsi, attitude, personality, pembelajaran, motivasi
3. Faktor Organisasi yang terdiri dari sumber daya, kemampuan, penghargaan, struktur, *Job Design*

Kinerja individu adalah hasil kerja karyawan baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan. Kinerja individu ini akan tercapa organisasi apabila didukung oleh atribut individu, upaya kerja dan dukungan

Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa kinerja Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dapat ditingkatkan bila penggunaan input sesuai dengan kebutuhan untuk mendapatkan output yang maksimal, dalam hal ini nilai produksi ikan di TPI. Faktor-faktor atau input itu antara lain jumlah dari bakul, gerobak, timbangan, basket ikan, dan karyawan TPI.

2.4.2. Kinerja Organisasi/ Lembaga

Menurut Pause (1994), pengukuran kinerja merupakan salah satu upaya agar dapat memobilisasi sumber daya secara efektif dan dapat memebrikan arah pada keputusan strategis yang menyangkut perkembangan organisasi di masa yang akan datang.

Kinerja organisasi bersifat multidimensional, oleh sebab itu harus ditentukan atas dasar berbagai profil ukuran ekonomi, efektivitas dan efisiensi. Salah satu aspek yang populer digunakan untuk menentukan kinerja suatu unit kegiatan ekonomi adalah pengukuran efisiensi.

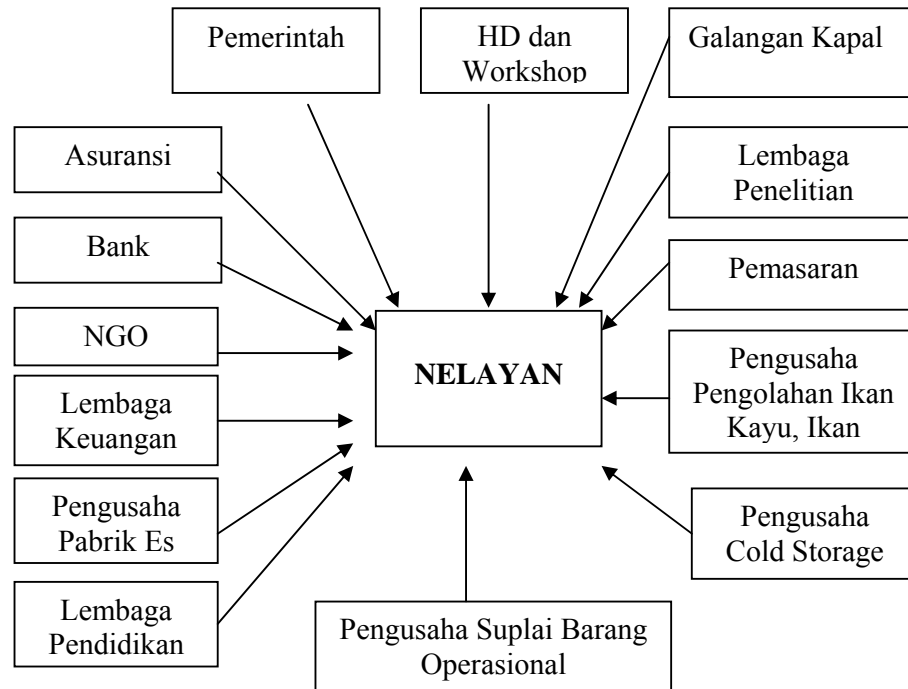
Kinerja merupakan suatu hasil yang dicapai oleh pekerja atau organisasi dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk satu pekerjaan dimaksud (Robbins, 1991). Kinerja perusahaan merupakan konstruk yang umumnya digunakan untuk mengukur dampak dari sebuah strategi pada perusahaan (Ferdinand, 2002)

Sementara Meier dalam As'ad (1989) memberikan batasan kinerja (*performance*) merupakan kesuksesan seseorang (organisasi) dalam hal melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas. Kinerja dapat digambarkan sebagai konstruk dimensi yang mengikuti konsep kerja. Konstruk tersebut antara lain adalah kinerja keuangan, operasional dan organisasi.

2.5. Kelembagaan Sektor Perikanan

Kelembagaan sektor perikanan saat ini belum sempurna, khususnya yang bernuansa bisnis Perikanan dalam suatu sistem, hal ini belum terhadap sistem agrobisnis yang terintegrasi antara aspek input, penangkapan, pengolahan, dan pemasaran ekspor maupun dalam negeri. Tiadanya ikatan institusional antar pelaku dalam Agrobisnis Perikanan tersebut menyebabkan nelayan yang bersifat lemah, menghadapi kelompok kutub hilir (pedagang/ broker ikan) maupun penyuplai faktor produksi pedagang barang-barang untuk keperluan operasional yang sangat kuat yang menyebabkan munculnya masalah transmisi global. Untuk jelasnya dapat dilihat struktur kelembagaan pada gambar berikut (Partosuwiryo, 2003) :

Gambar 2.4
Struktur Lembaga di Perikanan Rakyat



Sumber : Partosuwiryo, 2003

Permasalahan yang dijumpai di sektor perikanan menurut Mulyono (2003) adalah terjadinya transmisi harga yang tidak simetris, dimana informasi penurunan harga di informasikan kepada nelayan dengan cepat dan sempurna, sedangkan kenaikan harga diinformasikan kepada nelayan sangat lambat dan tidak sempurna, bahkan dijadikan alat untuk memperkuat posisi memonopoli oleh Agrobisnis Hilir

- a. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki atau yang diperoleh Agrobisnis Hilir tidak ditransmisikan ke nelayan

- b. Modal Investasi yang relatif lebih banyak dimiliki Agribisnis Hilir (pedagang, eksportir) kurang disalurkan dengan baik, bahkan cenderung digunakan untuk mengeksploitasi nelayan.

2.6. Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan Perikanan / Pangkalan Pendaratan Ikan (PP/PPI) merupakan fasilitas yang sangat vital bagi kegiatan perikanan. Secara umum fungsi PP/PPI adalah : (Direktorat Jenderal Perikanan 1996/1997):

- a. sebagai tempat pengembangan masyarakat nelayan
- b. pusat pelayanan tambat labuh kapal/perahu perikanan
- c. tempat pendaratan ikan hasil tangkapan
- d. tempat pelayanan kegiatan operasional kapal/perahu perikanan
- e. tempat pemasaran dan distribusi hasil perikanan
- f. tempat pengembangan industri dan pelayanan ekspor perikanan
- g. tempat pelaksanaan pengawasan (MCS), penyuluhan dan pengumpulan data perikanan

Prasarana pelabuhan perikanan / pangkalan pendaratan ikan terdiri atas :

- a. fasilitas dasar terdiri dari penahan gelombang, alur pelayaran, rambu-rambu navigasi, kolam pelabuhan, dermaga/yetty dan lahan untuk kawasan industri perikanan (dibangun dan dibiayai oleh pemerintah)
- b. fasilitas fungsional, terdiri dari pabrik es, coldstorage, dok/galangan kapal, bengkel, tangki BBM, instalasi air bersih, instalasi listrik,

gedung lelelangan ikan, balai pertemuan nelayan, radio komunikasi/SSB (pembangunan dan pengelolaannya dapat diserahkan kepada Koperasi, BUMN atau swasta yang bermitra).

- c. Fasilitas pendukung, terdiri dari kantor untuk administrator pelabuhan/PPI, kantor syahbandar, bea cukai, aparat keamanan, kantor manajemen unit, perumahan karyawan, gudang, warung, MCK Umum, tempat beribadah dan lain-lain (dibangun dan dibiayai oleh pemerintah).

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) merupakan tempat bertambat dan labuh perahu/ kapal perikanan, tempat pendaratan hasil perikanan dan merupakan lingkungan kerja ekonomi perikanan yang meliputi areal perairan dan daratan, dalam rangka memberikan pelayanan umum dan jasa untuk memperlancar kegiatan perahu/ kapal dan usaha perikanan. Lebih lanjut PPI merupakan salah satu prasarana ekonomi yang dibangun dengan maksud untuk menunjang tercapainya pembangunan perikanan terutama untuk perikanan skala kecil. Mengingat peranan PPI sangat strategis, maka pengelolaannya harus dilakukan secara profesional agar pembangunan tersebut dirasakan manfaatnya bagi masyarakat nelayan dan pada gilirannya akan dapat memberikan kontribusi berupa pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah daerah setempat. (Direktorat Jenderal Perikanan, 1996/1997).

2.7. Tempat Pelelangan Ikan

Berdasarkan pada uraian di atas terlihat bahwa TPI merupakan fasilitas dari suatu pelabuhan perikanan/PPI yang pembangunan dan pengelolaannya dapat dilaksanakan oleh Koperasi. Pengelola TPI di Provinsi Jawa Tengah adalah PUSKUD Mina Baruna. Dalam pelaksanaannya kewenangan PUSKUD diatur berdasarkan Perda No.10 tahun 2003.

Volume dan nilai produksi yang dilelang di suatu TPI akan mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh :

- a. Jumlah dan kualitas karyawan TPI. Jumlah dan kualitas karyawan TPI pada dasarnya disesuaikan dengan kebutuhan proses dan pelayanan lelang agar dapat berjalan lancar, sehingga ikan sampai di konsumen masih dalam kualitas yang baik. Oleh karenanya faktor yang menentukan banyaknya karyawan TPI adalah volume produksi ikan yang dilelang.
- b. Jumlah dan kapasitas bakul. Banyaknya bakul akan dipengaruhi oleh jumlah dan jenis komoditas ikan yang dilelang di suatu TPI. Apabila jenis ikan yang dilelang adalah komoditas ekspor dan dalam jumlah yang besar, maka bakul yang terlibat lelang adalah bakul dengan modal besar. Sebaliknya jika komoditas ikan yang dilelang konsumsi lokal dan jumlahnya sedikit, maka bakul yang terlibat akan terbatas dan modal kecil. Jumlah dan kapasitas bakul tersebut diharapkan akan mampu membentuk harga ikan yang optimal.

- c. Kelengkapan fasilitas penanganan hasil tangkapan selama proses lelang, seperti *handling space*, ketersediaan air bersih, fasilitas pendingin dan sebagainya. Kelengkapan fasilitas dari suatu TPI akan mampu mempertahankan mutu ikan, sehingga harga ikan akan dapat dipertahankan pada tingkat yang lebih tinggi. Hal ini akan merangsang nelayan untuk melelangkan hasil tangkapannya di TPI tersebut.

Menurut Perda Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2000, dalam pelaksanaannya PPI menarik retribusi sebesar 5 % yang berasal dari potongan sebesar 3 % dikenakan kepada nelayan dan 2 % dikenakan kepada bakul (pedagang). Adapun perincian pemanfaatan retribusi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan untuk Pemerintah Provinsi sebesar 0,90%
- b. Pendapatan untuk Pemda kabupaten/kota sebesar 0,95%
- c. Biaya Perawatan TPI sebesar 0,10%
- d. Biaya Administrasi Lelang (BAL) 0,85%
- e. Dana paceklik sebesar 0,50%
- f. Asuransi nelayan sebesar 0,20%
- g. Pengembangan PUSKUD sebesar 0,05%
- h. Tabungan nelayan sebesar 0,50%
- i. Tabungan bakul sebesar 0,25%
- j. Dana sosial / kecelakaan di laut sebesar 0,45%

TPI merupakan tempat pembongkaran hasil tangkapan yang diperoleh untuk selanjutnya mengalami proses sortasi, pencucian, penimbangan, penjualan

dan pengepakan. Setelah itu produk akan didistribusikan, sebagian untuk konsumsi lokal dalam bentuk ikan segar, sebagian untuk processing, ekspor maupun disalurkan ke tempat pembekuan untuk selanjutnya diawatkan

Berkaitan dengan fungsi TPI, maka Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Perda Nomor I/ tahun 1984 mengenai Petunjuk Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Jawa Tengah. Pada Perda tersebut antara lain disebutkan bahwa :

- a. Yang disebut dengan Tempat Pelelangan Ikan adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan ikan, disingkat TPI
- b. Penanggung jawab pelelangan ikan di TPI adalah Dinas Perikanan
- c. Pelaksanaan pelelangan ikan di TPI diserahkan kepada organisasi nelayan dalam bentuk koperasi

Maksud, tujuan dan manfaat TPI adalah sebagai berikut :

- a. Memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan lelang
- b. Mengusahakan stabilitas harga ikan
- c. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan beserta keluarganya
- d. Meningkatkan pendapatan asli daerah

2.7.1. Pelaksanaan Lelang Ikan di TPI

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tempat Pelelangan Ikan di Propinsi Daerah Tingkat

I Jawa Tengah, disebutkan bahwa pelaksanaan pelelangan ikan di TPI Propinsi Jawa Tengah dilakukan oleh Puskud Mina Baruna dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perikanan Propinsi Jawa Tengah. Dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut Puskud Mina Baruna menunjuk KUD Mina setempat sebagai pembantu pelaksanaan pelelangan ikan yang pengaturannya diserahkan kepada Puskud Mina Baruna dengan persetujuan Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. KUD Mina Baruna bertanggungjawab kepada PUSKUD Mina Baruna.

Pelaksanaan pelelangan ikan di TPI sehari-hari dipimpin oleh seorang kepala TPI, yang merupakan PegawaiNegeri Sipil dalam lingkungan Dinas Perikanan Propinsi Jawa Tengah yang dipekerjakan pada PUSKUD Mina Baruna yang secara operasional bertanggungjawab kepada PUSKUD Mina Baruna dan secara struktural bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

2.8. Implementasi PERDA NO 10. Tahun 2003

Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Provinsi Jawa Tengah berlandaskan atas Perda Nomor 10 tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan. Pada pasal 12 dijelaskan tarif retribusi TPI sebesar 5% (lima persen) dari nilai lelang, dengan perincian 3% dipungut dari nelayan dan 2% dipungut dari bakul. Pada pasal 28 dijelaskan penggunaan hasil pemungutan retribusi. Untuk memperoleh gambaran perkembangan / perubahan alokasi penggunaan hasil

pemungutan retribusi TPI. Terlihat bahwa perubahan alokasi dana hasil pungutan retribusi untuk masing-masing peruntukan tidak seimbang/ proporsional dengan besarnya perubahan retribusi. Sebagai contoh, dana BAL yang dikelola PUSKUD “Mina Baruna” perubahannya lebih besar dibanding perubahan retribusinya.

Pada saat Perda No. I Tahun 1984, pungutan retribusi sebesar 8 %, berubah menjadi 5% berdasarkan Perda No.10 tahun 2003 atau berkurang sebesar 37,5%. Seiring dengan itu, dana alokasi retribusi untuk biaya administrasi lelang (BAL) yang dikelola PUSKUD “Mina Baruna” berubah dari 1,75% menjadi 0,85%, atau berkurang sebesar 51,43%. Pada saat produksi ikan masih tinggi dan biaya operasional belum mengalami kenaikan, maka BAL sebesar 0,85 % masih mampu membiayai pelaksanaan pelelangan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 107 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No.10 Tahun 2003, Pasal 1 dijelaskan bahwa dana hasil pungutan retribusi lelang yang dialokasikan dan dikelola PUSKUD “Mina Baruna” sebesar 1,7%, yang terdiri atas :

- 1) 0,10 % biaya perawatan TPI
- 2) 0,85 % biaya administrasi lelang
- 3) 0,50 % dana paceklik nelayan
- 4) 0,20 % dana asuransi nelayan
- 5) 0,05 % dana pengembangan PUSKUD Mina baruna.

Dengan semakin kecilnya nilai jumlah dana yang diperoleh dari biaya administrasi lelang (BAL), dan naiknya biaya input, ternyata PUSKUD

tidak mampu membiayai kegiatan penyelenggaraan pelelangan ikan, sehingga mengalami defisit.

2.9. Penelitian Terdahulu

Utomo pada tahun 1991 mengadakan penelitian mengenai Peranan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam stabilitas dan Pembentukan Harga Ikan Laut Tangkapan Nelayan di Kotamadya Manado dan Bitung. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa saluran pemasaran ikan kotamadya Manado dan Bitung ada 2 model/cara dimana masing-masing model/cara mempunyai kelebihan dan kekurangan. Model/cara 1 salurannya lebih panjang, ini selanjutnya akan mempengaruhi harga ikan yang biasanya konsumennya lebih tinggi. Provitabilitas usaha tengkulak desa dan grosir baik di Manado dan Bitung memang ada perbedaan namun tidak terlalu tinggi. Dari perbedaan yang tidak terlalu tinggi, maka kita dapat mengatakan harga ikan di Manado dan Bitung agak stabil.

Mahyuddin pada tahun 2001 menganalisis peranan TPI sebagai tempat untuk menjual hasil tangkapan nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu. Sebagai tempat pelelangan ikan yang mempertemukan antara penjual dan pembeli, TPI merupakan salah satu mata rantai dalam tata niaga ikan. Dari hasil penelitian di dapat bahwa kondisi manajemen KUD belum baik, SDM pengurus masih rendah tingkat pendidikannya dan kurang luas pengetahuan dan pengalamannya, sikap dan perilaku pengurus yang kurang disenangi anggotanya, modal KUD yang belum memadai sehingga mengakibatkan KUD tidak mengakar dalam alam nelayan setempat, untuk selanjutnya pelelangan ikan tidak dapat

dijalankan yang mengakibatkan nilai jual yang seharusnya besar, namun hasil yang didapatkan kecil. Dengan alat analisis Indeks Relatif Nilai Produksi (I) diperoleh angka 1,27, dengan rata-rata peningkatannya sebesar 8,2 % pertahun. Ini berarti kualitas pemasaran ikan di PPN Pelabuhanratu baik.

Penelitian pada tahun 1 (2004) yang dilakukan Susilowati, dkk didapatkan suatu indikasi bahwa tingkat keberdayaan responden pengolah ikan di daerah nelayan masih jauh dari berdaya. Studi ini memakai kriteria pengukuran seperti yang dipakai Uphoff (2003) dan Suryana (2003) dengan pendekatan yang dipakai oleh Harry (2001), Zyl dan Kirsten (1997), Hongskul (2000) dengan modifikasi seperlunya. Dari dua daerah penelitian yang berbeda skala usahanya (Kabupaten Pekalongan untuk responden berskala mikro/kecil, dan Kota Pekalongan untuk responden berskala menengah) ternyata mempunyai tingkat keberdayaan yang berbeda. Responden pengolah ikan yang berskala menengah ternyata mempunyai tingkat keberdayaan yang lebih baik dibanding dengan responden yang berskala mikro/kecil.

Suyanto pada tahun 2003 melakukan penelitian di berbagai desa pantai di Propinsi Jawa Timur, dimana komunitas desa pantai, khususnya nelayan tradisional pada dasarnya adalah kelompok masyarakat yang kehidupannya sangat tergantung pada hasil laut. Dari hasil penelitian yang dilakukan, kehidupan nelayan tradisional sangat jauh berbeda dengan juragan kapal atau nelayan modern. Para nelayan tradisional seringkali hidup serba pas-pasan (28,5%), relatif kekurangan (17,5%) atau bahkan sangat kekurangan (16%).

Berdasarkan kajian eksistensi pelelangan ikan, dari aspek ekonomi kelihatannya dengan proses pelelangan ikan, maka nelayan dapat dapat diuntungkan dengan adanya harga jual ikan standart. Selain itu pembeli memperoleh keuntungan karena harga beli ikan yang cukup wajar. Sedangkan pemerintah daerah mendapat keuntungan berupa PAD. Kemudian masyarakat secara tidak langsung akan merasakan denyut perekonomian karena adanya aktivitas pelelangan ini.

Kajian efisiensi dan kinerja TPI dilakukan oleh Diah (2006), Sudaryanto (2003) dan Risharyanto (2006). Para peneliti ini mendapatkan bahwa beberapa TPI mengalami ketidakefisienan dalam kinerjanya.

Penelitian yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Tengah bekerja sama dengan Dewan Riset Daerah Jawa Tengah di TPI dan KUD di Jawa Tengah juga menemukan hal yang serupa, bahwa banyak TPI yang tidak efisien dan beberapa KUD nyaris bangkrut. Secara ringkas hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat dilihat dalam Tabel 2.2 berikut

Tabel 2.2
Hasil Penelitian Yang Sudah Pernah Dilakukan

Peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan
Samuel Pamarto Utomo (1991), Laporan Penelitian Fakultas Perikanan dan kelautan Unsrat Manado Sulawesi Utara	Peranan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam stabilitas dan Pembentukan Harga Ikan Laut Tangkapan Nelayan di Kotamadya Manado dan Bitung	1. Model atau saluran pemasaran yang lebih panjang, akan mempengaruhi harga ikan yang biasanya konsumennya lebih tinggi. 2. Dari perbedaan yang tidak terlalu tinggi, disimpulkan harga ikan di Manado dan

Peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan
		Bitung agak stabil.
Bustani Mahyuddin (2001) Laporan Penelitian	Peranan Pelelangan Ikan Dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan	1. Lokasi penelitian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu. 2. KUD belum berfungsi secara optimal
R.Nugroho Purwantoro (2004)	Efektivitas Kinerja Pelabuhan Dengan Data Envelopment Analysis (DEA)	1. Dari 24 pelabuhan ada 8 pelabuhan yang relatif tidak menghasilkan output secara efektif
Budi Sudaryanto (2003) <i>Jurnal Binis dan Ekonomi Volume 13 No 1 Maret 2003</i>	Analisis Efisiensi Tempat Pelelangan Ikan	Kinerja pengelolaan dari 11 TPI di Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang dan Kota Tegal menunjukkan seluruhnya belum efisien.
Bagong Suyanto (2003)	Pemberdayaan Nelayan Tradisional	Kehidupan nelayan tradisional sangat jauh berbeda dengan juragan kapal atau nelayan modern. Para nelayan tradisional seringkali hidup serba pas-pasan (28,5%), relatif kekurangan (17,5%) atau bahkan sangat kekurangan (16%).
Indah Susilowati,dkk (2005)	Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi-UMKMK) dalam mendukung Ketahanan Pangan di Kabupaten/ Kota Pekalongan, Jawa Tengah (2005)	1. Tingkat keberdayaan Kabupaten Pekalongan dan , dan Kota Pekalongan berbeda. 2. Responden pengolah ikan yang berskala menengah ternyata mempunyai tingkat keberdayaan yang lebih baik dibanding dengan responden yang berskala mikro/kecil.
Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Tengah dan Dewan	Kajian Strategis Analisis Kinerja Efisiensi TPI di Jawa Tengah	1. Terjadi penurunan produksi dan nilai produksi diakibatkan

Peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan
Riset Daerah Jawa Tengah (2006)		<p>oleh penurunan stok ikan di alam dan penurunan upaya penangkapan, juga ditemukan bahwa banyak data produksi dan nilai produksi yang tidak dilaporkan (<i>un-reported</i>).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kondisi sarana dan prasarana sebagian besar PP/PPI kurang menunjang proses pendaratan kapal/perahu penangkap ikan, yang pada akhirnya mempengaruhi minat nelayan untuk mendaratkan dan melelang ikan di TPI. 3. Hasil analisis efisiensi menunjukkan bahwa pada setiap kelas tercermin sebagian TPI memiliki efisiensi yang lebih baik dibandingkan dengan TPI yang lainnya. 4. Kinerja KUD Mina masih rendah.
Sulistiyani Dyah P(2006)	Analisis Efisiensi TPI kelas 1,2,3 di Jawa Tengah dan pengembangannya Untuk Peningkatan Kesejahteraan Karyawan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 9 (sembilan) TPI telah mencapai skor yang efisien, hanya TPI PPSC yang belum efisien.
Eva Meilan (2006)	Analisis Tingkat Keberdayaan Nelayan dan Pengolah Ikan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, untuk Meningkatkan Pendapatan	Hasil identifikasi terhadap tingkat keberdayaan nelayan dan pengolah ikan adalah sebagian besar usaha mereka masih kurang berdaya, dilihat dari kemampuan akses mereka terhadap aspek ekonomi dan non ekonomi.
A Budi Risharyanto (2006)	Efisiensi dan Peningkatan Kinerja Tempat Pelelangan Ikan (Studi Kasus di	11 TPI yang diamati, ada 5 TPI yang efisien dan 6 TPI yang belum efisien.

Peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan
	Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang dan Kota Tegal (Jawa Tengah)	

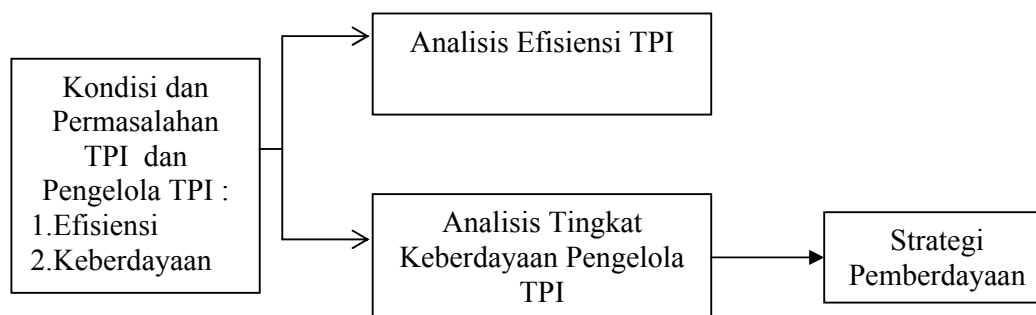
2.10. Kerangka Pemikiran Teoritis

Tingkat produksi yang tinggi akan dicapai apabila faktor produksi dialokasikan secara efisien. Studi empiris menunjukkan permasalahan yang dihadapi TPI di Jawa Tengah adalah adanya inefisiensi di beberapa TPI. Selain itu, masalah ketidakberdayaan nelayan juga ditemukan di beberapa wilayah di Pantura (Susilowati,2004).

Untuk meningkatkan efisiensi TPI dan tingkat keberdayaan pengelola TPI perlu dilakukan analisis untuk menentukan strategi pemberdayaan yang tepat.

Dari uraian tersebut, maka kerangka pemikiran yang dibangun dalam penelitian ini adalah :

Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran Teoritis



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

3.1.1. Populasi

Populasi berarti keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang ingin diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan TPI dan KUD dan TPI di Pantura Barat Jawa Tengah. Berdasarkan Data dari PUSKUD Mina Baruna Jawa Tengah, jumlah TPI di Jawa Tengah adalah 69 buah. Jumlah KUD Mina di Jawa Tengah sebanyak 22 KUD Mina.

Lokasi penelitian adalah di 11 TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kelas 1,2,4a di Kabupaten/Kota di pantura Jawa Tengah Bagian Barat. Pemilihan lokasi /daerah penelitian ini didasarkan pertimbangan bahwa di pantai Utara bagian Barat, yaitu Pemalang, Tegal ini didominasi oleh nelayan kecil yang masih menggunakan peralatan tradisional dalam menangkap ikan. Oleh karenanya, produksi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di daerah ini rendah, selain itu pengelolaan TPI di wilayah ini masih seadanya (Sudaryanto, 2005).

3.1.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasinya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Multistages Sampling*, dengan tahapan sebagai berikut :

Tahap 1, menentukan lokasi penelitian, yaitu. Kabupaten /Kota di Pantura bagian Barat di Jawa Tengah. Daerah yang dipilih adalah Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang adalah berdasarkan pertimbangan bahwa di daerah ini terdapat TPI dari TPI Kelas I, II dan IV a yang masuk dalam wilayah BPPI Wilayah Pekalongan dan dapat mewakili kondisi TPI di Pantai Utara Jawa Tengah. Bagian Barat

Tahap 2, Menentukan jumlah sampel. Sampel yang akan diambil adalah TPI dan pengelola/ karyawan di TPI dan KUD sebagai berikut :

Sampel yang digunakan untuk pengukuran efisiensi TPI adalah TPI di daerah penelitian yang dibedakan dalam tiga kelas TPI, yaitu TPI kelas I, Kelas II dan kelas IV a. Penentuan Kelas TPI adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah No 52321/190/SK/II/2008, tertanggal 21 Februari 2008, yaitu :

- a. TPI Kelas I adalah TPI dengan nilai raman lebih dari 50 milyar
- b. TPI Kelas II adalah TPI dengan nilai raman antara 25-50 milyar
- c. TPI Kelas III adalah TPI dengan nilai raman antara 10-25 milyar
- d. TPI Kelas IV a adalah TPI dengan nilai raman antara 1-10 milyar
- e. TPI Kelas IV b adalah TPI dengan nilai raman antara 100 juta -1 milyar
- f. TPI Kelas V adalah TPI dengan nilai raman dibawah 100 juta

Tempat Pelelangan Ikan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 3.1

Tabel 3.1
Tempat Pelelangan Ikan Sampel Berdasarkan Kelas

No	Nama TPI	Kabupaten/Kota	Kelas TPI
1	TPI PPNP	Kota Pekalongan	Kelas I
2	TPI Pelabuhan	Kota Tegal	Kelas I
3	TPI Tanjungsari,	Kabupaten Pemalang	Kelas II
4	TPI Klidang Lor	Kabupaten Batang	Kelas II
5	TPI Mojo	Kabupaten Pemalang	Kelas IV
6	TPI Asemdayong	Kabupaten Pemalang	Kelas IV
7	TPI Ketapang	Kabupaten Pemalang	Kelas IV
8	TPI Tegalsari	Kota Tegal	Kelas IV
9	TPI Wonokerto	Kabupaten Pekalongan	Kelas IV
105	TPI Surodadi,	Kabupaten Tegal	Kelas IV
11	TPI Muararaja	Kota Tegal	Kelas IV

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah, 2008

Sesuai dengan Perda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tempat Pelelangan Ikan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan penjelasannya, untuk TPI Kelas III, jumlah pengelolanya sebanyak 8 orang, sedangkan untuk TPI Kelas II pengelolanya sebanyak 12 orang. TPI kelas IV jumlah pengelolanya sebanyak 5 orang. TPI Kelas I jumlah pengelolanya sebanyak 27 orang. Pengurus KUD rata-rata 5 orang. Sebaran sampel Pengurus KUD dapat dilihat dalam Tabel 3.2

Tabel 3.2
Distribusi Sampel Pengelola TPI

No	Kabupaten/Kota	Jumlah TPI	Sampel(Orang)
TEMPAT PELELANGAN IKAN			
1	Kota Pekalongan	1	5
2	Kabupaten Pekalongan	1	5
3	Kabupaten Tegal	1	5
4	Kota Tegal	3	15
5	Kabupaten Pemalang	4	20
6	Kabupaten Batang	1	5
KUD			
1	Kota Pekalongan	2	10
3	Kabupaten Batang	1	5
4	Kota Tegal	2	10
5	Kabupaten Pemalang	2	10
	Jumlah Sampel		90

Sampel untuk analisis tingkat keberdayaan sebanyak 90 orang yang merupakan pengelola TPI dan pengurus KUD. Untuk pengelola TPI Kelas I dan Kelas II yang dijadikan sampel adalah Ketua TPI, Bendaharawan, Kepala Urusan Tata Usaha, Juru Administrasi Umum, Kepala Urusan Teknik Lelang.. Sampel untuk TPI Kelas IV adalah Kepala TPI, Bendahara Khusus Penerima TPI, Juru Timbang/lelang, Kasir, Juru Administrasi Umum. Sampel untuk pengurus KUD adalah Manajer KUD, Wakil Manajer, Bendahara, Sekretaris dan Kepala Tata Usaha.

Untuk menentukan strategi pemberdayaan, yang dijadikan sampel adalah *key person* yang berkaitan dengan pengelolaan TPI, yaitu Kepala TPI, dan Ketua KUD, yaitu sebanyak 20 orang. :

3.2. Jenis dan Metode Pengumpulan Data

3.2.1. Jenis Data

Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan sekunder. Data Primer dalam penelitian ini adalah data responden dari kuesioner untuk mengetahui tingkat keberdayaan dan untuk menentukan strategi pemberdayaannya. Data Primer yang terkait dengan analisis keberdayaan, meliputi data yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok organisasi yang dijalankan responden, tanggapan responden terhadap kemampuan melakukan lobi dalam pengambilan keputusan untuk organisasi, potensi yang merupakan kekuatan dari organisasi (TPI/KUD), kelemahan, ancaman yang dihadapi organisasi, peluang yang dapat dikembangkan dari organisasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari Dinas Perikanan dan Kelautan, Biro Pusat Statistik dan Puskud Mina Baruna dan di TPI. Data ini meliputi :

- Data tingkat raman untuk masing-masing TPI
- Data fisik masing-masing TPI (panjang pangkalan pendaratan, luas TPI)
- Data personalia TPI dan KUD
- Data jumlah nelayan,

- Data jumlah kapal bongkar ,
- Data jumlah alat tangkap
- Data jumlah timbangan
- Jumlah bakul
- Data Jumlah basket

3.2.2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dalam dua cara, yaitu survei instansional, wawancara dan diskusi, dan pengamatan lapangan. Survei instansional dilakukan untuk memperoleh data sekunder, baik data numerik maupun kebijakan serta peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan TPI.

a. Wawancara

Dilakukan dengan mewancarai responden dengan menggunakan daftar pertanyaan dan melakukan wawancara secara mendalam kepada responden seperti : pihak pengelola TPI, pengurus KUD, dan *key person* (Ketua, Pengurus, dan Manajer PUSKUD) yang berkompeten dengan permasalahan kajian ini.

b. Observasi

Dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran kondisi TPI.

3.3. Teknik Analisis Data

3.3.1. Analisis Efisiensi TPI

Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis tingkat efisiensi Pengelolaan TPI adalah dengan menggunakan pendekatan non parametrik DEA, yang pada dasarnya merupakan teknik berbasis linier programming. Konsep DEA adalah untuk mengukur skor efisiensi relatif Unit Kegiatan Ekonomi (UKE) yang menggunakan banyak input dan UKE yang lain dalam sampel yang menggunakan jenis input dan output yang sama. Dalam DEA, efisiensi relatif UKE didefinisikan sebagai rasio total output tertimbang dibagi dengan total input tertimbang (*weighted output/weighted input*) (Syakir,2005).

Efisiensi yang diukur oleh analisis DEA memiliki karakter berbeda dengan konsep efisiensi pada umumnya. Pertama, efisiensi yang diukur adalah bersifat teknis, bukan ekonomis. Artinya, analisis DEA hanya memperhitungkan nilai absolut dari suatu variabel. Satuan dasar pengukuran yang mencerminkan nilai ekonomis dari tiap-tiap variabel seperti harga, berat, panjang, isi dan lainnya tidak dipertimbangkan. Oleh karenanya dimungkinkan suatu pola perhitungan kombinasi berbagai variabel dengan satuan yang berbeda-beda. Kedua, nilai efisiensi yang dihasilkan bersifat relatif atau hanya berlaku dalam lingkup sekumpulan Unit Kegiatan Ekonomi yang diperbandingkan tersebut (Nugroho,1995)

Maksimasi=

$$h_s = \frac{\sum_{r=1}^m u_{rk} Y_{rk}}{\sum_{i=1}^n v_{rk} X_{rk}}$$

Dimana :

- h_s : adalah efisiensi teknis obyek s
- m : adalah output obyek yang diamati
- n : adalah input obyek yang diamati
- Y_{rk} : adalah jumlah output r yang diproduksi oleh obyek k
- X_{rk} : adalah jumlah input r yang digunakan oleh obyek k
- u_{rk} : merupakan bobot output r yang dihasilkan oleh obyek k
- v_{rk} : adalah bobot input r yang diberikan oleh obyek k, dan r dihitung dari 1 ke m serta i dihitung dari 1 ke n

Persamaan di atas menunjukkan adanya penggunaan suatu variabel input dan satu output. Rasio efisiensi (h_s), kemudian dimaksimalkan dengan kendala seperti berikut ;

$$\frac{\sum_{r=1}^m u_{rj} Y_{rj}}{\sum_{i=1}^n v_{ik} X_{ij}} \leq 1; j = 1, \dots, n$$

Kriteria non negatif,

$$u_{rk} \geq 0; r = 1, \dots, m$$

$$v_{rk} \geq 0; i = 1, \dots, n$$

Dimana n , menunjukkan jumlah obyek dalam sampel. Pertidaksamaan pertama menunjukkan adanya efisiensi rasio untuk UKE lain tidak lebih dari 1, sementara persamaan kedua berbobot positif. Angka rasio akan bervariasi antara 0 sampai dengan 1. Obyek dikatakan efisien apabila memiliki angka rasio mendekati 100

%, sebaliknya jika mendekati 0 menunjukkan efisiensi obyek yang semakin rendah. Beberapa bagian program linier ditransformasikan ke dalam program *ordinary linier* secara primal sebagai berikut :

Fungsi tujuan (DEA)

Maksimumkan

$$h_k = \sum_{r=1}^m u_{rk} Y_{rk}$$

Fungsi Batasan

$$\left[p_{kj} \sum_{r=1}^s u_{rk} Y_{rk} - \sum_{i=1}^m v_{ik} X_{ijk} \leq 0 \quad ; j=1, \dots, n \right]$$

$$\left[q_{kj} \sum_{i=1}^m v_{ik} X_{ijk} = 1 \text{ dimana } u_{rk} \text{ dan } v_{rk} \geq 0 \right]$$

Efisiensi pada masing-masing input dihitung menggunakan programasi linier dengan memaksimumkan jumlah output yang dibobot dari obyek k . Kendala jumlah input yang dibobot harus sama dengan satu untuk obyek k , sedangkan kendala untuk semua obyek, yaitu jumlah output yang dibobot dikurangi jumlah input yang dibobot harus kurang atau sama dengan 0. Hal ini berarti bahwa semua obyek akan berada atau di bawah referensi kinerja *frontier* yang merupakan garis lurus yang memotong sumbu *origin*. Dalam DEA, efisiensi dinyatakan dalam rasio antara total input tertimbang. Dimana setiap UKE diasumsikan bebas menentukan bobot untuk setiap variabel input maupun variabel output yang ada, asalkan mampu memenuhi dua kondisi yang diisyaratkan. (Silkman dalam Nugroho, 1995) :

(a) Bobot tidak boleh negatif

- (b) Bobot harus bersifat universal atau tidak menghasilkan indikator efisiensi yang di atas normal atau lebih besar dari nilai 1, bilamana dipakai UKE yang lainnya. Tiap UKE cenderung memiliki pola untuk menetapkan bobot tinggi pada input yang sedikit digunakan, dan pada output yang banyak dihasilkan. Dimana bobot bobot yang dipilih tersebut tidak semata-mata menggambarkan suatu nilai ekonomi, tetapi lebih merupakan suatu kuantitatif rencana untuk memaksimalkan efisiensi UKE bersangkutan. Suatu UKE dikatakan efisien secara relatif, bilamana nilai dualnya sama dengan 1 (nilai efisiensi=100%). Sebaliknya, bila nilai dualnya kurang dari 1, maka UKE bersangkutan dianggap tidak efisien secara relatif. (Silkman dalam Nugroho, 1995)

Tabel 3.3
Input-Output Efisiensi Tempat Pelelangan Ikan

No	Atribut	Variabel Model	Satuan	Kategori
1	Panjang Pangkalan Pendaratan	input	M	Infrastruktur
2	Luas Lantai lelang	input	M ²	Infrastruktur
3	Jumlah Kapal Bongkar	input	Unit/hari	Sarana
4	Jumlah Alat Tangkap	input	Unit	Sarana
5	Jumlah Kapal	input	Unit	Sarana
6	Jumlah Personalia TPI	input	Orang	SDM
7	Jumlah Juru lelang	input	Orang	SDM
8	Jumlah Nelayan	input	Orang	SDM
9	Jumlah Juru Bongkar	input	Orang	SDM
10	Jumlah Bakul	input	Orang	SDM
11	Jumlah Basket	input	Unit	Peralatan
12	Jumlah Timbangan	input	Unit	Peralatan
13	Jumlah Gerobak	input	Unit	Peralatan
14	Nilai Raman	output	Rupiah	
15	Share Omzet TPI terhadap Total TPI Jawa Tengah	output	%	

Sumber : Hasil Diskusi bersama Kelompok Hibah Pasca 2007

Definisi Operasional Input Yang Digunakan Dalam DEA :

1. Panjang Pangkalan Pendaratan adalah panjang pangkalan yang diukur dalam satuan meter pada tahun 2007.
2. Luas lantai lelang adalah ukuran lantai lelang di TPI yang dinyatakan dalam m² pada tahun 2007.
3. Jumlah kapal bongkar adalah jumlah kapal yang membongkar hasil tangkapan di TPI / hari, pada tahun 2007, dalam satuan unit
4. Jumlah alat tangkap adalah jumlah alat tangkap yang digunakan dalam melakukan pencarian ikan di laut, di masing-masing TPI dalam satuan unit pada tahun 2007
5. Jumlah kapal adalah jumlah kapal di wilayah TPI dalam satuan unit pada tahun 2007
6. Personalia TPI adalah jumlah pengurus TPI pada tahun 2007, dalam satuan orang
7. Jumlah juru lelang adalah jumlah orang yang melakukan lelang untuk masing-masing TPI pada tahun 2007
8. Jumlah nelayan adalah nelayan yang biasa melakukan aktivitas lelang di masing-masing TPI, dimana nelayan ini merupakan total semua nelayan yang kapalnya melakukan lelang, yang terdiri dari juragan (pemilik kapal), buruh nelayan pada tahun 2007.
9. Jumlah Juru Bongkar adalah orang yang melakukan bongkar muatan dari kapal nelayan (bukan ABK) pada tahun 2007

10. Jumlah Bakul adalah bakul yang melakukan aktivitas pelelangan di masing-masing TPI pada tahun 2007
11. Jumlah basket adalah banyaknya basket (keranjang) yang digunakan untuk proses pelelangan di masing-masing TPI pada tahun 2007
12. Jumlah gerobak adalah banyaknya gerobak yang dimiliki masing-masing TPI pada tahun 2007
13. Jumlah timbangan adalah banyaknya timbangan yang dimiliki masing-masing TPI pada tahun 2007
14. Nilai raman adalah hasil produksi kotor dikalikan dengan harga di masing-masing TPI yang dinyatakan dalam rupiah pada tahun 2007
15. *Share* Omzet TPI dibandingkan dengan Omzet (Raman) Propinsi adalah perbandingan antara raman (omzet) masing-masing TPI dibandingkan dengan total raman seluruh TPI se Jawa Tengah, dinyatakan dalam persen

3.3.3.1. Prosedur Pengukuran efisiensi dengan DEA

Prosedur analisis DEA dengan menggunakan bantuan *Banxia Frontier Analysis* adalah dengan melihat skor efisiensi dari masing-masing UKE (Unit Kegiatan Ekonomi) dalam hal ini adalah TPI. Bila skornya sama dengan 100 %,maka TPI dikatakan efisien, apabila skornya kurang dari 100 % maka TPI tersebut belum efisien. Agar TPI menjadi efisien maka perlu mengubah input-output yang ada sesuai dengan nilai *potensial improvement* yang dihasilkan oleh perhitungan DEA sesuai dengan referensi TPI yang telah mencapai efisien.

Analisis Tingkat Keberdayaan

Variabel penelitian dan definisi operasional dalam penelitian untuk mengetahui tingkat keberdayaan adalah sebagai berikut

Tabel 3.4
Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
Tingkat Keberdayaan Pengelola TPI dan Pengurus KUD	Dapat dilihat dari : Akses Terhadap Kekuatan Ekonomi: Dilihat dari Kemampuan pengelola meningkatkan fungsi TPI sebagai lembaga yang mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan, memperlancar lelang, menstabilkan harga dan meningkatkan Pendapatan Daerah	Jika kurang dari 50 % dari total responden menjawab telah melakukan sesuai dengan fungsi organisasi dalam mengelola TPI dan KUD maka tingkat keberdayaan rendah
	Akses terhadap kekuatan Sosial Budaya: Bagaimana keberdayaan responden dalam menembus atau mengikuti dinamika tatanan sosial budaya yang ada - Apakah keputusan dalam berusaha, berorganisasi berdasarkan pertimbangan keluarga	Indikator : Jika kurang dari 50 % dari total responden menjawab telah keputusan berorganisasi berdasarkan pertimbangan keluarga, maka tingkat keberdayaan rendah, dan sebaliknya.
	Akses Terhadap Kekuatan Non Ekonomi a) Bagaimana keberdayaan responden untuk lobi	Indikator : ▪ Punya atau tidaknya responden atas akses

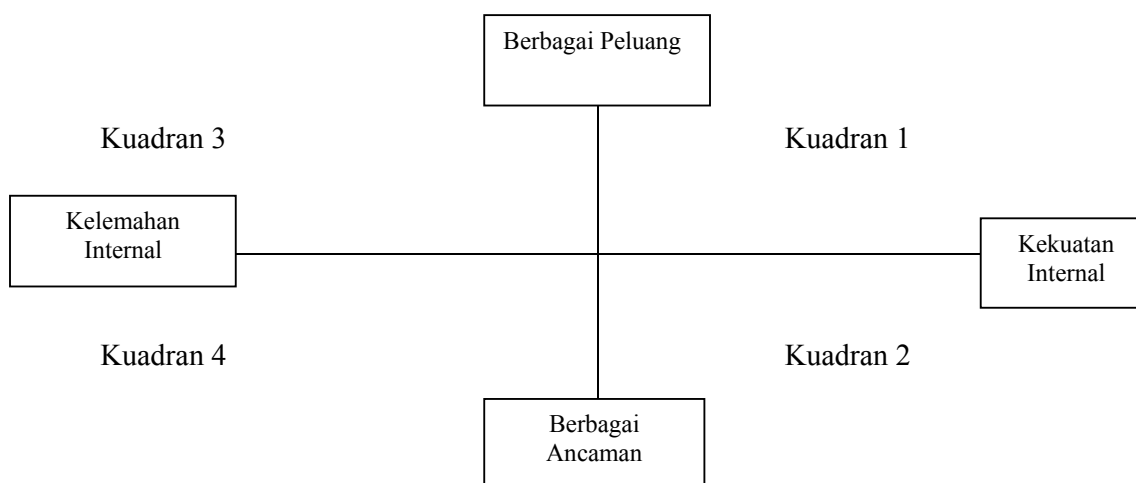
Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
	<p>dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan TPI</p> <p>Lobi : melakukan pendekatan kepada pihak-pihak tertentu, sesuai tujuan yang ingin dicapai. Pihak tertentu : orang perorang , lembaga.</p>	<p>dengan seseorang atau kenalan dengan stakeholders</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pernah minta tolong atau tidak dengan stakeholder. Bila pernah, responden dianggap sudah melakukan lobi ▪ Bila permintaan bisa berhasil, maka dapat dipakai sebagai indikasi bahwa intensitas lobinya semakin intens

(Sumber :Susilowati dkk, 2004, disesuaikan untuk penelitian ini)

3.3.2. Analisis Strategi Pemberdayaan

Strategi pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT, dimana identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi pemberdayaan yang akan ditetapkan.

Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) dengan Faktor Internal Kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weaknesses*)



- Kuadran 1 : Ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Peluang dan kekuatan yang dimiliki besar, sehingga strategi yang diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung pertumbuhan yang agresif.
- Kuadran 2 : Meskipun menghadapi berbagai ancaman, masih ada kekuatan dari sisi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi (produk/pasar)
- Kuadran 3 : Peluang pasar sangat besar, tetapi di lain pihak ada beberapa kendala atau kelemahan internal. Fokus strateginya adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik.
- Kuadran 4 : Ini merupakan situasi yang tidak menguntungkan, terdapat berbagai ancaman dan kelemahan internal.

3.3.3.1. Tahapan Perencanaan Strategis

Proses penyusunan perencanaan strategis melalui tiga tahap analisis, yaitu :

1. Tahap Pengumpulan Data
2. Tahap Analisis
3. Tahap Pengambilan Keputusan

1. Tahap Pengumpulan Data

Tahap ini pada dasarnya tidak hanya sekedar kegiatan pengumpulan data, tetapi juga merupakan suatu kegiatan pengklasifikasian dan pra analisis. Pada tahap ini data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data eksternal dan data internal. Data Eksternal adalah data yang diperoleh dari luar lingkungan TPI dan KUD, seperti :

- Analisis Pasar
- Analisis Kompetitor
- Analisis Pemasok (Nelayan)
- Analisis Pemerintah
- Analisis Kelompok kepentingan tertentu

Model yang dipakai pada tahap ini terdiri dari tiga, yaitu :

- a. Matrik Faktor Strategi Eksternal
- b. Matrik Faktor Strategi Internal
- c. Matrik Profil Kompetitif

a. Matrik Faktor Strategi Eksternal

Matrik EFE digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor eksternal perusahaan. Data eksternal dikumpulkan untuk menganalisis hal-hal menyangkut persoalan ekonomi, sosial, budaya demografi, lingkungan, politik, pemerintahan, hukum, teknologi, persaingan di pasar industri, dimana perusahaan berada, serta data eksternal relevan lainnya. Hal ini penting karena faktor eksternal berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap TPI (Tempat Pelelangan Ikan).

Tahapan :

- 1) Menyusun daftar *critical succes factors* (faktor-faktor utama yang mempunyai dampak penting pada kesuksesan atau kegagalan usaha) untuk aspek eksternal yang mencakup perihal *opportunities* (peluang) dan *threats* (ancaman) bagi perusahaan.
- 2) Memberi bobot dari *critical succes factors* tadi dengan skala yang lebih tinggi bagi yang berpretasi tinggi dan begitu pula sebaliknya. Jumlah seluruh bobot harus sebesar 1,0. Nilai bobot dicari dan dihitung berdasarkan rata-rata industrinya.
- 3) Menghitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (*outstanding*) sampai dengan 1 (*poor*) berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap TPI dan KUD Mina. Pemberian nilai rating untuk faktor peluang bersifat positif (peluang yang semakin besar, diberi rating +4, tetapi jika peluangnya kecil diberi rating +1). Pemberian nilai rating ancaman adalah kebalikannya. Misalkan ancaman sangat besar, ratingnya adalah 1, sebaliknya jika nilai ancamannya sedikit, nilai ratingnya 4

1 = di bawah rata-rata,
2 = rata-rata,
3 = di atas rata-rata,
4 = sangat bagus
- 4) Mengalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom3, untuk memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor

pembobotan untuk masing-masing faktor faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 (*outstanding*) sampai dengan 1,0 (*poor*)

- 5) Menggunakan kolom 5 untuk memberikan komentar atau catatan mengapa faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotannya dihitung
- 6) Menjumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor pembobotan bagi TPI dan KUD yang bersangkutan Nilai total ini menunjukkan bagaimana TPI/KUD tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategis eksternalnya. Total Skor ini dapat digunakan untuk membandingkan TPI ini dengan TPI lainnya, pada kelas yang sama.

Tabel 3.5
Matriks *External Factor Evaluation (EFE)*
Tempat Pelelangan Ikan

Faktor-faktor Strategi Eksternal	Bobot	Rating	Bobot x Rating	Komentar
Peluang : <ul style="list-style-type: none"> • Potensi perikanan masih tinggi • Kebijakan Pemerintah Yang Mendukung • Pembangunan perikanan merupakan Pendukung Ketahanan Pangan • Meningkatnya Konsumsi Ikan • Bertambah baiknya infrastruktur 				
Ancaman <ul style="list-style-type: none"> • Rusaknya SDA dan Lingkungan Pesisir • Iklim dan Cuaca Yang Buruk karena Pemanasan Global • Munculnya Pasar Ikan di sekitar TPI (Pesaing) • Masuknya Pemodal Besar yang melakukan transaksi di laut • Tercemarnya laut yang berdampak pada mutu perikanan laut yang buruk. 				
Total	1,0			

b. Matriks *Internal Factor Evaluation (IFE)*

Matriks IFE digunakan untuk mengetahui faktor-faktor internal perusahaan berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dianggap penting. Data dan informasi aspek internal TPI dapat diperoleh dari beberapa fungsional TPI, misalnya dari aspek manajemen, keuangan, Sumber Daya Manusia.

Tahapan

Setelah faktor-faktor strategis internal diidentifikasi, suatu tabel IFE (*Internal Factor Evaluation*) disusun untuk merumuskan faktor-faktor strategis internal tersebut dalam kerangka *Strength and Weakness*. Tahapnya adalah :

- 1) Menentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan serta kelemahan perusahaan dalam kolom 1
- 2) Memberi bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 1,0 (paling penting) sampai 0,0 (tidak penting), berdasarkan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap posisi strategis TPI dan KUD. (Semua bobot tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi skor total 1,0)
- 3) Menghitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (*outstanding*) sampai dengan 1 (*poor*), berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi TPI dan KUD. Variabel yang bersifat positif (semua variabel yang masuk kategori kekuatan) diberi nilai mulai dari +1 sampai dengan +4 (sangat bagus) dengan membandingkannya dengan rata-rata TPI atau pesaing utama (bisa

pasar ikan). Sedangkan variabel yang bersifat negatif, kebalikannya. Contohnya, jika kelemahan TPI /KUD besar sekali dibandingkan dengan rata-rata TPI yang ada di wilayah tersebut, nilainya adalah 1, sedangkan jika kelemahan TPI/KUD dibawah rata-rata TPI/KUD, nilainya adalah 4.

1 = di bawah rata-rata,

2 = rata-rata,

3 = di atas rata-rata,

4 = sangat bagus

Jadi rating mengacu pada kondisi TPI yang bersangkutan, sedangkan bobot mengacu pada seluruh TPI pada daerah penelitian.

Tabel 3.6
Matriks *Internal Factor Evaluation (IFE)*
Tempat Pelelangan Ikan

Faktor-faktor Strategi Internal	Bobot	Rating	Bobot x Rating	Komentar
Kekuatan <ul style="list-style-type: none"> • Pengalaman Kepala TPI/ Manajer KUD • Hubungan Yang baik dengan SDM yang ada • Memiliki Orientasi yang luas • Integrasi Vertikal /lobi dengan Stakeholder • Budaya dan kualitas organisasi dalam memahami visi dan misi 				
Kelemahan <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan /Proses Pelelangan Ikan • Dukungan/Kondisi Keuangan TPI/KUD • Fasilitas Infrastruktur • Kualitas SDM yang rendah • Lemahnya koordinasi antar karyawan 				

• Kurang dipahaminya tugas pokok organisasi				
Total	1,0			

- 4) Mengalikan bobot pada kolom 2, dengan rating pada kolom3, untuk memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4 (*outstanding*) sampai dengan 1 (*poor*).
- 5) Menggunakan kolom 5 untuk memberikan komentar, mengapa faktor-faktor tertentu dipilih, dan bagaimana pembobotannya dihitung.
- 6) Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor pembobotan bagi TPI/KUD yang bersangkutan. Nilai total ini menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategis internalnya. Skor total ini dapat digunakan untuk membandingkan TPI/KUD ini dengan TPI/KUD yang lain dalam wilayah penelitian

2. Tahap Analisis

Setelah mengumpulkan semua informasi yang berpengaruh terhadap kelangsungan perusahaan, tahap selanjutnya adalah memanfaatkan semua informasi tersebut dalam model-model kuantitatif perumusan strategi. Model yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Matrik TOWS atau SWOT.

Table 3.7
SWOT Matrix

IFE EFE	Strengths (S) • Tentukan 5-10 Faktor Peluang Eksternal	Weaknesses (W) • Tentukan 5-10 Faktor Kelemahan internal
Opportunities (O) • Tentukan 5-10 Faktor Peluang Eksternal	Strategi SO Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Threats (T) • Tentukan 5-10 Faktor Ancaman Eksternal	Strategi ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi WT Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Sumber : Rangkuti,2006

a. Strategi SO

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.

b. Strategi WO

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.

c. Strategi ST

Ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.

d. Strategi WT

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Langkah selanjutnya adalah membuat Matriks Internal- Eksternal

I-E Matriks bermanfaat memposisikan suatu Sentral Bisnis Unit (SBU) ke dalam matriks yang terdiri dari 9 sel.

Matriks 3.8
Matriks Internal-Eksternal

	Kuat 3,0-4,0	Rata-rata 2,0-2,99	Lemah 1,0-1,99	
4,0	3,0	2,0	1,0	
3,0	I	II	III	Tinggi 3,0- 4,0
2,0	IV	V	VI	Sedang 2,0- 2,99
1,0	VII	VIII	IX	Rendah 1,0- 1,99
	↓		↓	
	Hold and Mountain		Harvest or Divest	

Sumber : Husein Umar,2003

IE Matriks terdiri dari dua dimensi yaitu total skor dari Matriks IFE pada sumbu X dan total skor dari EFE pada sumbu Y. Pada sumbu X dari matriks IE, skornya ada tiga, yaitu: skor 1,0-1,99 menyatakan bahwa posisi internal adalah lemah, skor 2,00 -2,99 posisinya adalah rata-rata, dan skor 3,0-4,0 adalah kuat. Dengan cara yang sama, pada sumbu Y yang dipakai untuk matriks EFE, skor 1,0 – 1,99 adon 3,0 – 4,0 adalah rendah, skor 2,0 -2,99 adalah sedang an skor 3,0 – 4,0 adalah tinggi.

Matrik IE mempunyai tiga implikasi strategi yang berbeda, yaitu :

- SBU yang berada pada sel I, II atai IV dapat digambarkan sebagai *Grow dan Build*. Strategi-strategi yang cocok bagi SBU ini adalah strategi intensif

- b. SBU yang berada pada sel III,V atau VII paling baik dikendalikan dengan strategi-strategi Hold dan Maintain. Strategi-strategi yang cocok bagi SBU ini adalah Market Penetration dan Product Development
- c. SBU yang berada pada sel VI, VIII atau IX dapat menggunakan strategi Harvest atau Divestitur

3. Tahap Pengambilan Keputusan

Tahap terakhir dalam analisis SWOT adalah pengambilan keputusan untuk menentukan strategi pemberdayaan yang akan dilakukan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1. Letak Geografis Kabupaten/Kota di Pantura Barat Jawa Tengah

4.1.1. Kota Pekalongan

Kondisi geografis Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai Utara Pulau Jawa, dengan ketinggian kurang lebih 1 meter di atas permukaan laut dengan posisi geografis antara 6°50' 42" hingga 6°55' 44" Lintang Selatan dan 109°37'55" hingga 109°42' 19" Bujur Timur, serta berkoordinat fiktif 510,00 – 518,00 km membujur dan 517,75 – 526,75 km melintang dengan luas wilayah seluas 45,25 Km². Seluruh wilayah Kota Pekalongan dibatasi oleh sebelah Utara: Laut Jawa, sebelah Timur : Kabupaten Batang, sebelah Selatan: Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang , sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan

4.1.2. Kabupaten Pekalongan

Kabupaten Pekalongan sebagai salah satu daerah otonom di Propinsi Jawa Tengah, letaknya di sepanjang pantai Utara laut Jawa, memanjang ke Selatan, berbatasan dengan wilayah Eks Karesidenan Banyumas. Batas batas wilayahnya :

- Sebelah Timur : Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan
- Sebelah Barat : Kabupaten Pemalang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Banjarnegara
- Sebelah Utara : Laut Jawa dan Kota Pekalongan

Letaknya antara $6^{\circ} - 7^{\circ} 23'$ Lintang Selatan dan antara $109^{\circ} - 109^{\circ} 78'$ Bujur Timur'

4.1.3. Kabupaten Pemalang

Kabupaten Pemalang terletak diantara $109^{\circ}17'30'' - 109^{\circ}40'30''$ Bujur Timur dan $8^{\circ} 52' 30'' - 7^{\circ} 20' 11''$ Lintang Selatan dengan dibatasi oleh :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kabupaten Purbalingga
- Sebelah Barat : Kabupaten Tegal
- Sebelah Timur : Kabupaten Pekalongan

4.1.4. Kota Tegal

Kota Tegal terletak diantara $109^{\circ} 8' - 109^{\circ} 10'$ Bujur Timur dan $06^{\circ} 50' - 60^{\circ} 53'$ Lintang Selatan dengan dibatasi oleh :

- Sebelah Barat : Kabupaten Brebes
- Sebelah Timur : Kabupaten Tegal
- Sebelah Selatan : Kabupaten Tegal
- Sebelah Utara : Laut Jawa

4.1.5. Kabupaten Batang

Kabupaten Batang terletak diantara $109^{\circ} 110'$ Bujur Timur dan $006^{\circ} 117'$ Lintang Selatan dengan dibatasi oleh :

- Sebelah Barat : Kabupaten dan Kota Pekalongan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara
- Sebelah Timur : Kabupaten Kendal.

- Sebelah Utara :berbatasan dengan Laut Jawa.

4.1.6. Kabupaten Tegal

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah kabupaten di Propinsi Jawa Tengah dengan ibukota Slawi. Terletak diantara $108^{\circ} 57'6$ sampai dengan $109^{\circ} 21'30$ Bujur Timur dan $006^{\circ} 50'41''$ sampai dengan $007^{\circ} 15'30''$ Lintang Selatan dengan dibatasi oleh :

- Sebelah Utara : Kota Tegal dan Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Pemalang
- Sebelah Barat : Kabupaten Brebes,
- Sebelah Selatan : Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas

Secara topografis, wilayah Kabupaten Tegal terdiri atas 3 (tiga) katagori daerah, yaitu :

1. Daerah pantai meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja;
2. Daerah dataran rendah,meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pegerbarang, Dukuhwaru, Slawi, lebaksiu sebagian wilayah Suradadi, warureja, Kedungbanteng dan Bangkah
3. Daerah dataran tinggi/pegunungan, meliputi Kecamatan jatinegara, Margasari, Balapulang, Bumijawa, Bojong, sebagian pangkah dan Kedungbanteng.

4.2. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Sampel

Kabupaten/ Kota dimana Tempat Pelelangan Ikan sampel meliputi Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten

Pemalang, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal. Luas wilayah dan jumlah penduduk daerah tersebut dapat dilihat dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota
Di pantura Barat Jawa Tengah Tahun 2006

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (hektar)	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	Kabupaten Batang	78.864,16	694.453
2	Kabupaten Pekalongan	83.613	889.562
3	Kota Pekalongan	4.525	268.470
4	Kabupaten Pemalang	11.153,0	1.352.796
5	Kabupaten Tegal	87.879	1.476.299
6	Kota Tegal	3968	245.728

Sumber : Kabupaten Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Kota Tegal dan Kota Pekalongan Dalam Angka, Tahun 2006

4.3. Kondisi Perekonomian Kabupaten/Kota di wilayah sampel

Kondisi perekonomian suatu daerah dapat diukur antara lain dengan besarnya Produk Domestik Regional Bruto. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada masa sebelumnya(Sukirno,!985)

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di daerah penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Sampel
Tahun 2006

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	Kabupaten Batang	2.51
2	Kabupaten Pekalongan	4,21
3	Kota Pekalongan	3.06
4	Kabupaten Pemalang	3.72
5	Kabupaten Tegal	5.28
6	Kota Tegal	5.15

Sumber : PDRB Kabupaten Batang, Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kab. Tegal, Kota Tegal dan Kota Pekalongan, Tahun 2006

Dari Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tertinggi adalah di Kabupaten Tegal, yaitu sebesar 5,28 %, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi terendah adalah di Kabupaten Batang.

4.4. Gambaran TPI dan KUD Sampel di Kota Pekalongan

4.4.1. TPI PPNP Kota Pekalongan

TPI PPNP Kota Pekalongan dapat dinyatakan sebagai TPI terbesar dan terlengkap di Jawa Tengah. Terdapat dua unit bangunan TPI yang luas keseluruhan adalah 5.520 m², yang diperuntukan bagi pelelangan ikan hasil tangkapan *purse seine* dan ikan hasil tangkapan non *purse seine* dan kapal pendarat. Fasilitas yang tersedia cukup lengkap, meskipun secara kualitas masih ada yang perlu ditingkatkan, seperti pengeras suara diharapkan menggunakan teknologi nir-kabel agar pergerakan juru lelang lebih leluasa.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan (PPNP) terletak di Jalan WR Supratman, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2003, tanggungjawab

pelaksanaan pelelangan ikan di TPI diserahkan kepada Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.. Penyelenggaraan/Pelaksanaan Pelelangan ikan di TPI diserahkan kepada PUSKUD “Mina Baruna” Propinsi Jawa Tengah. Sebagai Pelaksana di Daerah, Puskud “Mina Baruna” mendelegasikan pelaksanaan pelelangan ikan kepada KUD Mina setempat. Untuk Kota Pekalongan diserahkan kepada KUD Makaryo Mino Kota Pekalongan yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan Pelelangan Ikan di TPI Pelabuhan Pekalongan. Produksi dan Raman TPI PPNP Kota Pekalongan dapat dilihat dalam Tabel 4.3

Tabel 4.3
Produksi dan Raman TPI PPNP Kota Pekalongan
Tahun 2003-2007

NO	TAHUN	PRODUKSI (Kg)	RAMAN (Rp)
1	2003	54,956,430	168,376,130,000
2	2004	58,748,289	180,942,957,000
3	2005	43,159,576	177,205,561,000
4	2006	31,942,782	150,522,629,000
5	2007	29,220,462	131,324,500,000

Sumber : TPI PPNP, 2007

Jenis Ikan yang dilelang di TPI PPNP Kota pekalongan adalah ikan layang, bawal, banyar, kembung, selar/bentong, jui, tongkol, lemuru, tengiri, manyung, cucut, pare/pe, kakap, bambangan, cumi-cumi, gendut, petek, lain-lain/campuran. Produksi ikan dari TPI yang dipasarkan lokal di Pekalongan : 25 %, luar daerah Pekalongan \pm 75 %. Terdiri dari daerah Magelang, Semarang, Kendal, Batang, Pemalang, Tegal, Cirebon, Krawang, Cikampek, Bogor, Bandung, Jakarta, Luar Jawa dan Luar Negeri.

4.4.2. KUD Makaryo Mino Kota Pekalongan

KUD Makaryo Mino, mempunyai daerah kerja meliputi Kota Pekalongan. Wilayah kerjanya, meliputi Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Krapyak Kidul, Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Krapyak Lor.

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari dalam rangka pelayanan kepada anggota KUD Makaryo Mino dilaksanakan oleh karyawan sebanyak 135 orang, yang terdiri dari beberapa bagian, yang dipimpin oleh seorang manager, dibantu oleh Kabag Umum dan Jasa, Kabag Perdagangan, Kabag Produksi Es, Kabag SPBU Dwi Fungsi, Kabag Administrasi/Keuangan.

Terkait dengan pelaksanaan pelelangan ikan, KUD Makaryo Mino melaksanakannya berdasarkan landasan Hukum :

1. Perda I tahun 1984 tentang Pelelangan Ikan
2. Perda No. 10 tahun 2003 tentang Tempat Pelelangan Ikan.

4.5. Gambaran Umum TPI Sampel di Kabupaten Pekalongan

4.5.1.TPI Wonokerto

TPI Wonokerto Kabupaten Pekalongan memiliki gedung TPI dua unit, secara fisik cukup baik untuk menunjang kegiatan pelelangan. Lantai TPI cukup luas, dengan areal parkir yang memadai, namun masih perlu ditingkatkan fasilitas penunjangnya, terutama keranjang ikan. Jumlah karyawan TPI sudah cukup banyak, dan pada saat produksi rendah, jumlah tersebut terasa berlebih.

- a. Proses lelang

Proses lelang di TPI Wonokerto dimulai pada pukul 13.00 -15.00 WIB. Dari hasil tangkapan nelayan yang kepalanya melakukan bongkar di TPI Wonokerto hampir semua dilelang melalui TPI Wonokerto. Pembayaran lelang dilakukan secara tunai, andaikan tunai, pembayaran dilakukan maksimal 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan lelang..

b. Produksi dan Raman

Produksi dan raman TPI Wonokerto selama kurun waktu 2003-2007 dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4
Produksi dan Raman TPI Wonokerto
Kabupaten Pekalongan Tahun 2003-2007

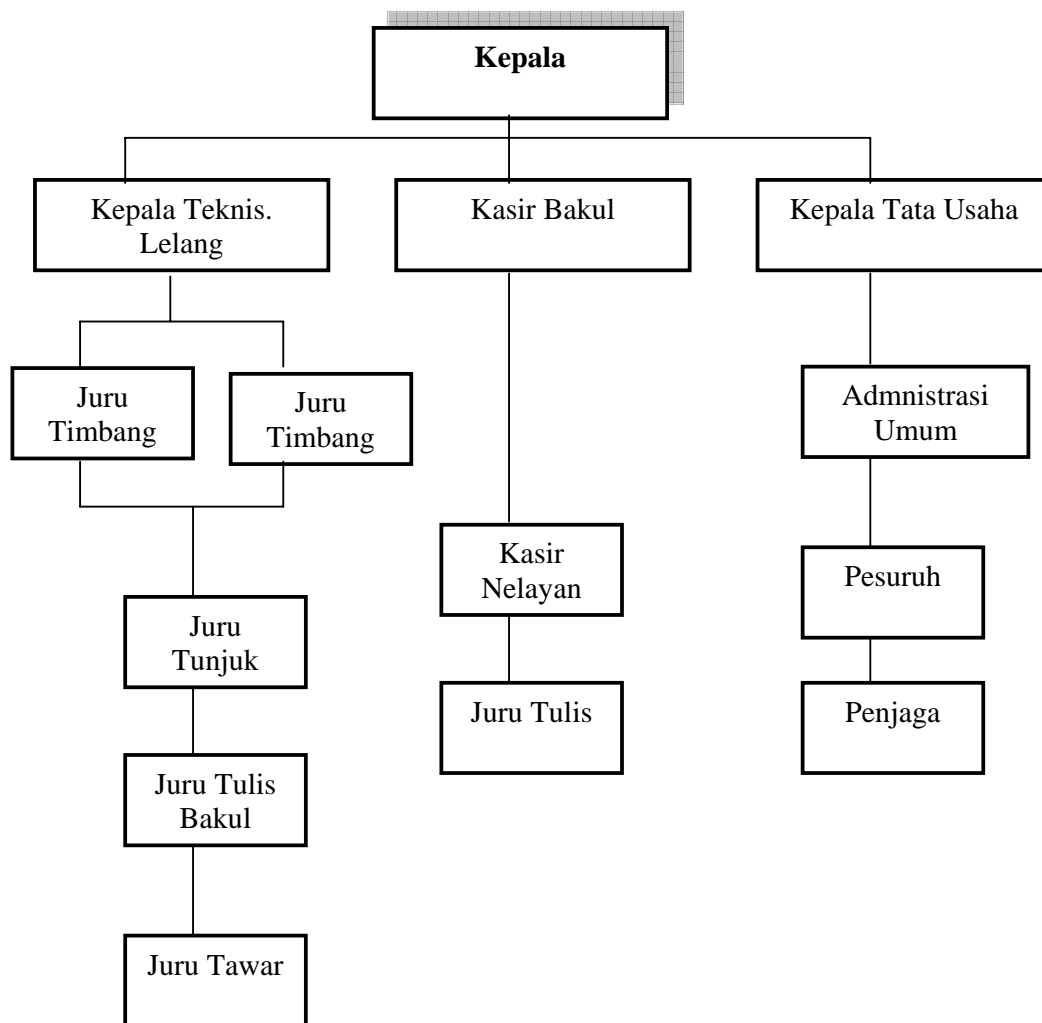
No	TAHUN	PRODUKSI (Kg)	RAMAN (Rp)
1	2003	1,218,319	2,107,553,600
2	2004	1,206,361	2,841,568,400
3	2005	1,171,750	2,866,625,400
4	2006	746,293	3,044,134,400
5	2007	605,675	3,062,025,300

Sumber : TPI Wonokerto, 2007

c. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Tempat Pelelangan Ikan Wonokerto Kabupaten Pekalongan dapat dilihat dalam Gambar 4.1 :

Gambar 4.1
Struktur Organisasi TPI Wonokerto



Sumber : TPI Wonokerto,2008

4.6. Gambaran TPI Sampel di Kabupaten Pemalang

4.6.1.TPI Tanjungsari

TPI Tanjungsari Kabupaten Pemalang terletak di Desa Sugihwaras, Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Penanggungjawab TPI adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang. Diselenggarakan oleh PUSKUD Mina Baruna Jawa Tengah, dan pelaksanaannya dilakukan oleh KUD Mina Miyoso Sari Pemalang.

a. Proses lelang

Proses lelang di TPI Tanjungsari dimulai pada pukul 07.00 -14.00 WIB. Dari hasil tangkapan nelayan yang kepalnya melakukan bongkar di TPI Tanjungsari hampir semua dilelang melalui TPI Tanjungsari. Pembayaran lelang dilakukan secara tunai, andaikan tunai, pembayaran dilakukan maksimal 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan lelang.

Mekanisme pelelangan ikan di TPI Tanjungsari adalah :

- Kapal ikan merapat di TPI Tanjungsari, melapor ke Pos Keamanan terpadu untuk mendapatkan nomor urut lelang
- Pada pukul 03.00 WIB ikan mulai dibongkar oleh ABK, disortir sesuai dengan jenis dan mutu ikan, selanjutnya ditempatkan di fish basket yang telah disediakan
- Pukul 05.00 WIB ikan diturunkan dari kapal dan ditimbang, ditata di lantai lelang oleh petugas angkut ikan

- Pukul 07.00 WIB ikan dilelang sesuai dengan nomor urut lelang
- Lelang ikan dilaksanakan secara terbuka. Untuk perahu kecil mendapat prioritas lebih dahulu
- Nelayan mendapat karcis lelang dihitung oleh juru hitung, diberi SPU (Surat Pembayaran Uang) setelah dibayae oleh kasir bayar dengan pungutan 3 % dari nilai lelang
- Bakul ikan membayar jumlah lelang yang diperoleh ditambah 2 %
- Pungutan lelang sebesar 5 % disetorkan kepada kas daerah.

b. Produksi dan Raman

Jenis ikan yang dilelang di TPI Tanjungsari antara lain : ikan layang, selar, jui, tengiri, kembung, tongkol, teri, teri nasi, bawal hitam, bawal putih, ekor kuning, layur, petek, kakap, tigawaja, julung-julung, cucut, pari, manyung, songot, bambangan, blanak, kuro, kerapu, cumi, ubur-ubur, simping, rajungan, udang jerbung, udang peci, udang krosok, rebon dan lain-lain.

Produksi dan Raman TPI Tanjungsari Kabupaten Pematang dapat dalam Tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5
Produksi dan Raman TPI TANJUNGSARI Kabupaten Pemalang
Tahun 2003-2007

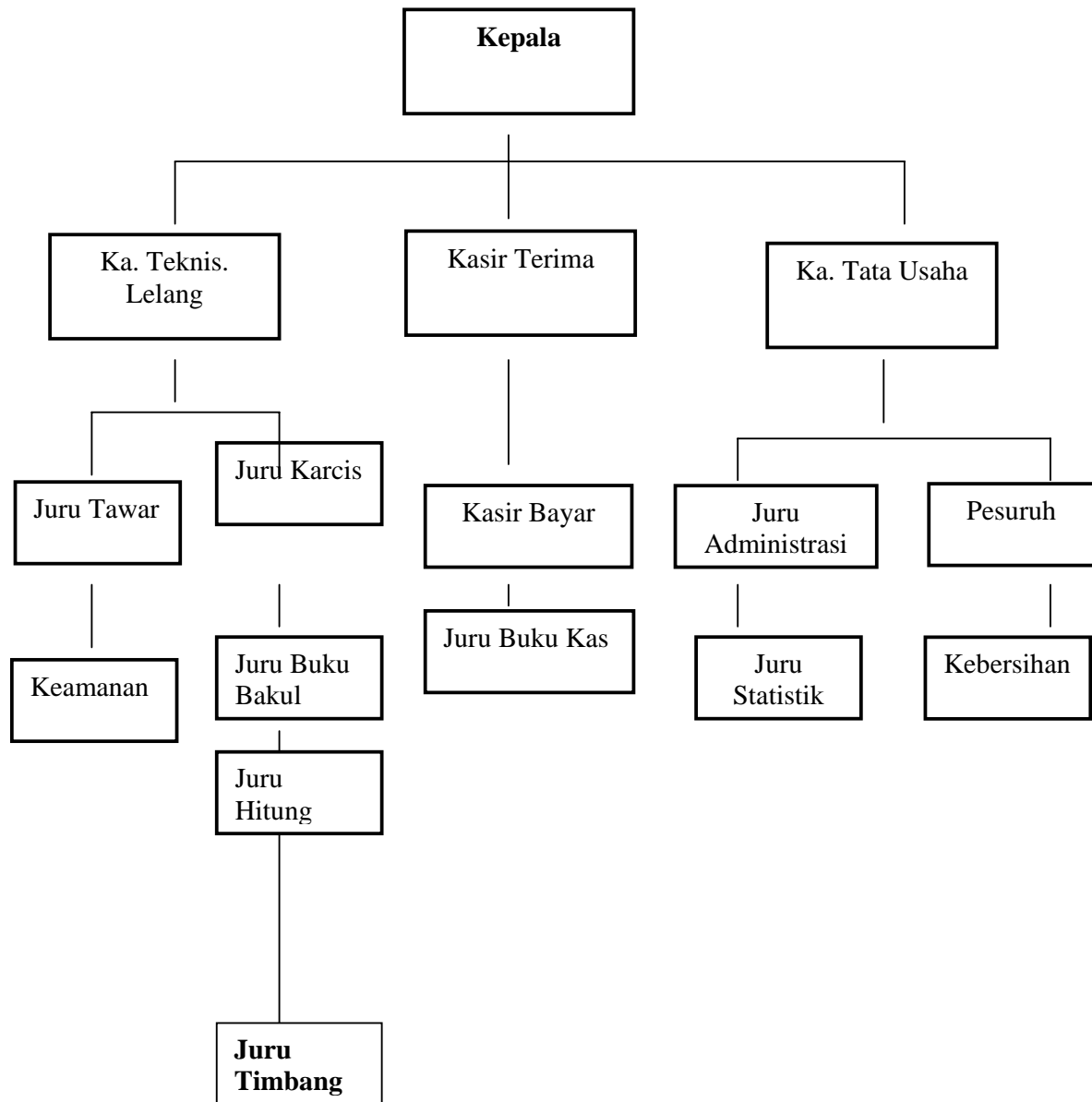
NO	TAHUN	PRODUKSI (Kg)	RAMAN (Rp)
1	2003	4,669,601	18,935,242,000
2	2004	5,149,581	23,514,350,000
3	2005	5,987,579	31,207,103,000
4	2006	5,273,812	29,382,502,000
5	2007	4,347,241	28,278,587,000

Sumber : TPI Tanjungsari, 2008

c. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi TPI Tanjungsari Kabupaten Pemalang dapat dilihat dalam Gambar 4.2. berikut :

Gambar 4.2
Struktur Organisasi TPI Tanjungsari



Sumber : TPI Tanjungsari,2008

4.6.2.TPI Asemtoyong

TPI Asemtoyong terletak di Desa/Kelurahan Asemtoyong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Penanggungjawab TPI Asemtoyong adalah Dinas Perikanan dan kelautan Propinsi Jawa Tengah dan Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Pemalang. Penyelenggara pelelangan adalah Puskud Mina Baruna Jawa Tengah, dan pelaksanaannya adalah KUD “Mina Misoyo Makmur” Kabupaten Pemalang.

a. Proses lelang

Proses lelang di TPI Asemtoyong dimulai pada pukul 11.30- 15.00 WIB. Dari hasil tangkapan nelayan yang kepalanya melakukan bongkar di TPI Asemtoyong hampir semua dilelang melalui TPI Asemtoyong. Pembayaran lelang dilakukan secara tunai, andaikan tunai, pembayaran dilakukan maksimal 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan lelang..

Jenis ikan yang dilelang di TPI Asemtoyong adalah layang, selar, jui, tengiri, kembung, tongkol, teri, teri nasi, bawal hitam, bawal putih, ekor kuning, layur, petek, kakap, tigawaja, julung cucut, pari, manyung, songot, bambangan, belanak, kuro , kerapu, cumi, ubur-ubur, simping, rajungan, udang jerbung, udang peci, udang krosok, rebon dan ikan lainnya.

Mekanisme Lelang Ikan

1. Kapal ikan merapat di dermaga TPI Asemtoyong , melapor ke petugas untuk mendapatkan nomor urut lelang

2. Jam 08.00 WIB ikan mulai dibongkar oleh ABK, disortir sesuai dengan jenis dan mutu ikan, dan ditempatkan di fish basket yang telah disediakan oleh KUD Mina Misoyo Makmur
 3. Jam 10.00 WIB ikan diturunkan dari kapal dan ditimbang , ditata di lantai lelang oleh petugas angkut ikan yang dikoordinir oleh KUD Mina Misoyo Makmur.
 4. Jam 11.00 WIB ikan dilelang sesuai dengan nomor urut lelang
 5. Lelang dilaksanakan secara terbuka.
 6. Untuk perahu kecil, dilelang tersendiri bersamaan dengan lelang perahu besar
 7. Nelayan mendapat karcis lelang dihitung oleh juru hitung, dibersi SPU setelah dibayar oleh kasir bayar dengan dipungut 3 % dari nilai lelang
 8. Bakul ikan membayar dari jumlah lelang yang diperoleh dengan ditambah 2 %
 9. Pungutan lelang 5 % disetorkan ke Bank Jateng
 10. Semua transaksi dan kegiatan pelelangan setiap hari dibukukan dengan administrasi TPI
- b. Produksi dan Raman

Produksi dan Raman TPI Asemtoyong Kabupaten Pemalang dapat dilihat dalam Tabel 4.6 berikut :

Tabel 4.6.
Produksi dan Raman TPI Asemtoyong Kabupaten Pemalang
Tahun 2003.2007

NO	TAHUN	PRODUKSI (Kg)	RAMAN (Rp)
1	2003	3,784,459	7,311,840,300
2	2004	4,810,783	9,052,946,200
3	2005	5,408,367	10,405,560,100
4	2006	4,522,181	10,429,879,300
5	2007	3,679,656	8,330,817,000

Sumber : TPI Asemtoyong, 2008

4.6.3.TPI Mojo.

TPI Mojo di Desa Maja, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang. Penanggungjawab TPI Mojo adalah Dinas Perikanan dan kelautan Propinsi Jawa Tengah dan Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Pemalang. Penyelenggara pelelangan adalah Puskud Mina Baruna jawa Tengah, dan pelaksanaannya adalah KUD “Mina Misoyo Sari” Kabupaten Pemalang.

a. Proses lelang

Proses lelang di TPI Mojo dimulai pada pukul 14.00 -15.00 WIB. Dari hasil tangkapan nelayan yang kepalnya melakukan bongkar di TPI Mojo. Tangkapan yang dilelang melalui TPI Mojo sekitar 80 %, yang 20 % dilelang melalui TPI Wonokerto. Hal ini disebabkan sedikitnya bakul yang melakukan lelang di TPI Mojo. Pembayaran lelang dilakukan tidak tunai, pembayaran dilakukan setelah 2 hari, maksimal 5 hari setelah pelaksanaan lelang..

b. Produksi dan Raman

Produksi dan Raman TPI Mojo Kabupaten Pemalang dapat dilihat dalam Tabel 4.7 berikut :

Tabel 4.7
Produksi dan Raman TPI Mojo Kabupaten Pemalang
Tahun 2003-2007

NO	TAHUN	PRODUKSI (Kg)	RAMAN (Rp)
1	2003	314,032	939,803,300
2	2004	349,658	1,139,085,700
3	2005	423,729	1,245,703,600
4	2006	404,805	1,310,521,100
5	2007	382,218	1,202,255,100

Sumber : TPI Mojo, 2008

4.6.4. TPI Ketapang

TPI Ketapang di Desa Ketapang, Kabupaten Pemalang. Penanggungjawab TPI Ketapang adalah Dinas Perikanan dan kelautan Propinsi Jawa Tengah dan Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Pemalang. Penyelenggara pelelangan adalah Puskud Mina Baruna jawa Tengah, dan pelaksanaannya adalah KUD “Mina Misoyo Sari” Kabupaten Pemalang.

a. Proses lelang

Proses lelang di TPI Ketapang dimulai pada pukul 14.00 -16.00 WIB. Dari hasil tangkapan nelayan yang kepalnya melakukan bongkar di TPI Ketapang. Tangkapan yang dilelang melalui TPI Ketapang sekitar 90 %, yang 10 % dijual di luar TPI karena sudah terikat dengan bakul Pembayaran lelang dilakukan tidak tunai, pembayaran dilakukan setelah 2 hari, maksimal 5 hari setelah pelaksanaan lelang.

b. Produksi dan Raman

Produksi dan Raman TPI Ketapang Kabupaten Pemalang dapat dilihat dalam Tabel 4.8 berikut :

Tabel 4.8
Produksi dan Raman TPI Ketapang Kabupaten Pemalang
Tahun 2003-2007

NO	TAHUN	PRODUKSI (Kg)	RAMAN (Rp)
1	2003	814,554	1,393,106,300
2	2004	979,270	1,518,064,700
3	2005	791,407	1,305,902,100
4	2006	914,062	1,310,026,300
5	2007	867,922	1,336,655,900

Sumber : TPI Ketapang, 2008

4.6.5.KUD Miyoso Sari

KUD Mina Miyoso Sari mempunyai keanggotaan unit Tanjungsari, Mojo, Ketapang, Widuri. Bidang Usaha yang dimiliki meliputi :

1. Unit Usaha Perdagangan yang meliputi Waserda (Warung Serba Ada)
2. Barang Alat Perikanan (BAP)
3. Unit Usaha Simpan Pinjam Anggota
4. Unit Usaha Fish Basket
5. Unit Usaha Kios, Pasar, jasa jaring dan Jasa PAM

4.7. Gambaran TPI Sampel di Kota Tegal

4.7.1. TPI Tegalsari Kota Tegal

TPI Tegalsari Kota Tegal memiliki areal lahan yang sangat luas, dengan dua bangunan TPI yang cukup memadai untuk menunjang kegiatan lelang. Apabila

kegiatan lelang berjalan dengan baik, maka fasilitas penunjang seperti keranjang ikan dan gerobag dorong akan kurang mampu menunjang kegiatan lelang. Banyak hal yang perlu dibenahi untuk meningkatkan kegiatan lelang di PPP Tegalsari.

a. Proses lelang

Proses lelang di TPI Tegalsari dilaksanakan dua kali, yaitu pada pukul 06.00 -10.00 dan pada pukul 12.00 -16.00 WIB. Dari hasil tangkapan nelayan yang kapalnya melakukan bongkar di TPI Tegalsari., tangkapan yang dilelang melalui TPI Tegalsari sekitar 80 %, yang 20 % dijual di luar TPI karena sudah terikat dengan bakul/ijon/tengkulak. Pembayaran lelang dilakukan tidak tunai, pembayaran dilakukan setelah 2 hari, maksimal 5 hari setelah pelaksanaan lelang..

b. Produksi dan Raman

Produksi dan Raman TPI Tegalsari Kota Tegal dapat dilihat dalam Tabel 4.9 berikut :

Tabel 4.9.
Produksi dan Raman TPI Tegalsari
Tahun 2003-2007

NO	TAHUN	PRODUKSI (Kg)	RAMAN (Rp)
1	2003	923,445	911,278,000
2	2004	2,340,598	3,463,375,500
3	2005	3,326,628	6,913,837,500
4	2006	1,840,869	4,672,016,500
5	2007	1,577,134	3,646,925,000

Sumber : TPI Tegalsari, 2008

4.7.2. TPI Pelabuhan Kota Tegal

TPI Pelabuhan Kota Tegal memiliki luas lantai 1914 m², namun dirasakan kurang mampu menunjang kelancaran pelelangan Akibatnya kegiatan bongkar ikan dari kapal menjadi lambat dan kadang-kadang menunggu sampai berhari-hari untuk mendapatkan giliran lelang. Pada saat studi, ditemukan kapal yang sudah membongkar ikan selama empat hari belum selesai. Disamping itu kondisi bangunan TPI juga sudah rapuh dan membahayakan keselamatan kerja.

a. Proses lelang

Proses lelang di TPI Pelabuhan dilaksanakan pada pukul 12.00 -16.00 WIB. Dari hasil tangkapan nelayan yang kapalnya melakukan bongkar di TPI Pelabuhan semua dilelang melalui TPI Pelabuhan. Pembayaran lelang dilakukan tidak tunai, yaitu setelah 2 hari, maksimal 5 hari setelah pelaksanaan lelang..

b. Produksi dan Raman

Produksi dan Raman TPI Pelabuhan Kota Tegal dapat dilihat dalam Tabel 4.10 berikut :

Tabel 4.10
Produksi dan Raman TPI Pelabuhan Tegal Tahun 2003-2007

NO	TAHUN	PRODUKSI (Kg)	RAMAN (Rp)
1	2003	26,790,740	90,994,168,000
2	2004	24,776,131	86,440,699,000
3	2005	18,941,579	81,678,468,000
4	2006	18,732,788	89,658,743,000
5	2007	18,988,936	93,577,548,000

Sumber : TPI Pelabuhan Tegal, 2008

4.7.3. TPI Muarareja

TPI Muarareja terletak di Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat.

TPI ini termasuk dalam katagori TPI Kelas IVA.

a. Proses lelang

Proses lelang di TPI Muarareja dilaksanakan pada pukul 06.00 -11.00 WIB. Dari hasil tangkapan nelayan yang kapalnya melakukan bongkar di TPI Muarareja semua dilelang melalui TPI Muarareja. Pembayaran lelang dilakukan tidak tunai, yaitu setelah 2 hari, maksimal 5 hari setelah pelaksanaan lelang..

b. Produksi dan Raman

Produksi dan Raman TPI Muarareja Kota Tegal dapat dilihat dalam Tabel 4.11 berikut :

Tabel 4.11
Produksi dan Raman TPI Muara Reja Kota Tegal
Tahun 2003-2007

N O	TAHU N	PRODUKSI (Kg)	RAMAN (Rp)
1	2003	783	15,650,000
2	2004	536	10,760,000
3	2005	3,204	64,438,000
4	2006	130	2,800,000
5	2007	45,535	139,816,000

Sumber : TPI Muarareja, 2008

4.8. Gambaran Umum TPI Sampel di Kabupaten Batang

4.8.1. TPI Klidang Lor

Permasalahan PPI Klidang Lor terutama karena terbatasnya lahan. Bangunan TPI terdiri dua unit, dengan area parkir yang sangat sempit, sehingga pada saat pelaksanaan lelang nampak semrawut, ditambah dengan kondisi lingkungan yang kumuh. Kesemrawutan tersebut akibat ketidak-disiplinan para pihak yang terkait dengan pelelangan, seperti pemanfaatan lantai lelang sebagai area penanganan hasil lelang oleh bakul, masuknya berbagai macam alat pengangkut ke dalam gedung TPI, alur ikan dari dermaga ke lantai lelang sampai dengan setelah lelang belum diatur dengan baik dan juga belum diaturnya pihak-pihak yang boleh beraktifitas di dalam TPI. Disamping itu fasilitas penunjang seperti *fish basket*, gerobag dorong, timbangan dan lampu dirasakan masih kurang memadai untuk menunjang kelancaran lelang.

a. Proses lelang

Proses lelang di TPI Klidang Lor dilaksanakan pada pukul pukul 03.00 - 09.00 WIB. Dari hasil tangkapan nelayan yang kapalnya melakukan bongkar di TPI Klidang Lor semua dilelang melalui TPI Klidang Lor. Pembayaran lelang dilakukan tidak tunai, yaitu setelah 2 hari, maksimal 5 hari setelah pelaksanaan lelang. Pembayaran yang tidak tunai ini membawa masalah Kekurangan Pembayaran Lelang Ikan yang memberatkan bagi pihak pengelola, karena tunggakan yang terjadi sampai penelitian ini dilakukan sudah mencapai hampir 2,5 milyar rupiah.

b. Produksi dan Raman

Produksi dan Raman TPI Klidang Lor Kabupaten Batang dapat dilihat dalam Tabel 4. 12 berikut :

Tabel 4.12
Produksi dan Raman TPI Klidang Lor Kabupaten Batang
Tahun 2003-2007

NO	TAHUN	PRODUKSI (Kg)	RAMAN (Rp)
1	2003	14,434,655	21,320,452,300
2	2004	11,001,523	24,267,027,200
3	2005	10,591,251	28,437,794,800
4	2006	17,123,331	47,971,605,400
5	2007	16,674,395	53,580,655,000

Sumber : TPI Klidang Lor, 2008

4.9. Gambaran Umum TPI di Kabupaten Tegal

4.9.1. TPI Surodadi

TPI Surodadi Kabupaten Tegal memiliki luas lantai 300 m², cukup untuk menunjang kegiatan pelelangan. Fasilitas penunjang lainnya seperti timbangan dan keranjang ikan perlu mendapat perhatian. Jumlah karyawan TPI dirasakan kurang pada saat produksi melimpah, sehingga ada petugas yang merangkap pekerjaan.

a. Proses lelang

Proses lelang di TPI Suradadi dilaksanakan pada pukul 12.00- 15.00 WIB. Dari hasil tangkapan nelayan yang kapalnya melakukan bongkar di TPI Suradadi sebanyak 70 % dilelang melalui TPI Suradadi, selebihnya

dilakukan di luar TPI, karena nelayan terikat dengan pelanggan. Pembayaran lelang dilakukan tidak tunai, yaitu setelah 2 hari, maksimal 10 hari setelah pelaksanaan lelang.

b. Produksi dan Raman

Produksi dan Raman TPI Suradadi Kabupaten Tegal dapat dilihat dalam Tabel 4.13 berikut :

Tabel 4.13
Produksi dan Raman TPI Suradadi Kabupaten Tegal
Tahun 2003-2007

NO	TAHUN	PRODUKSI (Kg)	RAMAN (Rp)
1	2003	193,585	732,606,800
2	2004	143,592	637,171,600
3	2005	108,989	644,805,500
4	2006	148,138	403,086,300
5	2007	105,445	520,133,900

Sumber : TPI Suradadi, 2008

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Analisis Efisiensi Tempat Pelelangan Ikan

Efisiensi teknik adalah besaran yang menunjukkan perbandingan antara produksi sebenarnya dengan produksi maksimum. Efisiensi teknis (*technical efficiency*) mengharuskan atau mensyaratkan adanya proses produksi yang dapat memanfaatkan input yang lebih sedikit demi menghasilkan output dalam jumlah yang sama. Dalam penelitian ini fungsi produksi TPI diestimasi dengan paket program komputer Frontier *Data Envelopment Analysis* (DEA).

Perhitungan Analisis Efisiensi TPI di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemasang, Kota Tegal dan Kota Pekalongan, menggunakan 13 variabel input yaitu : Panjang pendaratan, luas lantai lelang, jumlah kapal bongkar per hari, jumlah personalia TPI, jumlah alat tangkap, jumlah kapal, jumlah juru lelang, jumlah juru bongkar, jumlah nelayan, jumlah bakul, jumlah basket, jumlah timbangan dan jumlah gerobag. Variabel output terdiri dari nilai raman dan share omzet masing-masing TPI terhadap produksi Jawa Tengah.

Berdasarkan analisis efisiensi pada seluruh TPI di wilayah penelitian diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 5.1.
Skor Efisiensi TPI

No	TPI	Kelas	Skor Efisiensi (%)
1	PPNP	I	100
2	Pelabuhan	I	100
3	Klidang Lor	II	100
4	Tanjungsari	II	100
5	Asemtoyong	IV	100
6	Tegalsari	IV	22,34
7	Wonokerto	IV	74,37
8	Ketapang	IV	100
9	Mojo	IV	100
10	Suradadi	IV	66,92
11	Muarareja	IV	47,71

Sumber : Hasil perhitungan DEA dengan Banxia Frontier Analysis

Dari hasil analisis dengan software Banxia Frontier Analysis (BFA) didapatkan hasil bahwa Tempat Pelelangan Ikan yang mempunyai skor efisiensi 100 % adalah TPI PPNP Kota Pekalongan, TPI Ketapang, TPI Asemtoyong, TPI Tanjungsari, TPI Klidang Lor, TPI Pelabuhan Tegal dan TPI Mojo. Dari tabel 5.1 dapat dilihat bahwa TPI yang telah mencapai skor 100 %, atau telah efisien berdasarkan penelitian di lapangan, masih terdapat kemungkinan pengembangan di suatu TPI, terutama dari segi fasilitas-fasilitas maupun prasarana di TPI. Pada akhirnya hal ini akan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Sebagai contoh, TPI Pelabuhan Kota Tegal, yang menggunakan sistem TPI tertutup, yaitu tidak berhubungan langsung dengan laut, tidak seperti TPI-TPI pada umumnya. Antara tempat kapal bersandar dengan TPI dipisahkan oleh tembok, yang hanya dapat dilalui melalui sebuah pintu, yang ukurannya kurang lebih dapat dilalui oleh dua orang dewasa secara bersama-sama. Dalam proses pengangkutan ikan dari kapal menuju TPI harus melalui pintu tersebut, karena

hanya itulah satu-satunya jalan masuk. Seringkali, dalam kesibukan proses pengangkutan, nelayan bersimpangan di pintu masuk tersebut, sehingga salah satu harus mengalah, dan menepi, baru kemudian masuk melalui pintu tersebut. Hal ini sangat tidak praktis, karena sebagai salah satu TPI Kelas I yang sangat produktif, kelancaran proses pengangkutan ikan dari kapal ke TPI sangatlah penting. Karena ikan merupakan produk yang bersifat “*high perishable*” atau mudah rusak. Proses penyortiran ikan dilakukan di atas kapal masing-masing. Untuk upaya-upaya pengawetan ikan, nelayan menggunakan es, tetapi untuk hasil-hasil tangkapan awal mereka, diawetkan dengan menggunakan garam. Dengan proses pengawetan yang sangat minim dan jumlah es yang kurang memadai, bisa dipastikan ikan akan lebih cepat mengalami kemunduran mutu, yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap harga jualnya. Kecepatan proses persiapan sampai dengan lelang akan berpengaruh pada kualitas ikan. Bila pintu masuk diperbesar ukurannya, atau barangkali dapat dibuat dua buah pintu terpisah, masing-masing untuk aktivitas keluar dan masuk, akan lebih memudahkan dan memperlancar proses pengangkutan ikan-ikan hasil tangkapan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyani Dyah (2005) didapatkan bahwa TPI PPNP, TPI Pelabuhan, TPI Klidang Lor dan TPI Tanjungsari mempunyai skor efisiensi 100 %. Dari hasil perhitungan skor efisiensi pada Tabel 5.1 di atas, skor efisiensi untuk TPI PPNP, TPI Pelabuhan, TPI Klidang Lor dan TPI Tanjungsari menghasilkan angka 100 %.

Pada tahun 2006, penelitian A. Budi Risharyanto mendapatkan hasil bahwa skor efisiensi untuk TPI Pelabuhan 100 %, TPI Tanjungsari 100 %, TPI

Asemdayong 100 %, TPI Tegalsari 39,7 %. Perbedaan skor efisiensi teknis pada TPI Tegalsari menunjukkan terjadinya penurunan efisiensi pada kurun waktu 2 tahun.

5.1.1. TPI Tegalsari

Berdasarkan analisis dengan *Banxia Frontier Analysis*, skor efisiensi TPI Tegalsari di Kota Tegal adalah sebesar 22,34 %. Untuk meningkatkan efisiensi sampai batas *efisien frontier*, secara teoritis TPI Tegalsari Kota Tegal cukup dengan panjang pangkalan pendaratan 120 meter atau 45,45 % lebih pendek dari panjang pendaratan sebenarnya. Praktisnya, TPI Tegalsari di Kota Tegal tidak perlu lagi menambah panjang tempat pendaratan kapal, karena dengan panjang pendaratan yang ada sekarang ternyata telah berlebih. Jumlah kapal bongkar secara teoritis berlebih, begitu pula dengan jumlah kapal. Jumlah alat tangkap telah berlebihan, sehingga bila memungkinkan bisa dirasionalisasikan sebesar 69,63 %. Jumlah personalia TPI terlalu banyak untuk mencapai efisien, yaitu perlu dikurangi 56,75 %, begitu pula jumlah juru lelang. Selain itu, bila memungkinkan ada pengurangan jumlah bakul sebesar 88,88 %. Alat-alat yang digunakan seperti timbangan tidak perlu dikurangi, namun jumlah gerobag perlu dikurangi sebesar 81,40 %. Di sisi lain, perlu menjaga kestabilan nilai raman dan meningkatkan share omzet sebesar 347,63 % dan 353,62 %.

Tabel 5.2
Peningkatan Efisiensi TPI Tegalsari

	Input/Output	Actual	Target	Potential Improvement
	Pjng Pendaratan	220	120	-45,45 %
	Ls Lt Lelang	630	630	0,00
	Jml Kpl Bongkar	15	2,94	-80,40 %
	Jml Alat Tangkap	290	88,06	-69,63 %
	Jml Kapal	290	50,71	-82,51 %
	Jml Personal TPI	12	5,19	-56,75 %
	Jml Jr Lelang	1	0,81	-19 %
	Jml Jr Bongkar	3	3	0
Input	Jml Nelayan	3500	679,44	-80,59 %
	Jml Bakul	90	10,01	-88,88 %
	Jml Basket	5000	1375,80	-72,48 %
	Jml Timbangan	1	0,99	-01,00 %
	Jml Gerobak	50	9,30	-81,40 %
Output	Nilai Raman (Rp 000)	3646925	6324800	347,63 %
	Share Omzet	0,58	2,63	353,62 %

Sumber : Perhitungan DEA dengan *Banxia Frontier Analysis*

5.1.2. TPI Wonokerto

TPI Wonokerto mempunyai skor efisiensi sebesar 74,37 %. Untuk mencapai batas sampai batas *efisien frontier*, secara teoritis TPI Wonokerto cukup dengan panjang pangkalan pendaratan 41,3 meter atau 79,44 % lebih pendek dari panjang pendaratan sebenarnya. Praktisnya, TPI Wonokerto tidak perlu lagi menambah panjang tempat pendaratan kapal, karena dengan panjang pendaratan yang ada sekarang ternyata telah berlebih. Jumlah kapal bongkar secara teoritis berlebih, begitu pula dengan jumlah kapal. Jumlah alat tangkap cukup. Jumlah personalia TPI terlalu banyak untuk mencapai efisien, yaitu perlu dikurangi 86,01 %, begitu pula jumlah juru lelang. Selain itu, bila memungkinkan ada pengurangan jumlah bakul sebesar 94,56 %. Alat-alat yang digunakan seperti

timbangan tidak perlu dikurangi (meskipun dari perhitungan perlu dikurangi, namun hal ini tidak rasional). Di sisi lain, perlu menjaga kestabilan nilai raman dan meningkatkan share omzet sebesar 34,45 % dan 39,60 %.

Tabel 5.3
Peningkatan Efisiensi TPI Wonokerto

	Input/Output	Actual	Target	Potential Improvement
Input	Pjng Pendaratan	200	41,3	-79,44 %
	Ls Lt Lelang	1200	128,85	-89,26 %
	Jml Kpl Bongkar	25	1,64	-93,44 %
	Jml Alat Tangkap	60	60	-00,00 %
	Jml Kapal	60	30,78	-48,71 %
	Jml Personal TPI	13	1,82	-86,01 %
	Jml Jr Lelang	2	0,24	-88,10 %
	Jml Jr Bongkar	2	1,03	-48,59 %
	Jml Nelayan	759	366,06	- 51,77 %
	Jml Bakul	70	3,80	-94,56 %
	Jml Basket	500	219,02	- 56,20 %
	Jml Timbangan	3	0,38	-87,37 %
	Jml Gerobak	2	2	-0,00 %
Output	Nilai Raman (Rp 000)	3062025	4117043,216	34,45 %
	Share Omzet	0,49	0,68	39,60 %

Sumber : Perhitungan DEA dengan Banxia Frontier Analysis

5.1.3. TPI Surodadi

Skor efisiensi TPI Surodadi menurut hasil perhitungan dengan Banxia Frontier Analysis adalah sebesar 66,92 %. Untuk mencapai batas sampai batas *efisien frontier*, secara teoritis TPI Surodadi cukup dengan panjang pangkalan pendaratan 102,6 meter atau 22,68 % lebih pendek dari panjang pendaratan sebenarnya. Praktisnya, TPI Surodadi tidak perlu lagi menambah panjang tempat pendaratan kapal, karena dengan panjang pendaratan yang ada sekarang ternyata telah berlebih. Jumlah kapal bongkar secara teoritis berlebih, begitu pula dengan

jumlah kapal,umlah alat tangkap. Jumlah personalia TPI terlalu banyak untuk mencapai efisien, yaitu perlu dikurangi 27,10 %. Jumlah Juru Lelang secara teoritis perlu dikurangi, namun menjadi tidak realistis, sehingga hal ini tidak perlu dilakukan. Alat-alat yang digunakan seperti timbangan tidak perlu dikurangi,namun jumlah gerobag 71,40 %. Di sisi lain, perlu menjaga kestabilan nilai raman dan meningkatkan share omzet sebesar 49,44 % dan 55,48 %.

Tabel 5.4
Peningkatan Efisiensi TPI Surodadi

	Input/Output	Actual	Target	Potential Improvement
	Pjng Pendaratan	132	102,6	-22,68 %
	Ls Lt Lelang	300	86,75	-71,08 %
	Jml Kpl Bongkar	75	28,31	-62,25 %
	Jml Alat Tangkap	250	88,63	-64,55 %
	Jml Kapal	75	46,84	-37,54 %
	Jml Personal TPI	4	2,92	-27,10 %
	Jml Jr Lelang	1	0,55	-45,26 %
	Jml Jr Bongkar	2	1,51	-24,54 %
Input	Jml Nelayan	382	278,07	-27,21 %
	Jml Bakul	21	21	0,00 %
	Jml Basket	1	1	0,00 %
	Jml Timbangan	1	1	0,00 %
	Jml Gerobak	2	0,58	-71,40 %
Output	Nilai Raman (Rp 000)	520133,9	777266,796	49,44 %
	Share Omzet	0,08	0,12	55,48 %

Sumber : Perhitungan DEA dengan *Banxia Frontier Analysis*

5.1.4. TPI Muarareja

Hasil perhitungan efisiensi untuk TPI Muarareja adalah 47,71 %. Untuk mencapai batas sampai batas *efisien frontier*, secara teoritis TPI Muarareja cukup dengan panjang pangkalan pendaratan 15,02 meter atau 89,99 % lebih pendek dari

panjang pendaratan sebenarnya. Praktisnya, TPI Muarareja tidak perlu lagi menambah panjang tempat pendaratan kapal, karena dengan panjang pendaratan yang ada sekarang ternyata telah berlebih. Luas lantai lelang cukup 13,54 m² saja, sehingga terdapat kelebihan sebanyak 77,47 %. Jumlah kapal bongkar secara teoritis berlebih, begitu pula dengan jumlah kapal. Jumlah personalia TPI terlalu banyak untuk mencapai efisien, namun hasil perhitungan tidak realistis, sehingga jumlah personalia tidak perlu dikurangi, begitu pula jumlah Juru Lelang secara teoritis perlu dikurangi, namun menjadi tidak realistis, sehingga hal ini tidak perlu dilakukan. Jumlah nelayan dan bakul, jika memungkinkan dikurangi. Alat-alat yang digunakan seperti timbangan tidak perlu dikurangi, begitu pula jumlah gerobak. Di sisi lain, perlu menjaga kestabilan nilai raman dan meningkatkan *share omzet* sebesar 109,62 % dan 149,56 %.

Tabel 5.5
Peningkatan Efisiensi TPI Muarareja

	Input/Output	Actual	Target	Potential Improvement
Input	Pjng Pendaratan	150	15,02	-89,99 %
	Js Lt Lelang	60	13,54	-77,43 %
	Jml Kpl Bongkar	10	3,73	-62,71 %
	Jml Alat Tangkap	10	10	-0,00 %
	Jml Kapal	40	6,75	-83,13 %
	Jml Personal TPI	4	0,44	-89,054 %
	Jml Jr Lelang	1	0,08	-92,49 %
	Jml Jr Bongkar	2	0,26	-87,17 %
	Jml Nelayan	200	39,79	-80,11 %
	Jml Bakul	4	2,69	-32,75 %
	Jml Basket	1	1,00	0,00 %
	Jml Timbangan	1	0,99	-90,92 %
Jml Gerobak	2	0,14	-93,11 %	
Output	Nilai Raman (Rp 000)	139816	293084,183	109,62 %
	Share Omzet	0,02	0,05	149,26 %

Sumber : Perhitungan DEA dengan Banxia Frontier Analysis

5.2. Analisis Tingkat Keberdayaan

Analisis tingkat keberdayaan pengelola TPI dan KUD yang berjumlah 90 orang, didapatkan gambaran umum responden dan tingkat keberdayaannya sebagai berikut :

5.2.1. Gambaran Umum Responden

5.2.1.1. Jenis Kelamin

Responden tingkat keberdayaan terdiri dari kepala TPI, kepala Tata Usaha, Sekretaris, Bendahara, Juru Tulis, Juru Statistik, Kepala Teknis Pelelangan (untuk TPI Kelas I,II), sedangkan untuk TPI Kelas IV yang dijadikan responden adalah Kepala TPI, Juru Lelang, Kasir Bayar, Kasir Terima. Pengurus KUD Mina, yang dijadikan responden adalah Ketua/Manajer, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Kepala Bagian Unit Usaha.

Dari 90 responden, sebesar 94,4 . % adalah berjenis kelamin laki-laki, dan 5,6. % berjenis kelamin perempuan.

5.2.1.2. Umur

Berdasarkan umur responden, sebanyak 19 responden berusia 25 sampai 29 tahun (21 persen), responden yang berusia 30-34 tahun berjumlah 26 orang (29 persen), responden yang berusia 35 sampai 39 tahun berjumlah 13 orang (14 persen), sedangkan responden yang berusia 40 sampai 44 tahun berjumlah 16 orang (18 persen). Responden yang berusia 45 sampai 49 tahun sebanyak 9 orang (10 persen), yang berusia 50-54 tahun sebanyak 7 orang (7 %). Dari rincian

tersebut diketahui bahwa responden paling banyak terdapat pada usia 30 sampai 34 tahun. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5.6 .

Tabel 5.6
Responden Berdasarkan Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah	Frekuensi (%)
1	25-29	19	21
2	30-34	26	29
3	35-39	13	14
4	40-44	16	18
5	45-49	9	10
6	50-54	7	7
	Jumlah	90	100

5.2.1.3. Tingkat Pendidikan

Responden yang merupakan pengelola TPI dan KUD kebanyakan adalah Tamat SLTA, yaitu sebanyak 40 orang (44 %). Responden yang berpendidikan SD sebanyak 5 orang (5 persen), SMP sebanyak 35 orang (38 persen) dan Diploma 3 sebanyak 3 orang (3 persen), serta Sarjana 7 orang (7 persen). Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5.7.

Tabel 5.7
Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Kelompok Umur	Jumlah	Frekuensi (%)
1	Tidak Tamat SD	0	0
2	Tamat SD/ sederajat	5	0,05
3	Tamat SLTP	35	0,38
4	Tamat SLTA	40	0,44
5	Diploma 3	3	0,03
6	Sarjana	7	0,07
	Jumlah	90	100

5.2.2. Tingkat Keberdayaan

Dari hasil wawancara dengan responden tingkat keberdayaan pengelola TPI dan KUD di daerah penelitian, didapatkan hasil sebagai berikut :

5.2.2.1. Akses Dalam Meningkatkan Peran TPI/KUD

Untuk melihat keberdayaan pengelola dalam meningkatkan peran TPI/KUD dapat dilihat dari indikator (1)kemampuan pengelola menjalankan fungsi/peran TPI dalam mensejahterakan nelayan,(2)kemampuan pengelola menjalankan fungsi/peran TPI dalam menstabilkan harga (3) kemampuan pengelola menjalankan fungsi/peran TPI dalam meningkatkan PAD

Kemampuan pengelola dalam menjalankan tugas pokok organisasi akan membawa dampak pada kinerja Tempat Pelelangan Ikan. Kemampuan Pengelola TPI dan Pengurus KUD dalam menjalankan peran TPI untuk mensejahterakan nelayan dapat dilihat dalam tabel 5.8

Tabel 5.8
Akses Pengelola Dalam Menjalankan Fungsi / Peran TPI
Dalam Mensejahterakan Nelayan

No	Uraian	Prosentase
1	Pengelola TPI dan pengurus KUD sudah dapat menjadikan TPI sebagai organisasi yang dapat mensejahterakan nelayan	17,8
2	Pengelola TPI dan pengurus KUD belum dapat menjadikan TPI sebagai organisasi yang dapat mensejahterakan nelayan.	82,2
	Jumlah	100

Dari tabel 5.8 dapat dilihat bahwa 17,8 responden menjawab bahwa pengelola sudah dapat menjalankan fungsi TPI untuk mensejahterakan nelayan. Dari jawaban ini menunjukkan bahwa pengelola TPI dan pengurus KUD belum berdaya dalam menjalankan fungsinya. Hal ini disebabkan nelayan memang masih pada pihak yang lemah, terutama karena sistem pembayaran yang tidak bisa tunai, dan bahkan keterikatan nelayan pada sistem *patront client*, yang menyebabkan mereka berada pada lingkaran kemiskinan karena jeratan hutang yang tidak bisa terputus. Pengelola TPI tidak bisa berbuat apa-apa, ketika para nelayan ini belum menerima pembayaran dalam kurun waktu 2-10 hari sejak dilakukan lelang, dari para bakul. Sehingga, fungsi TPI dalam mensejahterakan nelayan, belum terlihat.

5.2.2.2. Akses Pengelola Dalam Meningkatkan Peran TPI/KUD Untuk Menstabilkan Harga

Maksud dan tujuan diadakannya Tempat Pelelangan Ikan salah satunya adalah mengusahakan terjadinya stabilitas harga ikan. Kemampuan pengelola TPI merupakan faktor penentu dalam mencapai tujuan tersebut. Indikator keberdayaan pengelola TPI didekati dengan kemampuan pengelola dalam meningkatkan peran TPI. Bagaimana kemampuan Pengelola Dalam Meningkatkan Peran TPI dalam menstabilkan harga dapat dilihat dalam Tabel 5.9.

Tabel 5.9

Akses Pengelola Dalam Meningkatkan Peran TPI Menstabilkan Harga

No	Uraian	Prosentase
1	Pengelola TPI, dan pengurus KUD sudah dapat menjadikan TPI berfungsi untuk menstabilkan harga	48,9
2	Pengelola TPI, dan pengurus KUD belum dapat menjadikan TPI berfungsi untuk menstabilkan harga	51,1
	Jumlah	100

Sumber : Data Primer Yang Diolah,2008

Dari tabel 5.9 dapat dilihat bahwa responden yang menjawab bahwa pengelola sudah dapat menjalankan fungsi TPI untuk menstabilkan harga sebanyak 48,9. Dari jawaban ini menunjukkan bahwa belum memenuhinya standart pengelola dianggap berdaya dalam menjalankan fungsinya. Harga terbentuk dari penawaran dan permintaan selama proses lelang. .

5.2.2.3. Akses Pengelola Dalam Meningkatkan Peran TPI/KUD Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang mempunyai peran yang penting bagi pembangunan suatu daerah. Pendapatan yang diperoleh dari TPI adalah sekian persen dari total raman yang diperoleh. Peran TPI untuk menarik nelayan melakukan lelang di TPI akan mempengaruhi nilai raman, yang pada akhirnya akan mempengaruhi retribusi yang diterima daerah. Oleh karena itu, bagaimana akses pengelola dalam meningkatkan Peran

TPI untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dijadikan salah satu indikator tingkat keberdayaan.

Tabel 5.10
Kemampuan Pengelola Dalam Meningkatkan Peran TPI Meningkatkan PAD

No	Uraian	Prosentase
1	Pengelola TPI sudah dapat menjadikan TPI sebagai organisasi yang dapat meningkatkan Pendapatan Daerah	38,9
2	Pengelola TPI belum dapat menjadikan TPI sebagai organisasi yang dapat meningkatkan Pendapatan Daerah	61,1
	Jumlah	100

Sumber : Data Primer Yang Diolah,2008

Dari tabel 5.7 dapat dilihat bahwa responden yang menjawab bahwa pengelola sudah dapat menjalankan fungsi TPI untuk meningkatkan PAD sebanyak 38,9. Dari jawaban ini menunjukkan bahwa belum memenuhinya standart pengelola dianggap berdaya dalam menjalankan fungsinya.

5.2.2.4. Akses Dalam Melakukan Kegiatan Sosial

Kegiatan sosial, merupakan aktivitas yang dilakukan untuk berinteraksi dengan manusia lain atau dengan masyarakat. Akses pengelola TPI dan pengurus KUD dalam melakukan kegiatan sosial dapat dilihat dalam tabel 5.11

Tabel 5.11
Aspek Sosial

No	Uraian	Prosentase
1	Keputusan dalam berorganisasi berdasarkan pertimbangan keluarga	43,3
2	Keputusan dalam berorganisasi tidak berdasarkan pertimbangan keluarga	56,7
	Jumlah	100

Sumber : Data Primer Yang Diolah,2008

Dari tabel 5.11 dapat dilihat bahwa responden yang menjawab bahwa keputusan organisasi tidak berdasarkan pertimbangan keluarga sebanyak 56,7 %, hal ini menunjukkan bahwa dari aspek sosial para pengelola TPI dan KUD ini sudah dapat mengambil keputusan yang menyangkut organisasi sosial yang diikutinya.

5.2.2.5. Akses Dalam Melakukan Kegiatan Lobi

Salah satu indikator untuk mengetahui tingkat keberdayaan pengelola TPI adalah bagaimana kemampuan lobi dari pengelola TPI/KUD dengan stakeholders (pemerintah, Dinas Perikanan dan kelautan, Pemda setempat) yang dapat membantu mengatasi permasalahan dan meningkatkan kinerja organisasi TPI/KUD. Indikator tersebut dapat dilihat dari indikator (1)punya atau tidaknya responden atas akses dengan seseorang atau kenalan dengan stakeholders; (2)pernah minta tolong atau tidak dengan stakeholders. Bila pernah minta tolong maka dianggap responden sudah pernah melakukan pendekatan atau lobi; (3)bila

permintaan tolong bisa berhasil maka dapat dipakai sebagai indikasi bahwa intensitas lobinya makin intens.

Berdasarkan ketiga pendekatan di atas, dapat dilihat bahwa pengelola TPI dan pengurus KUD ini mempunyai hubungan yang relatif luas dengan Pemda maupun Dinas terkait, dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten dan Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah. Hal ini karena memang para pengelola TPI adalah PNS dari Dinas Perikanan dan Kelautan.

Lobi yang dilakukan berupa usulan kegiatan yang dibuat berdasarkan kebutuhan dalam pengembangan TPI. Keberhasilan atas usulanyang dibuat ini tergantung dari dana ynyakang tersedia. Dari 25 lobi yang dilakukan, 10 berhasil disetujui, untuk usulan ke Pemda. Lobi yang dilakukan ke Dinas Perikanan dan Kelautan, sebanyak 11 dinyatakan berhasil. KUD Mina yang pengelolaannya dibawah Puskud Mina Baruna, 9 lobinya dinyatakan berhasil. Dari data ini dapat dilihat bahwa kemampuan lobi dari pengelola TPI dan pengurus KUD ini dapat disimpulkan relatif intens, karena banyak yang berhasil. Secara keseluruhan, akses untuk melakukan lobi dapat dilihat dalam tabel 5.12 berikut :

Tabel 5.12
Kemampuan Responden untuk Melakukan Lobi

Subyek	Punya		Pernah Minta Tolong		Berhasil	
	1=Ya	2=Tidak	1=Ya	2=Tidak	1=Ya	2=Tidak
Pemda	25	65	25	65	10	15
Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten dan Jawa Tengah	36	54	16	74	11	5
Tokoh Masyarakat	48	42	0	0	0	0
KUD/Puskud Mina Baruna	36	54	15	75	9	6
Lainnya	56	34				

Sumber : Data Primer, Diolah

Dari tabel 5.12 dapat dilihat bahwa responden yang sudah melakukan lobi dengan indikator punya kenalan, pernah minta tolong dan berhasil, jumlahnya masih relatif sedikit.

5.3. Strategi Pemberdayaan

Dengan memperhatikan secara keseluruhan lingkungan strategis TPI yang menjadi sampel, berdasarkan pendekatan SWOT dapat disusun faktor strategis eksternal (peluang dan ancaman) serta faktor strategis internal (kekuatan dan kelemahan). Setelah melalui proses pembobotan dan ranking dapat diketahui urutan kepentingan faktor-faktor tersebut, baik strategi internal maupun eksternal

5.3.1. TPI Klidang Lor

5.3.1.1. Analisis Faktor-faktor Strategi Eksternal (EFE) Untuk TPI Klidang Lor

Analisis Faktor-faktor Strategi Eksternal adalah sebuah analisis yang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor eksternal apa yang mempengaruhi dalam penentuan strategi pemberdayaan.

Tabel 5.13

Matriks Faktor Strategi Eksternal

Tempat Pelelangan Ikan Klidang Lor Kabupaten Batang

Faktor-faktor Strategi Eksternal	Bobot	Rating	Bobot x Rating	Kode
Peluang				
▪ Potensi perikanan masih tinggi	0,075	2,5	0,2	1.1
▪ Kebijakan Pemerintah Yang Mendukung	0,175	2	0,35	1.2
▪ Pembangunan perikanan merupakan Pendukung Ketahanan Pangan	0,075	2,5	0,175	1.3
▪ Meningkatnya Konsumsi Ikan	0,05	2,5	0,125	1.4
▪ Bertambah baiknya teknologi	0,075	1,5	0,1	1.5
Ancaman				
▪ Menurunnya ekosistem	0,15	3,5	0,525	2.1
▪ Iklim dan Cuaca Yang Buruk Akibat Pemanasan Global	0,175	4	0,7	2.2
▪ Lemahnya kerangka hukum dalam hal pengaturan dan perangkat hukum untuk penegakannya	0,1	3,5	0,35	2.3
▪ Masuknya Pemodal Besar yang melakukan transaksi di luar TPI	0,075	2,5	0,175	2.4
▪ Adanya perbedaan kepentingan Yang Dapat Menurus Ke Konflik Kepentingan Antar Alat, Sektor dan Regional.	0,05	2,5	0,125	2.5
Total	1,0		2,825	

Sumber : Hasil Analisis Yang Dikembangkan untuk Penelitian ini

5.3.1.2 Analisis Faktor-faktor Strategi Internal (IFE) TPI Klidang Lor

Analisis Faktor-faktor Strategi Internal adalah sebuah analisis yang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor internal apa yang mempengaruhi dalam penentuan strategi pemberdayaan.

Tabel 5.14
Analisis Faktor Strategi Internal (IFE)
TPI Klidang Lor Kabupaten Batang

Faktor-faktor Strategi Internal	Bobot	Rating	Bobot x Rating	Kode
Kekuatan				
▪ Pengalaman Kepala TPI/ Manajer KUD	0,125	3	0,375	3.1
▪ Hubungan Yang baik dengan SDM yang ada	0,075	3	0,225	3.2
▪ Memiliki Orientasi yang luas	0,075	2,5	0,175	3.3
▪ Integrasi Vertikal /lobi dengan Stakeholder	0,075	2,5	0,175	3.4
▪ Budaya dan kualitas organisasi dalam memahami visi dan misi	0,1	3	0,3	3.5
Kelemahan				
▪ Pelaksanaan /Proses Pelelangan Ikan	0,1	2,5	0,25	4.1
▪ Dukungan/Kondisi Keuangan TPI/KUD	0,1	3	0,3	4.2
▪ Fasilitas Infrastruktur	0,1	3	0,3	4.3
▪ Kualitas SDM yang rendah	0,075	3	0,25	4.4
▪ Lemahnya koordinasi antar karyawan	0,05	2	0,1	4.5
▪ Rendahnya upah/gaji yang diterima pengelola	0,125	▪ 1	0,125	4.6.
Total	1,0		2,575	

Sumber : Hasil Analisis Yang Dikembangkan untuk Penelitian ini

5.3.1.3 Matriks Analisis SWOT

Dengan memperhatikan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman), maka dapat disusun analisis SWOT yang menjadi arahan penyusunan rencana strategi pemberdayaan , yang dapat dilihat dalam tabel 5.15.

Tabel 5.15
Matriks Analisis SWOT

IFE	Kekuatan	Kelemahan
	1. Pengalaman Kepala TPI/ Manajer KUD	1.Pelaksanaan /Proses Pelelangan Ikan
	2. Hubungan Yang baik dengan SDM yang ada	2.Dukungan/Kondisi Keuangan TPI/KUD
	3. Memiliki Orientasi yang luas	3.Fasilitas Infrastruktur
	4. Integrasi Vertikal /lobi dengan Stakeholder	4.Kualitas SDM yang rendah
	5. Budaya dan kualitas organisasi dalam memahami visi dan misi	5.Lemahnya koordinasi antar karyawan
EFE		
Peluang	Strategi S-O	Strategi W-O
1.Potensi perikanan masih tinggi		
2.Kebijakan Pemerintah Yang Mendukung		
3.Pembangunan perikanan merupakan Pendukung Ketahanan Pangan		
4.Meningkatnya Konsumsi Ikan		
5.Meningkatnya teknologi yang digunakan		
Ancaman		
1.Menurunnya ekosistem		
2.Iklm cuaca yang buruk karena pemanasan global		
3.Lemahnya kerangka hukum dalam hal pengaturan dan		

IFE	Kekuatan	Kelemahan
perangkat hukum untuk penegakannya	Strategi S-T	Strategi W-T
4. Masuknya Pemodal Besar yang melakukan transaksi di luar TPI		
5. Iklim dan Cuaca Yang Buruk karena Pemanasan Global		

Dalam analisis matriks SWOT ini dapat dibuat empat bentuk strategi, yaitu : (1) Strategi Kekuatan-Peluang (Strategi S-O). Strategi ini adalah upaya perencanaan memanfaatkan unsur-unsur kekuatan yang dimiliki untuk sebesar-besarnya menangkap peluang yang ada; (2) Strategi Kekuatan-Ancaman (Strategi S-T) adalah upaya perencanaan memanfaatkan unsur-unsur kekuatan yang dimiliki untuk memperkecil dan bila mungkin menghilangkan ancaman yang akan dihadapi ; (3) Strategi Kelemahan –Peluang (Strategi W-O) adalah strategi yang disusun dalam upaya menyusun perencanaan untuk meminimalkan kelemahan yang dimiliki untuk menangkap peluang yang ada ; (4) Strategi Kelemahan-Ancaman (Strategi W-T) yaitu strategi dalam upaya menyusun perencanaan untuk meminimalkan kelemahan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman yang akan datang.

Dari butir- butir kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang telah disusun di atas, dapat disusun rencana strategi dan keempat strategi di atas ditampilkan pada Tabel 5.16

Tabel 5.16
Rencana Strategi Dalam Analisis SWOT
Untuk Penentuan Strategi Pemberdayaan

No	Strategi	Pembobotan	Total	Prioritas
I	Strategi S-O			
1.1	Meningkatkan peran TPI dengan memperbaiki infrastruktur	$3.1 + 3.4 + 3.5 + 1.2 + 1.4 = 0,375 + 0,175 + 0,3 + 0,35 + 0,125 = 1,325$	1,325	10
1.2	Meningkatkan kinerja organisasi untuk mendukung Program Pembangunan Perikanan	$3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 1.2 + 1.3 + 1.4 = 0,375 + 0,225 + 0,175 + 0,3 + 0,35 + 0,175 + 0,125 = 1,725$	1,725	4
1.3	Penyiapan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional	$3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 1.2 = 0,375 + 0,225 + 0,175 + 0,3 + 0,35 = 1,425$	1,425	7
II	Strategi S – T			
2.1	Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder yang terkait untuk penegakan hukum	$3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 2.3 = 0,375 + 0,225 + 0,175 + 0,175 + 0,3 + 0,35 = 1,6$	1,6	5
2.2	Mematuhi Rencana Tata Ruang Pesisir yang ada untuk meminimalkan kerusakan ekosistem	$2.1 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 = 0,525 + 0,375 + 0,225 + 0,175 + 0,175 = 2,15$	2,15	1
2.3	Menjalin kerjasama dengan Lembaga Keuangan Untuk Mengatasi KPLI (Kekurangan Pembayaran Lelang Ikan)	$3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 2.3 + 2.4 = 0,375 + 0,225 + 0,175 + 0,175 + 0,3 + 0,35 + 0,175 = 1,775$	1,775	2
III	Strategi W – O			
3.1.	Meningkatkan kualitas pelaksanaan lelang untuk menarik bakul/juragan dan perusahaan agrobisnis perikanan membeli ikan di TPI	$1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 4.1 + 4.2 + 4.4 = 0,2 + 0,35 + 0,175 + 0,125 + 0,1 + 0,25 + 0,3 + 0,25 = 1,75$	1,75	3
3.2	Mengoptimalkan peran KUD	$1.1 + 1.2 + 1.5 + 4.1 + 4.2 + 4.3 = 0,2 + 0,35 + 0,1 + 0,25 + 0,3 + 0,3 = 1,4$	1,4	8
3.3	Meningkatkan kualitas	$1.2 + 1.3 + 4.2 = 0,2 + 0,175 +$	0,675	12

No	Strategi	Pembobotan	Total	Prioritas
	SDM dengan dukungan program yang tepat	$0,3=0,675$		
IV	Strategi W – T			
4.1	Meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan kinerja TPI	$4.1+4.2+4.3+2.3+2.4=0,25+0,3+0,3+0,35+0,175=1,375$	1,375	9
4.2	Meningkatkan koordinasi dan akses ke stakeholder untuk mendukung keuangan TPI	$4.1 + 4.2 + 4.3 + 2.3 + 2.4 + 2.5 = 0,25+0,3+0,3+0,35+0,175+0,125=1,5$	1,5	6
4.3	Meningkatkan peran serta pengelola untuk mendukung proses lelang sesuai dengan maksus dan tujuan TPI	$4.1 + 4.3 + 2.3 + 2.5 = 0,25+0,3+0,35+0,125=$	1,025	11

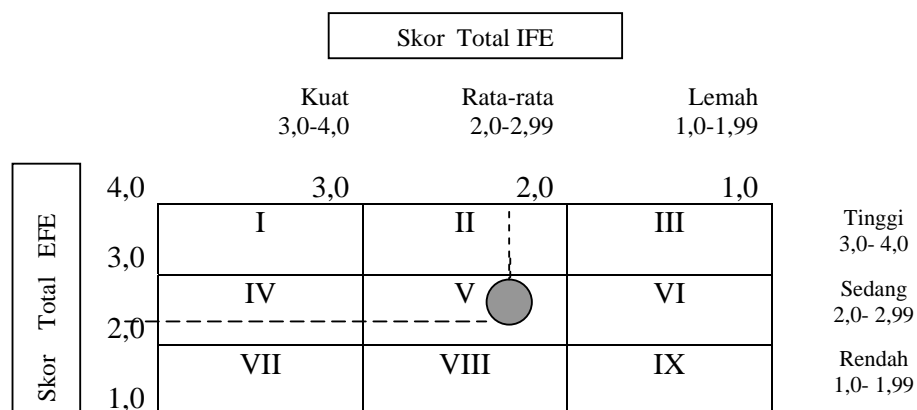
Berdasarkan matrik SWOT di atas diperoleh ranking yang menunjukkan skala prioritas strategi yang harus disiapkan dalam pemberdayaan pengelolaan TPI Klidang Lor .

Prioritas *pertama* adalah mematuhi Rencana Tata Ruang Pesisir yang ada untuk meminimalkan kerusakan ekosistem, yang *kedua* adalah Menjalin kerjasama dengan Lembaga Keuangan Untuk Mengatasi KPLI (Kekurangan Pembayaran Lelang Ikan) *Ketiga*, prioritas yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan lelang untuk menarik bakul/juragan dan perusahaan agrobisnis perikanan membeli ikan di TPI

5.3.1.4 Matriks Internal Eksternal

Dengan menggunakan hasil evaluasi dari matriks IFE dan EFE, matriks IE dapat dikerjakan. Sumbu horisontal Matriks IE adalah skor total IFE 2,575

sedangkan sumbu vertikal adalah skor total EFE yaitu 2,8 Posisi yang tepat adalah berada pada sel V



Keterangan :

 : Posisi

Matriks IE memiliki tiga implikasi strategi yang berbeda, yaitu :lah

1. Sel I,II dan IV dapat digambarkan sebagai *Grow* dan *Build*. Strategi yang cocok adalah strategi intensif, seperti *Market Penetration*, *Market Development* atau *Strategi terintegrasi* seperti *Backward Integration*, *Forward Integration* dan *Horizontal Integration*.
2. Sel III, V dan VII paling baik dikendalikan dengan *Hold* dan *Maintain*.Strategi umum yang dipakai adalah *Market Penetration* dan *Product Development*

3. Sel VI, VII atau IX dapat menggunakan strategi *Harvest* atau *Divestiture*.

Posisi TPI Klidang Lor (dan KUD) sekarang adalah pada posisi V. Pada posisi ini kondisi internal yang akan mempengaruhi strategi pemberdayaan dalam pengelolaan TPI masuk dalam katagori rata-rata (sedang). Skor EFE adalah 2,825, hal ini menunjukkan bahwa faktor eksternal baik yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap peluang dan ancaman memiliki posisi rata-rata (sedang).

Berdasarkan posisi ini, strategi yang cocok untuk diterapkan adalah strategi yang intensif. Tempat Pelelangan Ikan merupakan unit kegiatan yang memerlukan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pelelangan ikan.

Dari hasil analisis di atas, beberapa hal yang relevan dengan penelitian yang terdahulu adalah penelitian ini melengkapi dan menemukan beberapa hal yang baru. Penelitian yang terdahulu, meneliti tingkat efisiensi saja atau tingkat keberdayaan saja. Penelitian ini dilakukan lebih menyeluruh, melihat efisinesi dari TPI, dan tingkat keberdayaan pengelola serta strategi yang dapat diterapkan.

Penelitian yang sudah pernah dilakukan, terkait dengan tingkat efisiensi TPI, bisa dijadikan sebagai pembanding untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan atau penurunan kinerja.

5.3.2. TPI Tanjungsari

5.3.2.1. Analisis Faktor-faktor Strategi Eksternal (EFE) Untuk TPI Tanjung

Sari Kabupaten Pemalang

Analisis Faktor-faktor Strategi Eksternal adalah sebuah analisis yang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor eksternal apa yang mempengaruhi dalam penentuan strategi pemberdayaan.

Tabel 5.17
Matriks Faktor Strategi Eksternal
Tempat Pelelangan Ikan Tanjungsari Kabupaten Pemalang

Faktor-faktor Strategi Eksternal	Bobot	Rating	Bobot x Rating	Kode
Peluang				
▪ Potensi perikanan masih tinggi	0,1	2,5	0,25	1.1
▪ Kebijakan Pemerintah Yang Mendukung	0,125	2	0,25	1.2
▪ Pembangunan perikanan merupakan Pendukung Ketahanan Pangan	0,05	3,5	0,175	1.3
▪ Meningkatnya Konsumsi Ikan	0,05	3	0,15	1.4
▪ Bertambah baiknya teknologi	0,1	1,5	0,15	1.5
Ancaman				
▪ Menurunnya ekosistem	0,175	3,5	0,625	2.1
▪ Iklim dan Cuaca Yang Buruk Akibat Pemanasan Global	0,15	3,5	0,525	2.2
▪ Lemahnya kerangka hukum dalam hal pengaturan dan perangkat hukum untuk penegakannya	0,1	3	0,3	2.3
▪ Masuknya Pemodal Besar yang melakukan transaksi di luar TPI	0,075	2	0,15	2.4
▪ Adanya perbedaan kepentingan Yang Dapat Menurus Ke Konflik Kepentingan Antar Alat, Sektor dan Regional.	0,075	3	0,225	2.5
Total	1,0		2,8	

Sumber : Hasil Analisis Yang Dikembangkan untuk Penelitian ini

5.3.2.2. Analisis Faktor-faktor Strategi Internal (IFE)

Analisis Faktor-faktor Strategi Internal adalah sebuah analisis yang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor internal apa yang mempengaruhi dalam penentuan strategi pemberdayaan.

Tabel 5.18
Analisis Faktor Strategi Internal (IFE)
Tempat Pelelangan Ikan Tanjung Sari

Faktor-faktor Strategi Internal	Bobot	Rating	Bobot x Rating	Kode
Kekuatan				
▪ Pengalaman Kepala TPI/ Manajer KUD	0,175	2,5	0,425	3.1
▪ Hubungan Yang baik dengan SDM yang ada	0,05	2,5	0,125	3.2
▪ Memiliki Orientasi yang luas	0,1	2,5	0,25	3.3
▪ Integrasi Vertikal /lobi dengan Stakeholder	0,05	3	0,15	3.4
▪ Budaya dan kualitas organisasi dalam memahami visi dan misi	0,1	3	0,3	3.5
Kelemahan				
▪ Pelaksanaan /Proses Pelelangan Ikan	0,125	2	0,25	4.1
▪ Dukungan/Kondisi Keuangan TPI/KUD	0,1	1	0,1	4.2
▪ Fasilitas Infrastruktur	0,1	3	0,3	4.3
▪ Kualitas SDM yang rendah	0,05	2	0,1	4.4
▪ Lemahnya koordinasi antar karyawan	0,05	2	0,1	4.5
▪ Rendahnya upah/gaji yang diterima pengelola	0,1	1	2,2	4.6.
Total	1,0		2,62	

Sumber : Hasil Analisis Yang Dikembangkan untuk Penelitian ini

5.3.2.3. Matriks Analisis SWOT

Dengan memperhatikan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman), maka dapat disusun analisis SWOT yang menjadi arahan penyusunan rencana strategi pemberdayaan , yang dapat dilihat dalam tabel 5.19.

Tabel 5.19
Rencana Strategi Dalam Analisis SWOT
Untuk Penentuan Strategi Pemberdayaan TPI Tangungsari

No	Strategi	Pembobotan	Total	Prioritas
I	Strategi S-O			
1.1	Meningkatkan peran TPI dengan memperbaiki infrastruktur	$3.1 + 3.4 + 3.5 + 1.2 + 1.4 = 0,425 + 0,15 + 0,3 + 0,25 + 0,15 = 1,275$	1,275	5
1.2	Meningkatkan kinerja organisasi untuk mendukung Program Pembangunan Perikanan	$3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 1.2 + 1.3 + 1.4 = 0,425 + 0,125 + 0,25 + 0,3 + 0,25 + 0,15 = 1,5$	1,5	4
1.3	Penyiapan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional	$3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 1.2 = 0,425 + 0,125 + 0,25 + 0,3 + 0,25 = 1,35$	1,35	8
II	Strategi S -T			
2.1	Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder yang terkait untuk penegakan hukum	$3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 2.3 = 0,425 + 0,125 + 0,25 + 0,15 + 0,3 + 0,3 = 1,55$	1,55	2
2.2	Mematuhi Rencana Tata Ruang Pesisir yang ada untuk meminimalkan kerusakan ekosistem	$2.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 = 0,625 + 0,125 + 0,25 + 0,15 + 0,3 = 2,4$	1,45	6
2.3	Menjalin kerjasama dengan Lembaga	$3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 2.3 + 2.4 = 0,425 + 0,125 + 0,25$	1,7	1

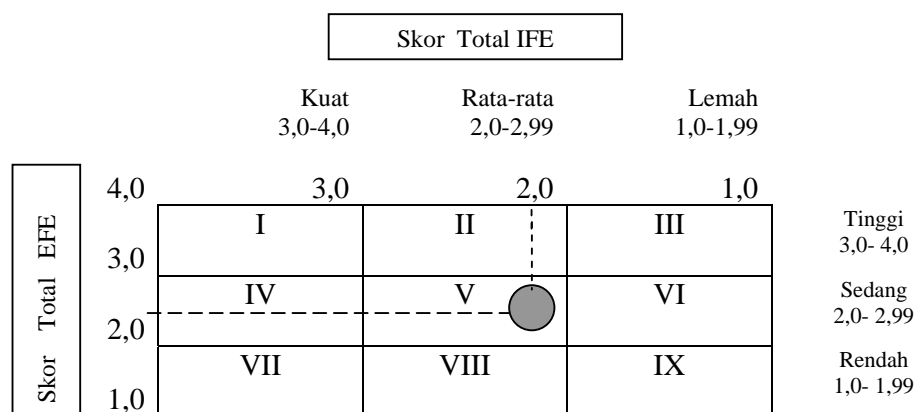
No	Strategi	Pembobotan	Total	Prioritas
	Keuangan Untuk Mengatasi KPLI (Kekurangan Pembayaran lelang Ikan)	$+0,15+0,3+0,3+0,15= 1,7$		
III	Strategi W – O			
3.1.	Meningkatkan kualitas pelaksanaan lelang untuk menarik bakul/juragan dan perusahaan agrobisnis perikanan membeli ikan di TPI	$1.1+1.2.+1.3+1.4+1.5+4.1+4.2+4.4=0,25+0,25+0,175+0,15+0,15+0,25+0,1+0,1= 1,425$	1,425	7
3.2	Mengoptimalkan peran KUD	$1.1+1.2+1.5+4.1+4.2+4.3=0,25+0,25+0,15+0,25+0,1+0,1=1,1$	1,1	9
3.3	Meningkatkan kualitas SDM dengan dukungan program yang tepat	$1.2 +1.3+4.2=0,25+0,175+0,1=0,55$	0,525	12
IV	Strategi W – T			
4.1	Meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan kinerja TPI	$4.1+4.2+4.3+2.3+2.4=0,25+0,1+0,3+0,525+0,15=1,025$	1,025	11
4.2	Meningkatkan koordinasi dan akses ke stakeholder untuk mendukung keuangan TPI	$4.1 + 4.2 +4.3 + 2.3 + 2.4 + 2.5=0,25+0,1+0,3+0,3+0,15+0,225=1,55$	1,55	3
4.3	Meningkatkan peran serta pengelola untuk mendukung proses lelang sesuai dengan maksus dan tujuan TPI	$4.1+4.3+2.3+2.5=0,25+0,3+0,3+0,225=$	1,075	10

Berdasarkan matrik SWOT di atas diperoleh ranking yang menunjukkan skala prioritas strategi yang harus disiapkan dalam pemberdayaan pengelolaan TPI Tanjungsari (dan KUD Miyoso Sari).

Prioritas *pertama* adalah menjalin kerjasama dengan Lembaga Keuangan untuk mengatasi KPLI (Kekurangan Pembayaran Lelang Ikan), *kedua* melaksanakan koordinasi dengan stakeholder yang terkait untuk penegakan hukum *Ketiga*, prioritas yang harus dilakukan meningkatkan koordinasi dan akses ke stakeholder untuk mendukung keuangan TPI

5.3.2.4. Matriks Internal Eksternal

Dengan menggunakan hasil evaluasi dari matriks IFE dan EFE, matriks IE dapat dikerjakan. Sumbu horisontal Matriks IE adalah skor total IFE 2,62 sedangkan sumbu vertikal adalah skor total EFE yaitu 2,8. Posisi yang tepat adalah berada pada sel V



Keterangan :

 : Posisi

Posisi TPI Tanjungsari adalah pada posisi V. Pada posisi ini kondisi internal yang akan mempengaruhi strategi pemberdayaan dalam pengelolaan TPI masuk dalam katagori rata-rata (sedang). Skor EFE adalah 2,8, hal ini menunjukkan bahwa faktor eksternal baik yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap peluang dan ancaman memiliki posisi yang sedang.

Berdasarkan posisi ini, strategi yang cocok untuk diterapkan adalah strategi yang *market penetration* dan *product development* . Tempat Pelelangan Ikan merupakan unit kegiatan yang memerlukan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pelelangan ikan.

5.3.3. TPI Wonokerto

5.3.3.1. Analisis Faktor Eksternal

Analisis Faktor-faktor Strategi Eksternal adalah sebuah analisis yang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor eksternal apa yang mempengaruhi dalam penentuan strategi pemberdayaan.

Tabel 5.20
Matriks Faktor Strategi Eksternal
Tempat Pelelangan Ikan Wonokerto Kabupaten Pekalongan

Faktor-faktor Strategi Eksternal	Bobot	Rating	Bobot x Rating	Kode
Peluang				
▪ Potensi perikanan masih tinggi	0.1	3	0.3	1.1
▪ Kebijakan Pemerintah Yang Mendukung	0.15	2	0.3	1.2
▪ Pembangunan perikanan merupakan Pendukung Ketahanan Pangan	0.05	3	0.15	1.3
▪ Meningkatnya Konsumsi Ikan	0.05	3	0.15	1.4
▪ Bertambah baiknya teknologi	0.1	1	0.1	1.5
Ancaman				
▪ Menurunnya ekosistem	0.2	4	0.8	2.1
▪ Iklim dan Cuaca Yang Buruk Akibat Pemanasan Global	0.15	1. 4	0.6	2.2
▪ Lemahnya kerangka hukum dalam hal pengaturan dan perangkat hukum untuk penegakannya	0.1	4	0.4	2.3
▪ Masuknya Pemodal Besar yang melakukan transaksi di luar TPI	0.05	2	0.1	2.4
2. Adanya perbedaan kepentingan Yang Dapat Menurus Ke Konflik Kepentingan Antar Alat, Sektor dan Regional.	0.05	3	0.15	2.5
Total	1		3.05	

Sumber : Hasil Analisis Yang Dikembangkan untuk Penelitian ini

5.3.3.2. Analisis Faktor-faktor Strategi Internal (IFE)

Analisis Faktor-faktor Strategi Internal adalah sebuah analisis yang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor internal apa yang mempengaruhi dalam penentuan strategi pemberdayaan.

Tabel 5.21
Analisis Faktor Strategi Internal (IFE)
TPI Wonokerto

Faktor-faktor Strategi Internal	Bobot	Rating	Bobot x Rating	Kode
Kekuatan				
▪ Pengalaman Kepala TPI/ Manajer KUD	0.15	4	0.6	3.1
▪ Hubungan Yang baik dengan SDM yang ada	0.1	3	0.3	3.2
▪ Memiliki Orientasi yang luas	0.1	2	0.2	3.3
▪ Integrasi Vertikal /lobi dengan Stakeholder	0.05	3	0.15	3.4
▪ Budaya dan kualitas organisasi dalam memahami visi dan misi	0.1	3	0.3	3.5
Kelemahan				
▪ Pelaksanaan /Proses Pelelangan Ikan	0.1	3	0.3	4.1
▪ Dukungan/Kondisi Keuangan TPI/KUD	0.1	3	0.3	4.2
▪ Fasilitas Infrastruktur	0.1	2	0.2	4.3
▪ Kualitas SDM yang rendah	0.05	2	0.1	4.4
▪ Lemahnya koordinasi antar karyawan	0.05	2	0.1	4.5
▪ Rendahnya upah/gaji yang diterima pengelola	0.1	1	0.1	4.6
Total	1,0		2.65	

Sumber : Hasil Analisis Yang Dikembangkan untuk Penelitian ini

5.3.3.3. Matriks Analisis SWOT

Dari butir- butir kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang telah disusun di atas, dapat disusun rencana strategi dan keempat strategi di atas ditampilkan pada Tabel 5.22

Tabel 5.22
Rencana Strategi Dalam Analisis SWOT
Untuk Penentuan Strategi Pemberdayaan di TPI Wonokerto

No	Strategi	Pembobotan	Total	Prioritas
I	Strategi S-O			
1.1	Meningkatkan peran TPI dengan memperbaiki infrastruktur	$3.1 + 3.4 + 3.5 + 1.2 + 1.4 = 0,6 + 0,15 + 0,3 + 0,3 + 0,15 = 1,5$	1,5	8
1.2	Meningkatkan kinerja organisasi untuk mendukung Program Pembangunan Perikanan	$3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 1.2 + 1.3 + 1.4 = 0,6 + 0,3 + 0,2 + 0,3 + 0,3 + 0,15 = 1,85$	1,85	3
1.3	Penyiapan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional	$3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 1.2 = 0,6 + 0,3 + 0,2 + 0,3 + 0,3 = 1,7$	1,7	6
II	Strategi S – T			
2.1	Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder yang terkait untuk penegakan hukum	$3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 2.3 = 0,6 + 0,3 + 0,2 + 0,15 + 0,3 + 0,4 = 1,95$	1,95	2
2.2	Mematuhi Rencana Tata Ruang Pesisir yang ada untuk meminimalkan kerusakan ekosistem	$2.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 = 0,8 + 0,3 + 0,2 + 0,15 + 0,3 = 2,95$	1,75	4
2.3	Menjalin kerjasama dengan Lembaga Keuangan Untuk Mengatasi KPLI (Kekurangan Pembayaran lelang Ikan)	$3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 2.3 + 2.4 = 0,6 + 0,3 + 0,2 + 0,15 + 0,3 + 0,4 + 0,1 = 2,05$	2,05	1
III	Strategi W – O			
3.1.	Meningkatkan kualitas pelaksanaan lelang untuk menarik bakul/juragan dan	$1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 4.1 + 4.2 + 4.4 = 0,3 + 0,3 + 0,15 + 0,15 + 0,1 + 0,3 + 0,3 + 0,1 = 1,7$	1,7	5

No	Strategi	Pembobotan	Total	Prioritas
	perusahaan agrobisnis perikanan membeli ikan di TPI			
3.2	Mengoptimalkan peran KUD	$1.1+1.2+1.5+4.1+4.2+4.3=0,3+0,3+0,1+0,3+0,3+0,2=1,5$	1,5	7
3.3	Meningkatkan kualitas SDM dengan dukungan program yang tepat	$1.2+1.3+4.2=0,3+0,15+0,3=0,75$	0,75	12
IV	Strategi W – T			
4.1	Meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan kinerja TPI	$4.1+4.2+4.3+2.3+2.4=0,3+0,3+0,2+0,4+0,1=1,3$	1,3	10
4.2	Meningkatkan koordinasi dan akses ke stakeholder untuk mendukung keuangan TPI	$4.1 + 4.2 + 4.3 + 2.3 + 2.4 + 2.5 = 0,3+0,3+0,2+0,4+0,1+0,15=1,45$	1,45	9
4.3	Meningkatkan peran serta pengelola untuk mendukung proses lelang sesuai dengan maksus dan tujuan TPI	$4.1+4.3+2.3+2.5=0,3+0,2+0,4+0,15=1,05$	1,05	11

Berdasarkan matrik SWOT di atas diperoleh ranking yang menunjukkan skala prioritas strategi yang harus disiapkan dalam pemberdayaan pengelolaan TPI Wonokerto

Prioritas *pertama* adalah menjalin kerjasama dengan Lembaga Keuangan untuk mengatasi KPLI (Kekurangan Pembayaran Lelang Ikan), yang *kedua* melaksanakan koordinasi dengan stakeholder yang terkait untuk penegakan hukum *Ketiga*, meningkatkan kinerja organisasi untuk mendukung Program Pembangunan Perikanan

5.3.3.4. Matriks Internal Eksternal

Dengan menggunakan hasil evaluasi dari matriks IFE dan EFE, matriks IE dapat dikerjakan. Sumbu horisontal Matriks IE adalah skor total IFE 2,65 sedangkan sumbu vertikal adalah skor total EFE yaitu 3,05. Posisi yang tepat adalah berada pada sel II.

		Skor Total IFE				
		Kuat 3,0-4,0	Rata-rata 2,0-2,99	Lemah 1,0-1,99		
Skor Total EFE	4,0	3,0	2,0	1,0	Tinggi 3,0- 4,0	
	3,0	I	II	III		
	2,0	IV	V	VI		Sedang 2,0- 2,99
	1,0	VII	VIII	IX		Rendah 1,0- 1,99

Keterangan :

 : Posisi

Posisi TPI dan KUD sekarang adalah pada posisi II. Pada posisi ini kondisi internal yang akan mempengaruhi strategi pemberdayaan dalam pengelolaan TPI masuk dalam katagori rata-rata (sedang). Skor EFE adalah 3,05, hal ini menunjukkan bahwa faktor eksternal baik yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap peluang dan ancaman memiliki posisi yang tinggi.

Berdasarkan posisi ini, strategi yang cocok untuk diterapkan adalah strategi yang intensif. Tempat Pelelangan Ikan merupakan unit kegiatan yang

memerlukan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pelelangan ikan.

5.3.4. TPI Ketapang

5.3.1. Analisis Faktor-faktor Strategi Eksternal (EFE) Untuk TPI Ketapang Kabupaten Pematang

Analisis Faktor-faktor Strategi Eksternal adalah sebuah analisis yang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor eksternal apa yang mempengaruhi dalam penentuan strategi pemberdayaan.

Tabel 5.23
Matriks Faktor Strategi Eksternal
Tempat Pelelangan Ikan Ketapang Kabupaten Pemalang

Faktor-faktor Strategi Eksternal	Bobot	Rating	Bobot x Rating	Kode
Peluang				
▪ Potensi perikanan masih tinggi	0.1	3	0.3	1.1
▪ Kebijakan Pemerintah Yang Mendukung	0.15	2	0.3	1.2
▪ Pembangunan perikanan merupakan Pendukung Ketahanan Pangan	0.05	3	0.15	1.3
▪ Meningkatnya Konsumsi Ikan	0.05	3	0.15	1.4
▪ Bertambah baiknya teknologi	0.1	1	0.1	1.5
Ancaman				
▪ Menurunnya ekosistem	0.2	2	0.4	2.1
▪ Iklim dan Cuaca Yang Buruk Akibat Pemanasan Global	0.15	4	0.6	2.2
▪ Lemahnya kerangka hukum dalam hal pengaturan dan perangkat hukum untuk penegakannya	0.1	2	0.2	2.3
▪ Masuknya Pemodal Besar yang melakukan transaksi di luar TPI	0.05	4	0.2	2.4
▪ Adanya perbedaan kepentingan Yang Dapat Menurus Ke Konflik Kepentingan Antar Alat, Sektor dan Regional.	0.05	3	0.15	2.5
Total	1		2.55	

Sumber : Hasil Analisis Yang Dikembangkan untuk Penelitian ini

5.3.2. Analisis Faktor-faktor Strategi Internal (IFE)

Analisis Faktor-faktor Strategi Internal adalah sebuah analisis yang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor internal apa yang mempengaruhi dalam penentuan strategi pemberdayaan.

Tabel 5.24
 Analisis Faktor Strategi Internal (IFE)
 TPI Ketapang Kabupaten Pemalang

Faktor-faktor Strategi Internal	Bobot	Rating	Bobot x Rating	Kode
Kekuatan				
▪ Pengalaman Kepala TPI/ Manajer KUD	0.15	3	0.45	3.1
▪ Hubungan Yang baik dengan SDM yang ada	0.1	3	0.3	3.2
▪ Memiliki Orientasi yang luas	0.1	2	0.2	3.3
▪ Integrasi Vertikal /lobi dengan Stakeholder	0.05	3	0.15	3.4
▪ Budaya dan kualitas organisasi dalam memahami visi dan misi	0.1	3	0.3	3.5
Kelemahan				
▪ Pelaksanaan /Proses Pelelangan Ikan	0.1	3	0.3	4.1
▪ Dukungan/Kondisi Keuangan TPI/KUD	0.1	4	0.4	4.2
▪ Fasilitas Infrastruktur	0.1	3	0.3	4.3
▪ Kualitas SDM yang rendah	0.05	2	0.1	4.4
▪ Lemahnya koordinasi antar karyawan	0.05	2	0.1	4.5
▪ Rendahnya upah/gaji yang diterima pengelola	0.1	1	0.1	4.6.
Total	1		2.7	

Sumber : Hasil Analisis Yang Dikembangkan untuk Penelitian ini

5.3.3. Matriks Analisis SWOT

Dalam analisis matriks SWOT ini dapat dibuat empat bentuk strategi, yaitu :(1) Strategi Kekuatan-Peluang (Strategi S-O). Strategi ini adalah upaya perencanaan memanfaatkan unsur-unsur kekuatan yang dimiliki untuk sebesar-besarnya menangkap peluang yang ada; (2) Strategi Kekuatan-Ancaman (Strategi S-T) adalah upaya perencanaan memanfaatkan unsur-unsur kekuatan yang

dimiliki untuk memperkecil dan bila mungkin menghilangkan ancaman yang akan dihadapi ; (3) Strategi Kelemahan –Peluang (Strategi W-O) adalah strategi yang disusun dalam upaya menyusun perencanaan untuk meminimalkan kelemahan yang dimiliki untuk menangkap peluang yang ada ; (4) Strategi Kelemahan-Ancaman (Strategi W-T) yaitu strategi dalam upaya menyusun perencanaan untuk meminimalkan kelemahan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman yang akan datang.

Dari butir- butir kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang telah disusun di atas, dapat disusun rencana strategi dan keempat strategi di atas ditampilkan pada Tabel 5.25

Tabel 5.25
Rencana Strategi Dalam Analisis SWOT
Untuk Penentuan Strategi Pemberdayaan TPI Ketapang

No	Strategi	Pembobotan	Total	Prioritas
I	Strategi S-O			
1.1	Meningkatkan peran TPI dengan memperbaiki infrastruktur	$3.1+3.4+3.5+1.2+1.4=0,45+0,15+0,3+0,3+0,15=1,35$	1,35	9
1.2	Meningkatkan kinerja organisasi untuk mendukung Program Pembangunan Perikanan	$3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 1.2 + 1.3+1.4=0,45+0,3+0,2+0,3+0,2+0,15=1,6$	1,6	5
1.3	Penyiapan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional	$3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 1.2=0,45+0,3+0,2+0,3=1,25$	1,25	10
II	Strategi S –T			
2.1	Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder yang	$3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4+3.5 + 2.3=0,45+0,3+0,2+0,15+0,3+0,2=1,6$	1,6	4

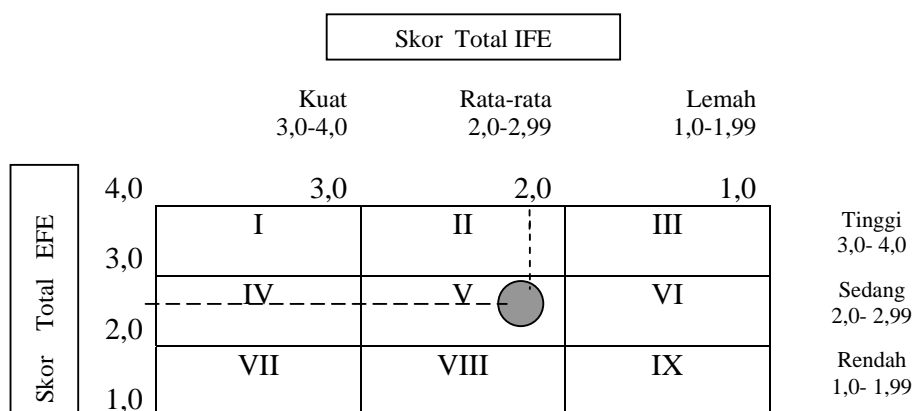
No	Strategi	Pembobotan	Total	Prioritas
	terkait untuk penegakan hukum			
2.2	Mematuhi Rencana Tata Ruang Pesisir yang ada untuk meminimalkan kerusakan ekosistem	$2.1+3.2+3.3+3.4+3.5=0,4+0,45+0,3+0,2+0,15+0,3=1,35$	1,35	8
2.3	Menjalin kerjasama dengan Lembaga Keuangan Untuk Mengatasi KPLI (Kekurangan Pembayaran lelang Ikan)	$3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4+3.5 + 2.3+2.4=0,45+0,3+0,2+0,15 +0,3+0,6+0,2=2,2$	2,2	1
III	Strategi W – O			
3.1.	Meningkatkan kualitas pelaksanaan lelang untuk menarik bakul/juragan dan perusahaan agrobisnis perikanan membeli ikan di TPI	$1.1+1.2.+1.3+1.4+1.5+4.1+4.2+4.4=0,3+0,3+0,15+0,15 +0,1+0,3+0,4+0,1=1,8$	1,8	2
3.2	Mengoptimalkan peran KUD	$1.1+1.2+1.5+4.1+4.2+4.3=0,3+0,3+0,1+0,3+0,4+0,3=1,7$	1,7	3
3.3	Meningkatkan kualitas SDM dengan dukungan program yang tepat	$1.2+1.3+4.2=0,3+0,15+0,4=0,85$	0,85	12
IV	Strategi W – T			
4.1	Meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan kinerja TPI	$4.1+4.2+4.3+2.3+2.4=0,3+0,4+0,3+0,2+0,2=1,4$	1,4	7
4.2	Meningkatkan koordinasi dan akses ke stakeholder untuk mendukung keuangan TPI	$4.1 + 4.2 + 4.3 + 2.3 + 2.4 + 2.5=0,3+0,4+0,3+0,2+0,2+0,15=1,55$	1,55	6
4.3	Meningkatkan peran serta pengelola untuk mendukung proses lelang sesuai dengan maksus dan tujuan TPI	$4.1+4.3+2.3+2.5=0,3+0,3+0,2+0,15=0,95$	0,95	11

Berdasarkan matrik SWOT di atas diperoleh ranking yang menunjukkan skala prioritas strategi yang harus disiapkan dalam pemberdayaan pengelolaan TPI Ketapang.

Prioritas *pertama* adalah menjalin kerjasama dengan Lembaga Keuangan Untuk Mengatasi KPLI (Kekurangan Pembayaran Lelang Ikan), yang *kedua* adalah Meningkatkan kualitas pelaksanaan lelang untuk menarik bakul/juragan dan perusahaan agrobisnis perikanan membeli ikan di TPI. *Ketiga*, prioritas yang harus dilakukan adalah mengoptimalkan peran KUD

5.3.4. Matriks Internal Eksternal

Dengan menggunakan hasil evaluasi dari matriks IFE dan EFE, matriks IE dapat dikerjakan. Sumbu horisontal Matriks IE adalah skor total IFE 2,7 sedangkan sumbu vertikal adalah skor total EFE yaitu 2,55. Posisi yang tepat adalah berada pada sel V



Keterangan :

 : Posisi

Posisi TPI Ketapang adalah pada posisi V. Pada posisi ini kondisi internal yang akan mempengaruhi strategi pemberdayaan dalam pengelolaan TPI masuk dalam katagori rata-rata (sedang). Skor EFE adalah 2,55, hal ini menunjukkan bahwa faktor eksternal baik yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap peluang dan ancaman memiliki posisi yang sedang.

Berdasarkan posisi ini, strategi yang cocok untuk diterapkan adalah strategi penetrasi pasar dan pengembangan produk.

5.3.5. TPI Mojo

5.3.7.1. Analisis Faktor-faktor Strategi Eksternal (EFE) Untuk TPI Mojo

Kabupaten Pematang

Analisis Faktor-faktor Strategi Eksternal adalah sebuah analisis yang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor eksternal apa yang mempengaruhi dalam penentuan strategi pemberdayaan.

Tabel 5.26
Matiks Faktor Strategi Eksternal
Tempat Pelelangan Ikan Mojo Kabupaten Pematang

Faktor-faktor Strategi Eksternal	Bobot	Rating	Bobot x Rating	Kode
Peluang				
▪ Potensi perikanan masih tinggi	0.1	3	0.3	1.1
▪ Kebijakan Pemerintah Yang Mendukung	0.15	2	0.3	1.2
▪ Pembangunan perikanan merupakan Pendukung Ketahanan Pangan	0.05	3	0.15	1.3
▪ Meningkatnya Konsumsi Ikan	0.05	3	0.15	1.4
▪ Bertambah baiknya teknologi	0.1	1	0.1	1.5
Ancaman				
▪ Menurunnya ekosistem	0.2	2	0.4	2.1
▪ Iklim dan Cuaca Yang Buruk Akibat Pemanasan Global	0.1	4	0.4	2.2
▪ Lemahnya kerangka hukum dalam hal pengaturan dan perangkat hukum untuk penegakannya	0.1	4	0.4	2.3
▪ Masuknya Pemodal Besar yang melakukan transaksi di luar TPI	0.1	4	0.4	2.4
▪ Adanya perbedaan kepentingan Yang Dapat Menurus Ke Konflik Kepentingan Antar Alat, Sektor dan Regional.	0.05	1	0.05	2.5
Total	1		2.65	

Sumber : Hasil Analisis Yang Dikembangkan untuk Penelitian ini

5.3.7.2. Analisis Faktor-faktor Strategi Internal (IFE)

Analisis Faktor-faktor Strategi Internal adalah sebuah analisis yang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor internal apa yang mempengaruhi dalam penentuan strategi pemberdayaan.

Tabel 5.27
Analisis Faktor Strategi Internal (IFE)
TPI Mojo Kabupaten Pemalang

Faktor-faktor Strategi Internal	Bobot	Rating	Bobot x Rating	Kode
Kekuatan				
▪ Pengalaman Kepala TPI/ Manajer KUD	0.15	3	0.45	3.1
▪ Hubungan Yang baik dengan SDM yang ada	0.1	3	0.3	3.2
▪ Memiliki Orientasi yang luas	0.1	2	0.2	3.3
▪ Integrasi Vertikal /lobi dengan Stakeholder	0.05	3	0.15	3.4
▪ Budaya dan kualitas organisasi dalam memahami visi dan misi	0.1	3	0.3	3.5
Kelemahan				
▪ Pelaksanaan /Proses Pelelangan Ikan	0.1	3	0.3	4.1
▪ Dukungan/Kondisi Keuangan TPI/KUD	0.1	3	0.3	4.2
▪ Fasilitas Infrastruktur	0.1	3	0.3	4.3
▪ Kualitas SDM yang rendah	0.05	2	0.1	4.4
▪ Lemahnya koordinasi antar karyawan	0.05	2	0.1	4.5
▪ Rendahnya upah/gaji yang diterima pengelola	0.1	1	0.1	4.6
Total	1		2.6	

Sumber : Hasil Analisis Yang Dikembangkan untuk Penelitian ini

5.3.7.3. Matriks Analisis SWOT

Dari butir- butir kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang telah disusun di atas, dapat disusun rencana strategi dan keempat strategi di atas ditampilkan pada Tabel 5.28

Tabel 5.28
Rencana Strategi Dalam Analisis SWOT
Untuk Penentuan Strategi Pemberdayaan di TPI Mojo

No	Strategi	Pembobotan	Total	Prioritas
I	Strategi S-O			
1.1	Meningkatkan peran TPI dengan memperbaiki infrastruktur	$3.1 + 3.4 + 3.5 + 1.2 + 1.4 = 0,45 + 0,15 + 0,3 + 0,3 + 0,15 = 1,35$	1,35	9
1.2	Meningkatkan kinerja organisasi untuk mendukung Program Pembangunan Perikanan	$3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 1.2 + 1.3 + 1.4 = 0,45 + 0,3 + 0,2 + 0,3 + 0,3 + 0,15 + 0,15 = 1,85$	1,85	2
1.3	Penyiapan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional	$3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 1.2 = 0,45 + 0,3 + 0,2 + 0,3 + 0,3 = 1,55$	1,55	7
II	Strategi S –T			
2.1	Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder yang terkait untuk penegakan hukum	$3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 2.3 = 0,45 + 0,3 + 0,2 + 0,15 + 0,3 + 0,4 = 1,8$	1,8	3
2.2	Mematuhi Rencana Tata Ruang Pesisir yang ada untuk meminimalkan kerusakan ekosistem	$2.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 = 0,4 + 0,4 + 0,45 + 0,3 + 0,2 + 0,15 = 0,95$	0,95	11
2.3	Menjalin kerjasama dengan Lembaga Keuangan Untuk Mengatasi KPLI (Kekurangan Pembayaran lelang Ikan)	$3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 2.3 + 2.4 = 0,45 + 0,3 + 0,2 + 0,15 + 0,3 + 0,4 + 0,4 = 2,2$	2,2	1
III	Strategi W – O			
3.1.	Meningkatkan kualitas pelaksanaan lelang untuk menarik bakul/juragan dan	$1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 4.1 + 4.2 + 4.4 = 0,3 + 0,3 + 0,15 + 0,15 + 0,1 + 0,3 + 0,3 + 0,1 = 1,7$	1,70	5

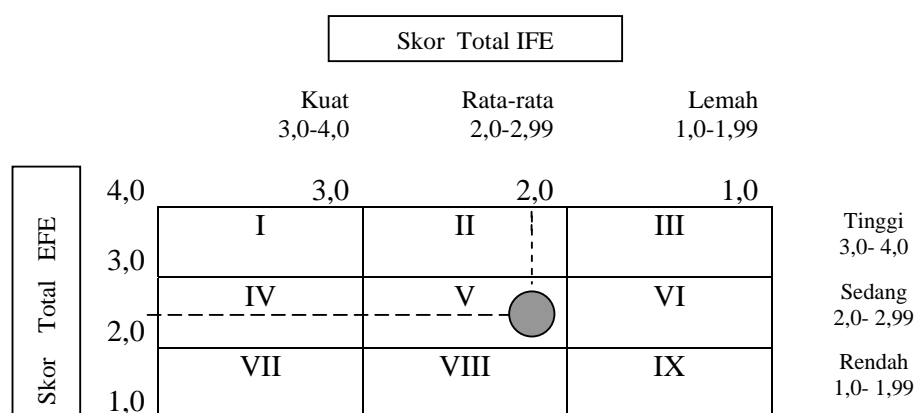
No	Strategi	Pembobotan	Total	Prioritas
	perusahaan agrobisnis perikanan membeli ikan di TPI			
3.2	Mengoptimalkan peran KUD	$1.1+1.2+1.5+4.1+4.2+4.3=0,3+0,3+0,1+0,3+0,3+0,3=1,6$	1,6	8
3.3	Meningkatkan kualitas SDM dengan dukungan program yang tepat	$1.2+1.3+4.2=0,3+0,15+0,3=0,75$	0,75	12
IV	Strategi W – T			
4.1	Meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan kinerja TPI	$4.1+4.2+4.3+2.3+2.4=0,3+0,3+0,3+0,4+0,4=1,7$	1,7	6
4.2	Meningkatkan koordinasi dan akses ke stakeholder untuk mendukung keuangan TPI	$4.1 + 4.2 + 4.3 + 2.3 + 2.4 + 2.5=0,3+0,3+0,3+0,4+0,4+0,05=1,75$	1,75	4
4.3	Meningkatkan peran serta pengelola untuk mendukung proses lelang sesuai dengan maksus dan tujuan TPI	$4.1+4.3+2.3+2.5=0,3+0,3+0,4+0,05=1,05$	1,05	10

Berdasarkan matrik SWOT di atas diperoleh ranking yang menunjukkan skala prioritas strategi yang harus disiapkan dalam pemberdayaan pengelolaan TPI dan KUD di daerah penelitian.

Prioritas *pertama* adalah menjalin kerjasama dengan Lembaga Keuangan Untuk mengatasi KPLI (Kekurangan Pembayaran lelang Ikan), yang *kedua* adalah meningkatkan kinerja organisasi untuk mendukung Program Pembangunan Perikanan *Ketiga*, melaksanakan koordinasi dengan stakeholder yang terkait untuk penegakan hukum

5.3.7.4. Matriks Internal Eksternal

Dengan menggunakan hasil evaluasi dari matriks IFE dan EFE, matriks IE dapat dikerjakan. Sumbu horisontal Matriks IE adalah skor total IFE 2,6 sedangkan sumbu vertikal adalah skor total EFE yaitu 2,65. Posisi yang tepat adalah berada pada sel V.



Keterangan :

● : Posisi

Posisi TPI Mojo adalah pada posisi V. Pada posisi ini kondisi internal yang akan mempengaruhi strategi pemberdayaan dalam pengelolaan TPI masuk dalam katagori rata-rata (sedang). Skor EFE adalah 2,65, hal ini menunjukkan bahwa faktor eksternal baik yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap peluang dan ancaman memiliki posisi yang sedang.

Berdasarkan posisi ini, strategi yang cocok untuk diterapkan adalah strategi penetrasi pasar dan pengembangan produk

5.3.6. TPI Asemdayong

5.3.10.1. Analisis Faktor-faktor Strategi Eksternal (EFE) Untuk TPI Asemdayong

Analisis Faktor-faktor Strategi Eksternal adalah sebuah analisis yang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor eksternal apa yang mempengaruhi dalam penentuan strategi pemberdayaan.

Tabel 5.29
Matriks Faktor Strategi Eksternal
Tempat Pelelangan Ikan Asemdayong

Faktor-faktor Strategi Eksternal	Bobot	Rating	Bobot x Rating	Kode
Peluang				
▪ Potensi perikanan masih tinggi	0.125	3	0.375	1.1
▪ Kebijakan Pemerintah Yang Mendukung	0.15	2	0.3	1.2
▪ Pembangunan perikanan merupakan Pendukung Ketahanan Pangan	0.05	3	0.15	1.3
▪ Meningkatnya Konsumsi Ikan	0.05	3	0.15	1.4
▪ Bertambah baiknya teknologi	0.1	1	0.1	1.5
Ancaman				
▪ Menurunnya ekosistem	0.175	2.5	0.4	2.1
▪ Iklim dan Cuaca Yang Buruk Akibat Pemanasan Global	0.15	2.5	0.375	2.2
▪ Lemahnya kerangka hukum dalam hal pengaturan dan perangkat hukum untuk penegakannya	0.1	4	0.4	2.3
▪ Masuknya Pemodal Besar yang melakukan transaksi di luar TPI	0.05	1.5	0.075	2.4
▪ Adanya perbedaan kepentingan Yang Dapat Menurus Ke Konflik Kepentingan Antar Alat, Sektor dan Regional.	0.05	2	0.1	2.5
Total	1	0	2.425	

Sumber : Hasil Analisis Yang Dikembangkan untuk Penelitian ini

5.3.10.2. Analisis Faktor-faktor Strategi Internal (IFE)

Analisis Faktor-faktor Strategi Internal adalah sebuah analisis yang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor internal apa yang mempengaruhi dalam penentuan strategi pemberdayaan.

Tabel 5.30
 Analisis Faktor Strategi Internal (IFE)
 TPI Asemdayong

Faktor-faktor Strategi Internal	Bobot	Rating	Bobot x Rating	Kode
Kekuatan				
▪ Pengalaman Kepala TPI/ Manajer KUD	0.15	3.5	0.525	3.1
▪ Hubungan Yang baik dengan SDM yang ada	0.1	3.5	0.35	3.2
▪ Memiliki Orientasi yang luas	0.1	1	0.1	3.3
▪ Integrasi Vertikal /lobi dengan Stakeholder	0.05	3	0.15	3.4
▪ Budaya dan kualitas organisasi dalam memahami visi dan misi	0.1	3	0.3	3.5
Kelemahan				
▪ Pelaksanaan /Proses Pelelangan Ikan	0.1	3	0.3	4.1
▪ Dukungan/Kondisi Keuangan TPI/KUD	0.1	3	0.3	4.2
▪ Fasilitas Infrastruktur	0.1	2	0.2	4.3
▪ Kualitas SDM yang rendah	0.05	2	0.1	4.4
▪ Lemahnya koordinasi antar karyawan	0.05	2	0.1	4.5
• Rendahnya upah/gaji yang diterima pengelola	0.1	1	0.1	4.6.
Total	1	0	2.525	

Sumber : Hasil Analisis Yang Dikembangkan untuk Penelitian ini

5.3.10.3. Matriks Analisis SWOT

Dengan memperhatikan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman), maka dapat disusun analisis SWOT yang menjadi arahan penyusunan rencana strategi pemberdayaan , yang dapat dilihat dalam tabel 5.31.

Tabel 5.31
Rencana Strategi Dalam Analisis SWOT
Untuk Penentuan Strategi Pemberdayaan TPI Asemdayong

No	Strategi	Pembobotan	Total	Prioritas
I	Strategi S-O			
1.1	Meningkatkan peran TPI dengan memperbaiki infrastruktur	$3.1+3.4+3.5+1.2+1.4=0,525+0,15+0,3+0,3+0,15=1,425$	1,425	7
1.2	Meningkatkan kinerja organisasi untuk mendukung Program Pembangunan Perikanan	$3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 1.2 + 1.3+1.4=0,525+0,35+0,1+0,3+0,3+0,15=1,725$	1,725	4
1.3	Penyiapan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional	$3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 1.2 = 0,525+0,35+0,1+0,3+0,3= 1,575$	1,575	5
II	Strategi S -T			
2.1	Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder yang terkait untuk penegakan hukum	$3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4+3.5 + 2.3=0,525+0,35+0,1+0,15+ 0,3+0,4=1,825$	1,825	2
2.2	Mematuhi Rencana Tata Ruang Pesisir yang ada untuk meminimalkan kerusakan ekosistem	$2.1+3.2+3.3+3.4+3.5=0,4+ +0,35+0,1+0,15+0,3=1,3$	1,3	9
2.3	Menjalin kerjasama dengan Lembaga Keuangan Untuk	$3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4+3.5+ 2.3+2.4=0,525+0,35+0,1+0,15+0,3+0,4+0,075=1,9$	1,9	1

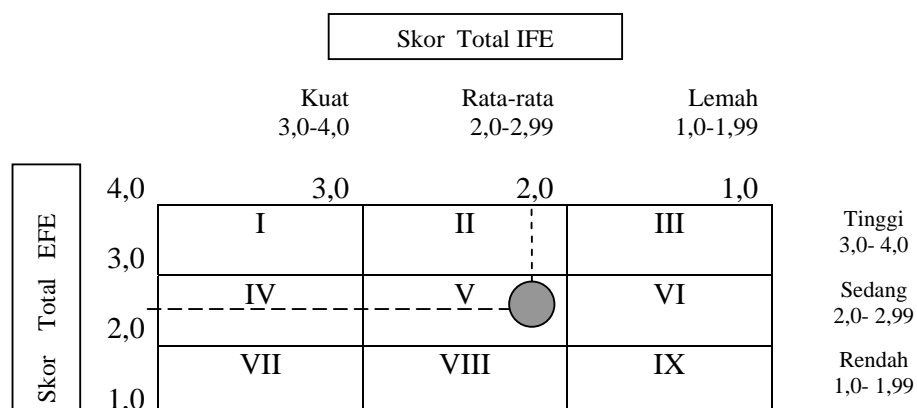
No	Strategi	Pembobotan	Total	Prioritas
	Mengatasi KPLI (Kekurangan Pembayaran lelang Ikan)			
III	Strategi W – O			
3.1.	Meningkatkan kualitas pelaksanaan lelang untuk menarik bakul/juragan dan perusahaan agrobisnis perikanan membeli ikan di TPI	$1.1+1.2.+1.3+1.4+1.5+4.1+4.2+4.4=0,375+0,3+0,15+0,15+0,1+0,3+0,3+0,1=1,775$	1,775	3
3.2	Mengoptimalkan peran KUD	$1.1+1.2+1.5+4.1+4.2+4.3=0,375+0,3+0,1+0,3+0,3+0,2=1,575$	1,575	6
3.3	Meningkatkan kualitas SDM dengan dukungan program yang tepat	$1.2+1.3+4.2=0,3+0,15+0,3=0,75$	0,75	12
IV	Strategi W – T			
4.1	Meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan kinerja TPI	$4.1+4.2+4.3+2.3+2.4=0,3+0,3+0,2+0,4+0,075=1,275$	1,275	10
4.2	Meningkatkan koordinasi dan akses ke stakeholder untuk mendukung keuangan TPI	$4.1 + 4.2 + 4.3 + 2.3 + 2.4 + 2.5=0,3+0,3+0,2+0,4+0,075+0,1=1,375$	1,375	8
4.3	Meningkatkan peran serta pengelola untuk mendukung proses lelang sesuai dengan maksus dan tujuan TPI	$4.1+4.3+2.3+2.5=0,3+0,2+0,4+0,1=1$	1	11

Berdasarkan matrik SWOT di atas diperoleh ranking yang menunjukkan skala prioritas strategi yang harus disiapkan dalam pemberdayaan pengelolaan TPI Asemdayong adalah: Prioritas *pertama* adalah menjalin kerjasama dengan Lembaga Keuangan Untuk Mengatasi KPLI (Kekurangan Pembayaran Lelang


ikan), yang *kedua* adalah melaksanakan koordinasi dengan stakeholder yang terkait untuk penegakan hukum *Ketiga*, meningkatkan kualitas pelaksanaan lelang untuk menarik bakul/juragan dan perusahaan agrobisnis perikanan membeli ikan di TPI

5.3.10.4. Matriks Internal Eksternal

Dengan menggunakan hasil evaluasi dari matriks IFE dan EFE, matriks IE dapat dikerjakan. Sumbu horisontal Matriks IE adalah skor total IFE 2,525 sedangkan sumbu vertikal adalah skor total EFE yaitu 2,425. Posisi yang tepat adalah berada pada sel V



Keterangan :

 : Posisi

Posisi TPI Asemdayong adalah pada posisi V. Pada posisi ini kondisi internal yang akan mempengaruhi strategi pemberdayaan dalam pengelolaan TPI masuk dalam katagori rata-rata (sedang). Skor EFE adalah 2,425, hal ini menunjukkan bahwa faktor eksternal baik yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap peluang dan ancaman memiliki posisi yang sedang.

Berdasarkan posisi ini, strategi yang cocok untuk diterapkan adalah strategi penetrasi pasar dan pengembangan produk.

5.3.7. TPI Tegalsari

5.3.7.1. Analisis Faktor-faktor Strategi Eksternal (EFE) Untuk TPI Tegalsari Kota Tegal

Analisis Faktor-faktor Strategi Eksternal adalah sebuah analisis yang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor eksternal apa yang mempengaruhi dalam penentuan strategi pemberdayaan.

Tabel 5.32
Matriks Faktor Strategi Eksternal
Tempat Pelelangan Ikan Tegalsari Kota Tegal

Faktor-faktor Strategi Eksternal	Bobot	Rating	Bobot x Rating	Kode
Peluang				
▪ Potensi perikanan masih tinggi	0.1	4	0.4	1.1
▪ Kebijakan Pemerintah Yang Mendukung	0.15	2	0.3	1.2
▪ Pembangunan perikanan merupakan Pendukung Ketahanan Pangan	0.05	3	0.15	1.3
▪ Meningkatnya Konsumsi Ikan	0.05	3	0.15	1.4
▪ Bertambah baiknya teknologi	0.1	1	0.1	1.5
Ancaman				
▪ Menurunnya ekosistem	0.2	2	0.2	2.1
▪ Iklim dan Cuaca Yang Buruk Akibat Pemanasan Global	0.15	3	0.45	2.2
▪ Lemahnya kerangka hukum dalam hal pengaturan dan perangkat hukum untuk penegakannya	0.1	4	0.4	2.3
▪ Masuknya Pemodal Besar yang melakukan transaksi di luar TPI	0.05	3	0.1	2.4
▪ Adanya perbedaan kepentingan Yang Dapat Menurus Ke Konflik Kepentingan Antar Alat, Sektor dan Regional.	0.05	3	0.15	2.5
Total	1	0	2.3	

Sumber : Hasil Analisis Yang Dikembangkan untuk Penelitian ini

5.3.7.2. Analisis Faktor-faktor Strategi Internal (IFE)

Analisis Faktor-faktor Strategi Internal adalah sebuah analisis yang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor internal apa yang mempengaruhi dalam penentuan strategi pemberdayaan.

Tabel 5.33
Analisis Faktor Strategi Internal (IFE)
TPI Tegalsari Kota Tegal

Faktor-faktor Strategi Internal	Bobot	Rating	Bobot x Rating	Kode
Kekuatan				
▪ Pengalaman Kepala TPI/ Manajer KUD	0.15	4	0.6	3.1
▪ Hubungan Yang baik dengan SDM yang ada	0.1	2	0.2	3.2
▪ Memiliki Orientasi yang luas	0.1	1	0.1	3.3
▪ Integrasi Vertikal /lobi dengan Stakeholder	0.05	3	0.15	3.4
▪ Budaya dan kualitas organisasi dalam memahami visi dan misi	0.1	1	0.1	3.5
Kelemahan				
▪ Pelaksanaan /Proses Pelelangan Ikan	0.175	4	0.7	4.1
▪ Dukungan/Kondisi Keuangan TPI/KUD	0.1	2	0.2	4.2
▪ Fasilitas Infrastruktur	0.05	4	0.2	4.3
▪ Kualitas SDM yang rendah	0.05	2	0.1	4.4
▪ Lemahnya koordinasi antar karyawan	0.05	2	0.1	4.5
▪ Rendahnya upah/gaji yang diterima pengelola	0.075	1	0.075	4.6.
Total	1	0	2.525	

Sumber : Hasil Analisis Yang Dikembangkan untuk Penelitian ini

5.3.7.3. Matriks Analisis SWOT

Dari butir-butir kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang telah disusun di atas, dapat disusun rencana strategi dan keempat strategi di atas ditampilkan pada Tabel 5.34

Tabel 5.34
Rencana Strategi Dalam Analisis SWOT
Untuk Penentuan Strategi Pemberdayaan TPI Tegalsari

No	Strategi	Pembobotan	Total	Prioritas
I	Strategi S-O			
1.1	Meningkatkan peran dengan memperbaiki infrastruktur	$3.1 + 3.4 + 3.5 + 1.2 + 1.4 = 0,6 + 0,15 + 0,3 + 0,3 + 0,15 = 1,5$	1,5	6
1.2	Meningkatkan kinerja organisasi untuk mendukung Program Pembangunan Perikanan	$3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 1.2 + 1.3 + 1.4 = 0,6 + 0,4 + 0,4 + 0,3 + 0,3 + 0,15 = 2,15$	2,15	4
1.3	Penyiapan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional	$3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 1.2 = 0,6 + 0,4 + 0,4 + 0,5 + 0,3 = 2,2$	2,2	3
II	Strategi S-T			
2.1	Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder yang terkait untuk penegakan hukum	$3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 2.3 = 0,6 + 0,4 + 0,4 + 0,15 + 0,3 + 0,4 = 2,25$	2,25	2
2.2	Mematuhi Rencana Tata Ruang Pesisir yang ada untuk meminimalkan kerusakan ekosistem	$2.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 = 0,2 + 0,4 + 0,4 + 0,15 + 0,3 = 1,45$	1,45	7
2.3	Menjalin kerjasama dengan Lembaga Keuangan Untuk Mengatasi KPLI ($3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 2.3 + 2.4 = 0,6 + 0,4 + 0,4 + 0,15 + 0,3 + 0,4 + 0,1 = 2,35$	2,35	1

No	Strategi	Pembobotan	Total	Prioritas
	Kekurangan Pembayaran lelang Ikan)			
III	Strategi W – O			
3.1.	Meningkatkan kualitas pelaksanaan lelang untuk menarik bakul/juragan dan perusahaan agrobisnis perikanan membeli ikan di TPI	$1.1+1.2.+1.3+1.4+1.5+4.1+4.2+4.4=0,3+0,3+0,15+0,15+0,1+0,3+0,3+0,2+0,2=2$	2	5
3.2	Mengoptimalkan peran KUD	$1.1+1.2+1.5+4.1+4.2+4.3=0,3+0,3+0,1+0,3+0,3+0,2=1,5$	1	10
3.3	Meningkatkan kualitas SDM dengan dukungan program yang tepat	$1.2+1.3+4.2=0,3+0,15+0,3=0,75$	0,55	11
IV	Strategi W – T			
4.1	Meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan kinerja TPI	$4.1+4.2+4.3+2.3+2.4=0,3+0,3+0,2+0,4+0,1=1,3$	0,5	12
4.2	Meningkatkan koordinasi dan akses ke stakeholder untuk mendukung keuangan TPI	$4.1 + 4.2 + 4.3 + 2.3 + 2.4 + 2.5=0,3+0,3+0,2+0,4+0,1+0,15=1,45$	1,45	8
4.3	Meningkatkan peran serta pengelola untuk mendukung proses lelang sesuai dengan maksus dan tujuan TPI	$4.1+4.3+2.3+2.5=0,3+0,2+0,4+0,15=1,05$	1,05	9

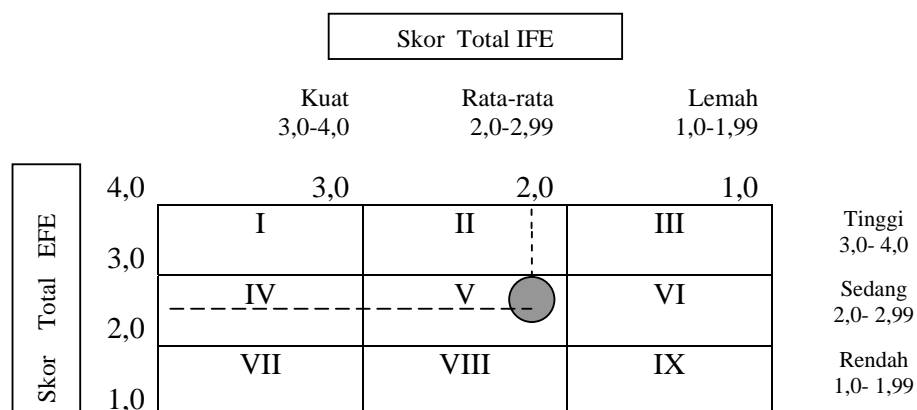
Berdasarkan matrik SWOT di atas diperoleh ranking yang menunjukkan skala prioritas strategi yang harus disiapkan dalam pemberdayaan pengelolaan TPI Tegalsari.

Prioritas *pertama* adalah Menjalin kerjasama dengan Lembaga Keuangan Untuk Mengatasi KPLI (Kekurangan Pembayaran Lelang Ikan , yang *kedua*

adalah Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder yang terkait untuk penegakan hukum. *Ketiga*, penyiapan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional

5.3.7.4. Matriks Internal Eksternal

Dengan menggunakan hasil evaluasi dari matriks IFE dan EFE, matriks IE dapat dikerjakan. Sumbu horisontal Matriks IE adalah skor total IFE 2,525 sedangkan sumbu vertikal adalah skor total EFE yaitu 2,3. Posisi yang tepat adalah berada pada sel V.



Keterangan :

 : Posisi

Posisi TPI Tegalsari adalah pada posisi V. Pada posisi ini kondisi internal yang akan mempengaruhi strategi pemberdayaan dalam pengelolaan TPI masuk dalam katagori rata-rata (sedang). Skor EFE adalah 2,3, hal ini menunjukkan

bahwa faktor eksternal baik yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap peluang dan ancaman memiliki posisi yang sedang.

Berdasarkan posisi ini, strategi yang cocok untuk diterapkan adalah strategi penetrasi pasar dan pengembangan produk.

5.3.8. TPI Muararaja Kota Tegal

5.3.8.1. Analisis Faktor-faktor Strategi Eksternal (EFE) Untuk TPI Muararaja

Analisis Faktor-faktor Strategi Eksternal adalah sebuah analisis yang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor eksternal apa yang mempengaruhi dalam penentuan strategi pemberdayaan.

Tabel 5.35
Matriks Faktor Strategi Eksternal
Tempat Pelelangan Ikan Muararaja

Faktor-faktor Strategi Eksternal	Bobot	Rating	Bobot x Rating	Kode
Peluang				
▪ Potensi perikanan masih tinggi	0.1	4	0.4	1.1
▪ Kebijakan Pemerintah Yang Mendukung	0.15	2	0.3	1.2
▪ Pembangunan perikanan merupakan Pendukung Ketahanan Pangan	0.05	3	0.15	1.3
▪ Meningkatnya Konsumsi Ikan	0.05	3	0.15	1.4
▪ Bertambah baiknya teknologi	0.1	1	0.1	1.5
Ancaman				
▪ Menurunnya ekosistem	0.2	2	0.4	2.1
▪ Iklim dan Cuaca Yang Buruk Akibat Pemanasan Global	0.15	3	0.45	2.2
▪ Lemahnya kerangka hukum dalam hal pengaturan dan perangkat hukum untuk penegakannya	0.1	4	0.4	2.3
▪ Masuknya Pemodal Besar yang melakukan transaksi di luar TPI	0.05	3	0.15	2.4
▪ Adanya perbedaan kepentingan Yang Dapat Menurus Ke Konflik Kepentingan Antar Alat, Sektor dan Regional.	0.05	3	0.15	2.5
Total	1	0	2.65	

Sumber : Hasil Analisis Yang Dikembangkan untuk Penelitian ini

5.3.8.2. Analisis Faktor-faktor Strategi Internal (IFE)

Analisis Faktor-faktor Strategi Internal adalah sebuah analisis yang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor internal apa yang mempengaruhi dalam penentuan strategi pemberdayaan.

Tabel 5.36
Analisis Faktor Strategi Internal (IFE)
TPI Muarareja

Faktor-faktor Strategi Internal	Bobot	Rating	Bobot x Rating	Kode
Kekuatan				
• Pengalaman Kepala TPI/ Manajer KUD	0.15	4	0.6	3.1
• Hubungan Yang baik dengan SDM yang ada	0.1	2	0.2	3.2
• Memiliki Orientasi yang luas	0.1	1	0.1	3.3
• Integrasi Vertikal /lobi dengan Stakeholder	0.05	3	0.15	3.4
• Budaya dan kualitas organisasi dalam memahami visi dan misi	0.1	1	0.1	3.5
Kelemahan				
▪ Pelaksanaan /Proses Pelelangan Ikan	0.2	4	0.8	4.1
▪ Dukungan/Kondisi Keuangan TPI/KUD	0.1	2	0.2	4.2
▪ Fasilitas Infrastruktur	0.1	4	0.4	4.3
▪ Kualitas SDM yang rendah	0.05	2	0.1	4.4
▪ Lemahnya koordinasi antar karyawan	0.05	2	0.1	4.5
▪ Rendahnya upah/gaji yang diterima pengelola	0.1	1	0.1	4.6.
Total	1.1	0	2.85	

Sumber : Hasil Analisis Yang Dikembangkan untuk Penelitian ini

5.3.8.3. Matriks Analisis SWOT

Dari butir- butir kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang telah disusun di atas, dapat disusun rencana strategi dan keempat strategi di atas ditampilkan pada Tabel 5.37

Tabel 5.37
Rencana Strategi Dalam Analisis SWOT
Untuk Penentuan Strategi Pemberdayaan TPI Muararaja

No	Strategi	Pembobotan	Total	Prioritas
I	Strategi S-O			
1.1	Meningkatkan peran TPI dengan memperbaiki infrastruktur	$3.1 + 3.4 + 3.5 + 1.2 + 1.4 = 0,6 + 0,15 + 0,1 + 0,3 + 0,15 = 1,3$	1,3	8
1.2	Meningkatkan kinerja organisasi untuk mendukung Program Pembangunan Perikanan	$3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 1.2 + 1.3 + 1.4 = 0,6 + 0,2 + 0,1 + 0,1 + 0,3 + 0,15 = 1,45$	1,45	6
1.3	Penyiapan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional	$3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 1.2 = 0,6 + 0,2 + 0,1 + 0,1 + 0,3 = 1,3$	1,3	9
II	Strategi S –T			
2.1	Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder yang terkait untuk penegakan hukum	$3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 2.3 = 0,6 + 0,2 + 0,1 + 0,15 + 0,1 + 0,4 = 1,55$	1,55	5
2.2	Mematuhi Rencana Tata Ruang Pesisir yang ada untuk meminimalkan kerusakan ekosistem	$2.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 = 0,4 + 0,2 + 0,1 + 0,15 + 0,1 = 0,95$	0,95	10
2.3	Menjalin kerjasama dengan Lembaga Keuangan Untuk Mengatasi KPLI (Kekurangan Pembayaran lelang Ikan)	$3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 2.3 + 2.4 = 0,6 + 0,2 + 0,1 + 0,15 + 0,1 + 0,4 + 0,15 = 1,7$	1,7	4
III	Strategi W – O			
3.1.	Meningkatkan kualitas pelaksanaan lelang untuk menarik bakul/juragan dan	$1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 4.1 + 4.2 + 4.4 = 0,4 + 0,3 + 0,15 + 0,15 + 0,1 + 0,7 + 0,2 + 0,1 = 2,1$	2,1	1

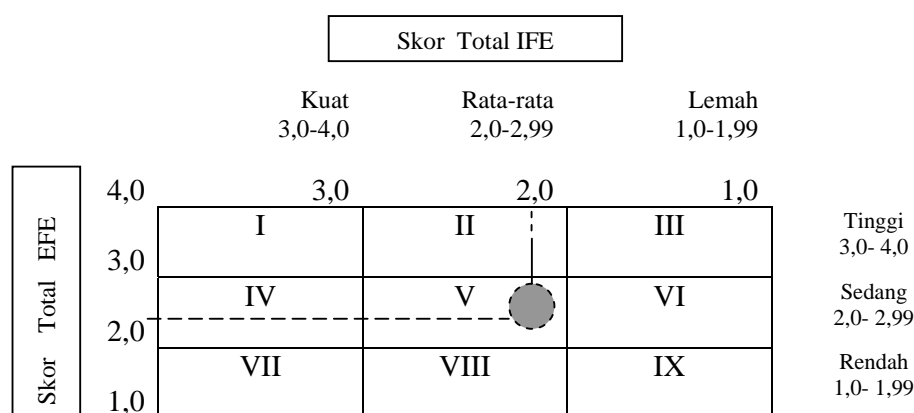
No	Strategi	Pembobotan	Total	Prioritas
	perusahaan agrobisnis perikanan membeli ikan di TPI			
3.2	Mengoptimalkan peran KUD	$1.1+1.2+1.5+4.1+4.2+4.3=0,4+0,3+0,1+0,7+0,2+0,2=1,9$	1,9	2
3.3	Meningkatkan kualitas SDM dengan dukungan program yang tepat	$1.2+1.3+4.2=0,3+0,15+0,2=$	0,55	11
IV	Strategi W – T			
4.1	Meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan kinerja TPI	$4.1+ 4.2+ 4.3+ 2.3+ 2.4=0,7+0,2+0,2+0,4+0,15=$	0,5	12
4.2	Meningkatkan koordinasi dan akses ke stakeholder untuk mendukung keuangan TPI	$4.1 + 4.2 +4.3 + 2.3 + 2.4 + 2.5=0,7+0,2+0,2+0,4+0,15 +0.15= 1,8$	1,8	3
4.3	Meningkatkan peran serta pengelola untuk mendukung proses lelang sesuai dengan maksud dan tujuan TPI	$4.1+4.3+2.3+2.5=0,7+0,2+0,4+0,15=1,45$	1,45	7

Berdasarkan matrik SWOT di atas diperoleh ranking yang menunjukkan skala prioritas strategi yang harus disiapkan dalam pemberdayaan pengelolaan TPI Muararaja.

Prioritas *pertama* adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan lelang untuk menarik bakul/juragan dan perusahaan agrobisnis perikanan membeli ikan di TPI *Kedua*, mengoptimalkan peran KUD. *Ketiga*, meningkatkan koordinasi dan akses ke stakeholder untuk mendukung keuangan TPI

5.3.8.4. Matriks Internal Eksternal

Dengan menggunakan hasil evaluasi dari matriks IFE dan EFE, matriks IE dapat dikerjakan. Sumbu horisontal Matriks IE adalah skor total IFE 2,85 sedangkan sumbu vertikal adalah skor total EFE yaitu 2,65. Posisi yang tepat adalah berada pada sel V.



Keterangan :

● : Posisi

Posisi TPI Muarareja adalah pada posisi V. Pada posisi ini kondisi internal yang akan mempengaruhi strategi pemberdayaan dalam pengelolaan TPI Muarareja masuk dalam katagori rata-rata (sedang). Skor EFE adalah 2,65, hal ini menunjukkan bahwa faktor eksternal baik yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap peluang dan ancaman memiliki posisi yang sedang.

Berdasarkan posisi ini, strategi yang cocok untuk diterapkan adalah strategi penetrasi pasar dan pengembangan produk

5.3.9. TPI Pelabuhan

5.3.9.1. Analisis Faktor-faktor Strategi Eksternal (EFE) Untuk TPI Pelabuhan

Analisis Faktor-faktor Strategi Eksternal adalah sebuah analisis yang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor eksternal apa yang mempengaruhi dalam penentuan strategi pemberdayaan.

Tabel 5.38
Matiks Faktor Strategi Eksternal
Tempat Pelelangan Ikan Pelabuhan

Faktor-faktor Strategi Eksternal	Bobot	Rating	Bobot x Rating	Kode
Peluang				
▪ Potensi perikanan masih tinggi	0.1	4	0.4	1.1
▪ Kebijakan Pemerintah Yang Mendukung	0.15	2	0.3	1.2
▪ Pembangunan perikanan merupakan Pendukung Ketahanan Pangan	0.05	2	0.1	1.3
▪ Meningkatnya Konsumsi Ikan	0.05	3	0.15	1.4
▪ Bertambah baiknya teknologi	0.1	1	0.1	1.5
Ancaman				
▪ Menurunnya ekosistem	0.2	2	0.4	2.1
▪ Iklim dan Cuaca Yang Buruk Akibat Pemanasan Global	0.15	2	0.3	2.2
▪ Lemahnya kerangka hukum dalam hal pengaturan dan perangkat hukum untuk penagakannya	0.1	4	0.4	2.3
▪ Masuknya Pemodal Besar yang melakukan transaksi di luar TPI	0.05	3	0.15	2.4
▪ Adanya perbedaan kepentingan Yang Dapat Menjurus Ke Konflik Kepentingan Antar Alat, Sektor dan Regional.	0.05	3	0.15	2.5
Total	1	0	2.45	

Sumber : Hasil Analisis Yang Dikembangkan untuk Penelitian ini

5.3.9.2. Analisis Faktor-faktor Strategi Internal (IFE)

Analisis Faktor-faktor Strategi Internal adalah sebuah analisis yang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor internal apa yang mempengaruhi dalam penentuan strategi pemberdayaan.

Tabel 5.39
Analisis Faktor Strategi Internal (IFE)
TPI Pelabuhan

Faktor-faktor Strategi Internal	Bobot	Rating	Bobot x Rating	Kode
Kekuatan				
▪ Pengalaman Kepala TPI/ Manajer KUD	0.15	3	0.45	3.1
▪ Hubungan Yang baik dengan SDM yang ada	0.1	3	0.3	3.2
▪ Memiliki Orientasi yang luas	0.1	1	0.1	3.3
▪ Integrasi Vertikal /lobi dengan Stakeholder	0.05	3	0.15	3.4
▪ Budaya dan kualitas organisasi dalam memahami visi dan misi	0.1	3	0.3	3.5
Kelemahan				
▪ Pelaksanaan /Proses Pelelangan Ikan	0.1	3	0.3	4.1
▪ Dukungan/Kondisi Keuangan TPI/KUD	0.1	1	0.1	4.2
▪ Fasilitas Infrastruktur	0.1	3	0.3	4.3
▪ Kualitas SDM yang rendah	0.05	3	0.15	4.4
▪ Lemahnya koordinasi antar karyawan	0.05	2	0.1	4.5
▪ Rendahnya upah/gaji yang diterima pengelola	0.1	1	0.1	4.6.
Total	1	0	2.35	

Sumber : Hasil Analisis Yang Dikembangkan untuk Penelitian ini

5.3.9.3. Matriks Analisis SWOT

Dari butir-butir kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang telah disusun di atas, dapat disusun rencana strategi dan keempat strategi di atas ditampilkan pada Tabel 5.40

Tabel 5.40
Rencana Strategi Dalam Analisis SWOT
Untuk Penentuan Strategi Pemberdayaan TPI Pelabuhan

No	Strategi	Pembobotan	Total	Prioritas
I	Strategi S-O			
1.1	Meningkatkan peran TPI dengan memperbaiki infrastruktur	$3.1+3.4+3.5+1.2+1.4=0,45+0,15+0,3+0,3+0,15=1,35$	1,35	8
1.2	Meningkatkan kinerja organisasi untuk mendukung Program Pembangunan Perikanan	$3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 1.2 + 1.3+1.4=0,45+0,3+0,1+0,3+0,3+0,1=1,55$	1,55	4
1.3	Penyiapan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional	$3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 1.2=0,45+0,3+0,1+0,3+0,3=1,45$	1,45	6
II	Strategi S-T			
2.1	Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder yang terkait untuk penegakan hukum	$3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4+3.5 + 2.3=0,45+0,3+0,1+0,15+0,3+0,4=1,7$	1,7	2
2.2	Mematuhi Rencana Tata Ruang Pesisir yang ada untuk meminimalkan kerusakan ekosistem	$2.1+3.2+3.3+3.4+3.5=0,4+0,3+0,1+0,15+0,3=1,25$	1,25	9
2.3	Menjalin kerjasama dengan Lembaga Keuangan Untuk Mengatasi KPLI (Kekurangan	$3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4+3.5 + 2.3+2.4=0,45+0,3+0,1+0,15+0,3+0,4+0,15=1,85$	1,85	1

No	Strategi	Pembobotan	Total	Prioritas
	Pembayaran lelang Ikan)			
III	Strategi W – O			
3.1.	Meningkatkan kualitas pelaksanaan lelang untuk menarik bakul/juragan dan perusahaan agrobisnis perikanan membeli ikan di TPI	$1.1+1.2.+1.3+1.4+1.5+4.1+4.2+4.4=0,4+0,3+0,1+0,15+0,1+0,3+0,1+0,15=1,6$	1,6	3
3.2	Mengoptimalkan peran KUD	$1.1+1.2+1.5+4.1+4.2+4.3=0,4+0,3+0,1+0,3+0,1+0,3=1,5$	1,5	5
3.3	Meningkatkan kualitas SDM dengan dukungan program yang tepat	$1.2+1.3+4.2=0,3+0,1+0,1=0,5$	0,5	12
IV	Strategi W – T			
4.1	Meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan kinerja TPI	$4.1+4.2+4.3+2.3+2.4=0,3+0,1+0,3+0,4+0,15=1,25$	1,25	10
4.2	Meningkatkan koordinasi dan akses ke stakeholder untuk mendukung keuangan TPI	$4.1 + 4.2 + 4.3 + 2.3 + 2.4 + 2.5=0,3+0,1+0,3+0,4+0,15+0,15=1,4$	1,4	7
4.3	Meningkatkan peran serta pengelola untuk mendukung proses lelang sesuai dengan maksud dan tujuan TPI	$4.1+4.3+2.3+2.5=0,3+0,3+0,4+0,15=1,15$	1,15	11

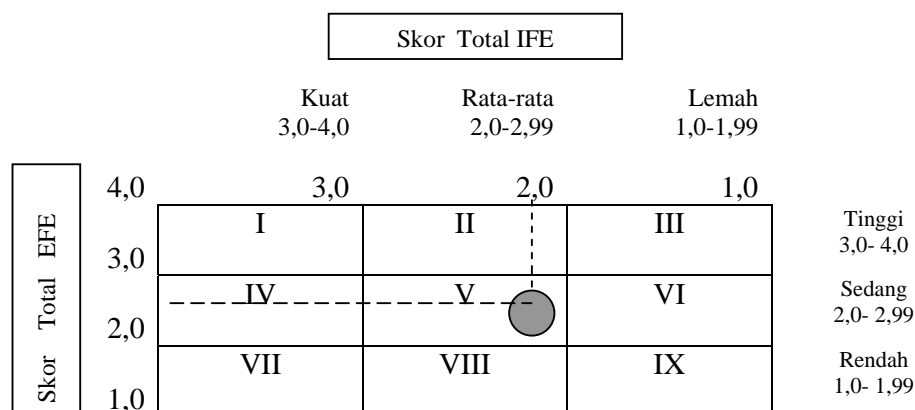
Berdasarkan matrik SWOT di atas diperoleh ranking yang menunjukkan skala prioritas strategi yang harus disiapkan dalam pemberdayaan pengelolaan TPI dan KUD di daerah penelitian.

Prioritas *pertama* adalah Menjalinkan kerjasama dengan Lembaga Keuangan Untuk Mengatasi KPLI (Kekurangan Pembayaran Lelang Ikan), yang *kedua*

adalah Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder yang terkait untuk penegakan hukum *Ketiga*, Meningkatkan kualitas pelaksanaan lelang untuk menarik bakul/juragan dan perusahaan agrobisnis perikanan membeli ikan di TPI

5.3.9.4. Matriks Internal Eksternal

Dengan menggunakan hasil evaluasi dari matriks IFE dan EFE, matriks IE dapat dikerjakan. Sumbu horisontal Matriks IE adalah skor total IFE 2,35 sedangkan sumbu vertikal adalah skor total EFE yaitu 2,45. Posisi yang tepat adalah berada pada sel V.



Keterangan :

 : Posisi

Posisi TPI Pelabuhan adalah pada posisi V. Pada posisi ini kondisi internal yang akan mempengaruhi strategi pemberdayaan dalam pengelolaan TPI masuk dalam katagori rata-rata (sedang). Skor EFE adalah 2,45, hal ini menunjukkan bahwa faktor eksternal baik yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap peluang dan ancaman memiliki posisi yang sedang.

Berdasarkan posisi ini, strategi yang cocok untuk diterapkan adalah strategi yang penetrasi pasar dan pengembangan produk

5.3.10. TPI PPNP Kota Pekalongan

5.3.10.1. Analisis Faktor-faktor Strategi Eksternal (EFE) Untuk TPI PPNP Kota Pekalongan

Analisis Faktor-faktor Strategi Eksternal adalah sebuah analisis yang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor eksternal apa yang mempengaruhi dalam penentuan strategi pemberdayaan.

Tabel 5.41
Matriks Faktor Strategi Eksternal
Tempat Pelelangan Ikan PPNP Kota Pekalongan

Faktor-faktor Strategi Eksternal	Bobot	Rating	Bobot x Rating	Kode
Peluang				
▪ Potensi perikanan masih tinggi	0.1	4	0.4	1.1
▪ Kebijakan Pemerintah Yang Mendukung	0.15	2	0.3	1.2
▪ Pembangunan perikanan merupakan Pendukung Ketahanan Pangan	0.05	3	0.15	1.3
▪ Meningkatnya Konsumsi Ikan	0.05	3	0.15	1.4
▪ Bertambah baiknya teknologi	0.1	1	0.1	1.5
Ancaman				
▪ Menurunnya ekosistem	0.2	4	0.8	2.1
▪ Iklim dan Cuaca Yang Buruk Akibat Pemanasan Global	0.15	2	0.3	2.2
▪ Lemahnya kerangka hukum dalam hal pengaturan dan perangkat hukum untuk penegakannya	0.1	4	0.4	2.3
▪ Masuknya Pemodal Besar yang melakukan transaksi di luar TPI	0.05	1	0.05	2.4
▪ Adanya perbedaan kepentingan Yang Dapat Menjurus Ke Konflik Kepentingan Antar Alat, Sektor dan Regional.	0.05	1	0.05	2.5
Total	1	0	2.7	

Sumber : Hasil Analisis Yang Dikembangkan untuk Penelitian ini

5.3.10.2. Analisis Faktor-faktor Strategi Internal (IFE)

Analisis Faktor-faktor Strategi Internal adalah sebuah analisis yang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor internal apa yang mempengaruhi dalam penentuan strategi pemberdayaan.

Tabel 5.42
Analisis Faktor Strategi Internal (IFE)
TPI PPNP Kota Pekalongan

Faktor-faktor Strategi Internal	Bobot	Rating	Bobot x Rating	Kode
Kekuatan				
▪ Pengalaman Kepala TPI/ Manajer KUD	0.15	4	0.6	3.1
▪ Hubungan Yang baik dengan SDM yang ada	0.1	4	0.4	3.2
▪ Memiliki Orientasi yang luas	0.1	3	0.3	3.3
▪ Integrasi Vertikal /lobi dengan Stakeholder	0.05	3	0.15	3.4
▪ Budaya dan kualitas organisasi dalam memahami visi dan misi	0.1	3	0.3	3.5
Kelemahan				
▪ Pelaksanaan /Proses Pelelangan Ikan	0.1	3	0.3	4.1
▪ Dukungan/Kondisi Keuangan TPI/KUD	0.1	4	0.4	4.2
▪ Fasilitas Infrastruktur	0.1	3	0.3	4.3
▪ Kualitas SDM yang rendah	0.05	3	0.15	4.4
▪ Lemahnya koordinasi antar karyawan	0.05	2	0.1	4.5
▪ Rendahnya upah/gaji yang diterima pengelola	0.1	1	0.1	4.6.
Total	1		3.1	

Sumber : Hasil Analisis Yang Dikembangkan untuk Penelitian ini

5.3.10.3. Matriks Analisis SWOT

Dalam analisis matriks SWOT ini dapat dibuat empat bentuk strategi, yaitu :(1) Strategi Kekuatan-Peluang (Strategi S-O). Strategi ini adalah upaya perencanaan memanfaatkan unsur-unsur kekuatan yang dimiliki untuk sebesar-besarnya menangkap peluang yang ada; (2) Strategi Kekuatan-Ancaman (Strategi S-T) adalah upaya perencanaan memanfaatkan unsur-unsur kekuatan yang

dimiliki untuk memperkecil dan bila mungkin menghilangkan ancaman yang akan dihadapi ; (3) Strategi Kelemahan –Peluang (Strategi W-O) adalah strategi yang disusun dalam upaya menyusun perencanaan untuk meminimalkan kelemahan yang dimiliki untuk menangkap peluang yang ada ; (4) Strategi Kelemahan-Ancaman (Strategi W-T) yaitu strategi dalam upaya menyusun perencanaan untuk meminimalkan kelemahan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman yang akan datang.

Dari butir-butir kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang telah disusun di atas, dapat disusun rencana strategi dan keempat strategi di atas ditampilkan pada Tabel 5.43

Tabel 5.43
Rencana Strategi Dalam Analisis SWOT
Untuk Penentuan Strategi Pemberdayaan

No	Strategi	Pembobotan	Total	Prioritas
I	Strategi S-O			
1.1	Meningkatkan peran dengan TPI memperbaiki infrastruktur	$3.1 + 3.4 + 3.5 + 1.2 + 1.4 = 0,6 + 0,15 + 0,3 + 0,3 + 0,15 = 1,5$	1,5	8
1.2	Meningkatkan kinerja organisasi untuk mendukung Program Pembangunan Perikanan	$3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 1.2 + 1.3 + 1.4 = 0,6 + 0,4 + 0,3 + 0,3 + 0,3 + 0,15 + 0,15 = 2,2$	2,2	1
1.3	Penyiapan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional	$3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 1.2 = 0,6 + 0,4 + 0,3 + 0,3 + 0,3 = 1,9$	1,9	5
II	Strategi S –T			
2.1	Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder yang terkait untuk	$3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 2.3 = 0,6 + 0,4 + 0,3 + 0,15 + 0,3 + 0,4 = 2,15$	2,15	3

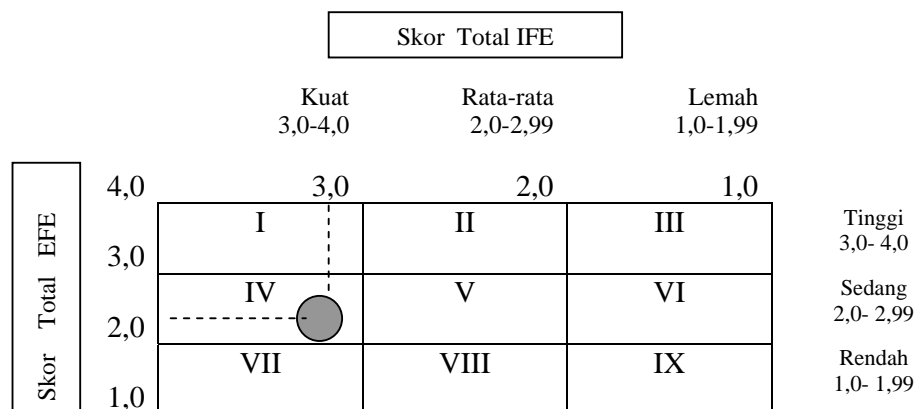
No	Strategi	Pembobotan	Total	Prioritas
	penegakan hukum			
2.2	Mematuhi Rencana Tata Ruang Pesisir yang ada untuk meminimalkan kerusakan ekosistem	$2.1+3.2+3.3+3.4+3.5=0,8+0,4+0,3+0,15+0,3=1,95$	1,95	4
2.3	Menjalin kerjasama dengan Lembaga Keuangan Untuk Mengatasi KPLI (Kekurangan Pembayaran lelang Ikan)	$3.1 + 3.2 +3.3 +3.4+3.5 + 2.3+2.4=0,6+0,4+0,3+0,15 +0,3+0,4+0,05=2,2$	2,2	2
III	Strategi W – O			
3.1.	Meningkatkan kualitas pelaksanaan lelang untuk menarik bakul/juragan dan perusahaan agrobisnis perikanan membeli ikan di TPI	$1.1+1.2.+1.3+1.4+1.5+4.1+4.2+4.4=0,4+0,3+0,15+0,15 +0,3+0,4+0,15=1,85$	1,85	6
3.2	Mengoptimalkan peran KUD	$1.1+1.2 +1.5+4.1+4.2+4.3=0,4+0,3+0,1+0,3+0,4+0,3=1,8$	1,8	7
3.3	Meningkatkan kualitas SDM dengan dukungan program yang tepat	$1.2+1.3+4.2=0,3+0,15+0,4=0,85$	0,85	12
IV	Strategi W – T			
4.1	Meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan kinerja TPI	$4.1+4.2+4.3+2.3+2.4=0,3+0,4+0,3+0,4+0,05=1,45$	1,45	10
4.2	Meningkatkan koordinasi dan akses ke stakeholder untuk mendukung keuangan TPI	$4.1 + 4.2 +4.3 + 2.3 + 2.4 + 2.5=0,3+0,4+0,3+0,4+0,05 +0,05= 1,5$	1,5	9
4.3	Meningkatkan peran serta pengelola untuk mendukung proses lelang sesuai dengan maksud dan tujuan TPI	$4.1+4.3+2.3+2.5=0,3+0,3+0,4+0,05=1,05$	1,05	11

Berdasarkan matrik SWOT di atas diperoleh ranking yang menunjukkan skala prioritas strategi yang harus disiapkan dalam pemberdayaan pengelolaan TPI dan KUD di daerah penelitian.

Prioritas *pertama* adalah meningkatkan kinerja organisasi untuk mendukung Program Pembangunan Perikanan. Yang *kedua* adalah menjalin kerjasama dengan Lembaga Keuangan Untuk Mengatasi KPLI (Kekurangan Pembayaran lelang Ikan). *Ketiga*, melaksanakan koordinasi dengan stakeholder yang terkait untuk penegakan hukum

5.3.10.4. Matriks Internal Eksternal

Dengan menggunakan hasil evaluasi dari matriks IFE dan EFE, matriks IE dapat dikerjakan. Sumbu horisontal Matriks IE adalah skor total IFE 3,1 sedangkan sumbu vertikal adalah skor total EFE yaitu 2,7. Posisi yang tepat adalah berada pada sel IV



Keterangan :

 : Posisi

Posisi TPI dan KUD sekarang adalah pada posisi IV. Pada posisi ini kondisi internal yang akan mempengaruhi strategi pemberdayaan dalam pengelolaan TPI masuk dalam katagori kuat (tinggi). Skor EFE adalah 2,7, hal ini menunjukkan bahwa faktor eksternal baik yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap peluang dan ancaman memiliki posisi yang sedang (rata-rata).

Berdasarkan posisi ini, strategi yang cocok untuk diterapkan adalah strategi yang intensif. Tempat Pelelangan Ikan merupakan unit kegiatan yang memerlukan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pelelangan ikan.

5.3.11. TPI Suradadi

5.3.11.1. Analisis Faktor-faktor Strategi Eksternal (EFE) Untuk TPI Suradadi

Analisis Faktor-faktor Strategi Eksternal adalah sebuah analisis yang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor eksternal apa yang mempengaruhi dalam penentuan strategi pemberdayaan.

Tabel 5.44
Matriks Faktor Strategi Eksternal
Tempat Pelelangan Ikan Suradadi

Faktor-faktor Strategi Eksternal	Bobot	Rating	Bobot x Rating	Kode
Peluang				
▪ Potensi perikanan masih tinggi	0.1	3	0.3	1.1
▪ Kebijakan Pemerintah Yang Mendukung	0.15	2	0.3	1.2
▪ Pembangunan perikanan merupakan Pendukung Ketahanan Pangan	0.05	3	0.15	1.3
▪ Meningkatnya Konsumsi Ikan	0.05	3	0.15	1.4
▪ Bertambah baiknya teknologi	0.1	1	0.1	1.5
Ancaman				
▪ Menurunnya ekosistem	0.2	2,5	0.5	2.1
▪ Iklim dan Cuaca Yang Buruk Akibat Pemanasan Global	0.15	2,5	0.375	2.2
▪ Lemahnya kerangka hukum dalam hal pengaturan dan perangkat hukum untuk penegakannya	0.1	4	0.4	2.3
▪ Masuknya Pemodal Besar yang melakukan transaksi di luar TPI	0.05	3	0.15	2.4
▪ Adanya perbedaan kepentingan Yang Dapat Menjurus Ke Konflik Kepentingan Antar Alat, Sektor dan Regional.	0.05	3	0.15	2.5
Total	1		2,575	

Sumber : Hasil Analisis Yang Dikembangkan untuk Penelitian ini

5.3.11.2. Analisis Faktor-faktor Strategi Internal (IFE)

Analisis Faktor-faktor Strategi Internal adalah sebuah analisis yang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor internal apa yang mempengaruhi dalam penentuan strategi pemberdayaan.

Tabel 5.45
Analisis Faktor Strategi Internal (IFE)
TPI Suradadi

Faktor-faktor Strategi Internal	Bobot	Rating	Bobot x Rating	Kode
Kekuatan				
▪ Pengalaman Kepala TPI/ Manajer KUD	0.15	3,5	0.525	3.1
▪ Hubungan Yang baik dengan SDM yang ada	0.1	3	0.3	3.2
▪ Memiliki Orientasi yang luas	0.1	1	0.1	3.3
▪ Integrasi Vertikal /lobi dengan Stakeholder	0.05	3	0.15	3.4
▪ Budaya dan kualitas organisasi dalam memahami visi dan misi	0.1	3	0.3	3.5
Kelemahan				
▪ Pelaksanaan /Proses Pelelangan Ikan	0.1	3	0.3	4.1
▪ Dukungan/Kondisi Keuangan TPI/KUD	0.1	3	0.3	4.2
▪ Fasilitas Infrastruktur	0.1	3,5	0.35	4.3
▪ Kualitas SDM yang rendah	0.05	2,5	0.125	4.4
▪ Lemahnya koordinasi antar karyawan	0.05	2	0.1	4.5
▪ Rendahnya upah/gaji yang diterima pengelola	0,1	1	0,1	4.6.
Total	1		2.65	

Sumber : Hasil Analisis Yang Dikembangkan untuk Penelitian ini

5.3.11.3. Matriks Analisis SWOT

Dengan memperhatikan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman), maka dapat disusun analisis SWOT yang menjadi arahan penyusunan rencana strategi pemberdayaan , yang dapat dilihat dalam tabel 5.46.

Tabel 5.46
Rencana Strategi Dalam Analisis SWOT
Untuk Penentuan Strategi Pemberdayaan di TPI Suradadi

No	Strategi	Pembobotan	Total	Prioritas
I	Strategi S-O			
1.1	Meningkatkan peran dengan TPI memperbaiki infrastruktur	$3.1 + 3.4 + 3.5 + 1.2 + 1.4 = 0,525 + 0,15 + 0,3 + 0,3 + 0,15 = 1,425$	1,425	9
1.2	Meningkatkan kinerja organisasi untuk mendukung Program Pembangunan Perikanan	$3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 1.2 + 1.3 + 1.4 = 0,525 + 0,3 + 0,1 + 0,3 + 0,3 + 0,15 = 1,675$	1,675	4
1.3	Penyiapan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional	$3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 1.2 = 0,525 + 0,3 + 0,1 + 0,3 + 0,3 = 1,525$	1,525	7
II	Strategi S – T			
2.1	Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder yang terkait untuk penegakan hukum	$3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 2.3 = 0,525 + 0,3 + 0,1 + 0,15 + 0,3 + 0,4 = 1,775$	1,775	2
2.2	Mematuhi Rencana Tata Ruang Pesisir yang ada untuk meminimalkan kerusakan ekosistem	$2.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 = 0,5 + 0,3 + 0,1 + 0,15 + 0,3 = 1,05$	1,05	11
2.3	Menjalin kerjasama dengan Lembaga Keuangan Untuk Mengatasi KPLI (Kekurangan Pembayaran lelang Ikan)	$3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 2.3 + 2.4 = 0,525 + 0,3 + 0,1 + 0,15 + 0,3 + 0,4 + 0,15 = 1,925$	1,925	1
III	Strategi W – O			
3.1.	Meningkatkan kualitas pelaksanaan lelang untuk menarik bakul/juragan dan	$1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 4.1 + 4.2 + 4.4 = 0,3 + 0,3 + 0,15 + 0,15 + 0,1 + 0,3 + 0,3 + 0,125 = 1,725$	1,725	3

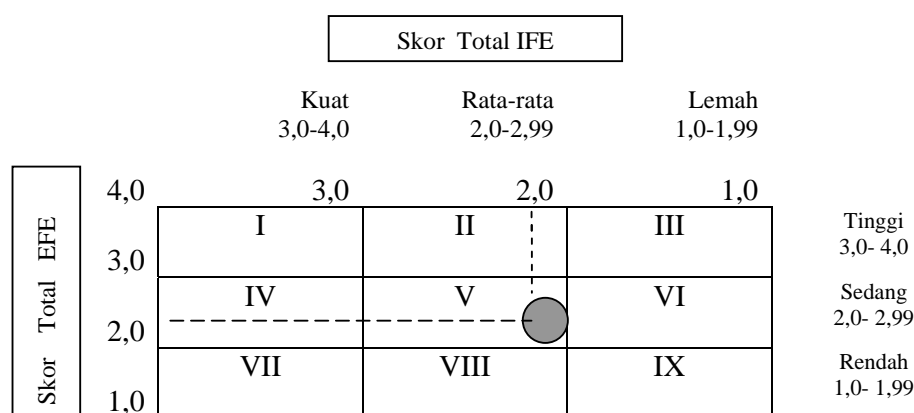
No	Strategi	Pembobotan	Total	Prioritas
	perusahaan agrobisnis perikanan membeli ikan di TPI			
3.2	Mengoptimalkan peran KUD	$1.1+1.2+1.5+4.1+4.2+4.3=0,3+0,3+0,1+0,3+0,3+0,35=1,65$	1,65	6
3.3	Meningkatkan kualitas SDM dengan dukungan program yang tepat	$1.2+1.3+4.2=0,3+0,3+0,3=0,9$	0,90	12
IV	Strategi W – T			
4.1	Meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan kinerja TPI	$4.1+4.2+4.3+2.3+2.4=0,3+0,3+0,35+0,4+0,15=1,5$	1,5	8
4.2	Meningkatkan koordinasi dan akses ke stakeholder untuk mendukung keuangan TPI	$4.1+4.2+4.3+2.3+2.4+2.5=0,3+0,3+0,35+0,4+0,15+0,15=1,65$	1,65	5
4.3	Meningkatkan peran serta pengelola untuk mendukung proses lelang sesuai dengan maksud dan tujuan TPI	$4.1+4.3+2.3+2.5=0,3+0,35+0,4+0,15=1,2$	1,2	10

Berdasarkan matrik SWOT di atas diperoleh ranking yang menunjukkan skala prioritas strategi yang harus disiapkan dalam pemberdayaan pengelolaan TPI dan KUD di daerah penelitian.

Prioritas *pertama* adalah menjalin kerjasama dengan Lembaga Keuangan Untuk Mengatasi KPLI (Kekurangan Pembayaran Lelang Ikan),, yang *kedua* adalah melaksanakan koordinasi dengan stakeholder yang terkait untuk penegakan hukum, *Ketiga*, meningkatkan kualitas pelaksanaan lelang untuk menarik bakul/juragan dan perusahaan agrobisnis perikanan membeli ikan di TPI

5.3.11.4. Matriks Internal Eksternal

Dengan menggunakan hasil evaluasi dari matriks IFE dan EFE, matriks IE dapat dikerjakan. Sumbu horisontal Matriks IE adalah skor total IFE 2,65 sedangkan sumbu vertikal adalah skor total EFE yaitu 2,575. Posisi yang tepat adalah berada pada sel V.



Keterangan :

 : Posisi

Posisi TPI dan KUD sekarang adalah pada posisi V. Pada posisi ini kondisi internal yang akan mempengaruhi strategi pemberdayaan dalam pengelolaan TPI masuk dalam katagori rata-rata (sedang). Skor EFE adalah 2,575, hal ini menunjukkan bahwa faktor eksternal baik yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap peluang dan ancaman memiliki posisi yang sedang.

Berdasarkan posisi ini, strategi yang cocok untuk diterapkan adalah strategi yang penetrasi pasar dan pengembangan produk

BAB VI

PENUTUP

6.1. Simpulan

1. Kinerja pengelolaan 11 TPI di daerah penelitian menunjukkan bahwa belum semua TPI mencapai skor efisiensi 100 %. Tempat Pelelangan Ikan yang telah mencapai skor efisiensi 100 % adalah TPI Mojo, TPI PPNP, TPI Pelabuhan, TPI Ketapang, TPI Tanjungsari, TPI Klidang Lor dan TPI Asemtoyong. TPI Tegalsari mempunyai skor efisiensi 22,34 %, TPI Muarareja skor efisiensinya 47,71 %, TPI Surodadi 66,92 %, TPI Wonokerto 74,37 %.
2. Tingkat keberdayaan pengelola TPI dan pengurus KUD dilihat dari akses pengelola dalam menjalankan fungsi TPI untuk mensejahterakan nelayan sebanyak 17,8 %. Dari jawaban ini menunjukkan bahwa pengelola kurang berdaya. Hal ini disebabkan nelayan memang masih pada pihak yang lemah, terutama karena sistem pembayaran yang tidak bisa tunai, dan bahkan keterikatan nelayan pada sistem *patront client*, yang menyebabkan mereka berada pada lingkaran kemiskinan karena jeratan hutang yang tidak bisa terputus.
3. Tingkat keberdayaan dengan indikator akses pengelola dalam menjalankan fungsi TPI untuk menstabilkan harga sebanyak 48,9 %, menunjukkan kondisi sudah berdaya.

4. Tingkat keberdayaan dengan indikator pengelola sudah dapat menjalankan fungsi TPI untuk meningkatkan pendapatan daerah sebanyak 38,9 %, menunjukkan bahwa pengelola TPI cukup berdaya
5. Akses untuk melakukan kegiatan sosial mencapai 43,3 % dengan keputusan berdasarkan pertimbangan keluarga, sedangkan 56,7 % tidak berdasarkan pertimbangan keluarga.
6. Akses untuk melakukan lobi cukup intens, karena 10 dari 25 lobi disetujui
7. Dari analisis SWOT masing-masing TPI ditentukan strategi yang berbeda karena kondisi internal dan eksternal berbeda.
 - a. Untuk TPI Klidang Lor prioritas *pertama* adalah mematuhi Rencana Tata Ruang Pesisir yang ada untuk meminimalkan kerusakan ekosistem, yang *kedua* adalah Menjalin kerjasama dengan Lembaga Keuangan Untuk Mengatasi KPLI (Kekurangan Pembayaran Lelang Ikan) *Ketiga*, prioritas yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan lelang untuk menarik bakul/juragan dan perusahaan agrobisnis perikanan membeli ikan di TPI
 - b. Untuk TPI Tanjungsari, prioritas *pertama* adalah menjalin kerjasama dengan Lembaga Keuangan untuk mengatasi KPLI (Kekurangan Pembayaran Lelang Ikan), *kedua* melaksanakan koordinasi dengan stakeholder yang terkait untuk penegakan hukum *Ketiga*, prioritas yang harus dilakukan meningkatkan

koordinasi dan akses ke stakeholder untuk mendukung keuangan TPI

- c. Untuk TPI Wonokerto prioritas pertama adalah menjalin kerjasama dengan Lembaga Keuangan Untuk Mengatasi KPLI (Kekurangan Pembayaran Lelang Ikan), yang kedua melaksanakan koordinasi dengan stakeholder yang terkait untuk penegakan hukum Ketiga, meningkatkan kinerja organisasi untuk mendukung Program Pembangunan Perikanan
- d. TPI Ketapang prioritas pertama adalah menjalin kerjasama dengan Lembaga Keuangan Untuk Mengatasi KPLI (Kekurangan Pembayaran Lelang Ikan), yang kedua adalah Meningkatkan kualitas pelaksanaan lelang untuk menarik bakul/juragan dan perusahaan agrobisnis perikanan membeli ikan di TPI. Ketiga, prioritas yang harus dilakukan adalah mengoptimalkan peran KUD
- e. TPI Mojo Prioritas pertama adalah menjalin kerjasama dengan Lembaga Keuangan Untuk mengatasi KPLI (Kekurangan Pembayaran lelang Ikan), yang kedua adalah meningkatkan kinerja organisasi untuk mendukung Program Pembangunan Perikanan Ketiga, melaksanakan koordinasi dengan stakeholder yang terkait untuk penegakan hukum

- f. TPI Asemtoyong Prioritas pertama adalah menjalin kerjasama dengan Lembaga Keuangan Untuk Mengatasi KPLI (Kekurangan Pembayaran Lelang Ikan), yang kedua adalah melaksanakan koordinasi dengan stakeholder yang terkait untuk penegakan hukum Ketiga, meningkatkan kualitas pelaksanaan lelang untuk menarik bakul/juragan dan perusahaan agrobisnis perikanan membeli ikan di TPI
- g. TPI Tegalsari, prioritas pertama adalah menjalin kerjasama dengan Lembaga Keuangan Untuk Mengatasi KPLI (Kekurangan Pembayaran Lelang Ikan , yang kedua adalah Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder yang terkait untuk penegakan hukum. Ketiga, penyiapan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional
- h. Prioritas pertama di TPI Muararaja adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan lelang untuk menarik bakul/juragan dan perusahaan agrobisnis perikanan membeli ikan di TPI Kedua, mengoptimalkan peran KUD. Ketiga, meningkatkan koordinasi dan akses ke stakeholder untuk mendukung keuangan TPI
- i. Prioritas pertama di TPI Pelabuhan adalah menjalin kerjasama dengan Lembaga Keuangan untuk mengatasi KPLI (Kekurangan Pembayaran Lelang Ikan), yang kedua adalah melaksanakan koordinasi dengan stakeholder yang terkait

untuk penegakan hukum Ketiga, meningkatkan kualitas pelaksanaan lelang untuk menarik bakul/juragan dan perusahaan agrobisnis perikanan membeli ikan di TPI

- j. Di TPI PPNP Pekalongan Prioritas pertama adalah meningkatkan kinerja organisasi untuk mendukung Program Pembangunan Perikanan. Yang kedua adalah menjalin kerjasama dengan Lembaga Keuangan Untuk Mengatasi KPLI (Kekurangan Pembayaran lelang Ikan). Ketiga, melaksanakan koordinasi dengan stakeholder yang terkait untuk penegakan hukum
- k. Di TPI Suradadi Prioritas pertama adalah menjalin kerjasama dengan Lembaga Keuangan Untuk Mengatasi KPLI (Kekurangan Pembayaran Lelang Ikan),, yang kedua adalah melaksanakan koordinasi dengan stakeholder yang terkait untuk penegakan hukum, Ketiga, meningkatkan kualitas pelaksanaan lelang untuk menarik bakul/juragan dan perusahaan agrobisnis perikanan membeli ikan di TPI

6.2. Saran

1. Upaya peningkatan keberdayaan pengelola TPI dan Pengurus KUD hendaknya dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan sebagai sasaran akhir. Oleh karena itu, agar pengelola TPI dan pengurus KUD bisa berdaya, perlu diperhatikan kondisi internal dan eksternal dalam tubuh Tempat Pelelangan Ikan. Kinerja dari TPI dan kinerja pengelola harus

didukung oleh payung hukum yang jelas, sehingga upaya penetrasi pasar sebagai bentuk strategi yang harus dilakukan dapat terlaksana

2. Beberapa TPI yang tidak efisien, masih memungkinkan dikembangkan dengan memperbaiki fasilitas-fasilitas maupun prasarana di TPI. Pada akhirnya hal ini akan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.
3. Perlunya strategi pemberdayaan yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kinerja TPI, dan tingkat keberdayaan pengelola, sehingga diharapkan keberadaan TPI dapat menarik minat nelayan dan bakul untuk datang.

Penelitian Yang Akan Datang

Penelitian ini meliputi 6 daerah penelitian di Pantai Utara bagian Barat di Jawa Tengah. Karakteristik daerah penelitian yang berbeda dengan daerah penelitian ini memungkinkan adanya situasi yang berbeda dan tidak terwakili oleh penelitian ini.

Adanya hasil yang tidak begitu berbeda, maka ditemukan adanya kondisi yang belum berubah meskipun daerah yang berbeda tetapi masih di wilayah pantai utara bagian barat. Penelitian dapat digunakan untuk melengkapi penelitian sebelumnya tersebut.

Penelitian selanjutnya bisa mengikuti wilayah yang lebih luas baik pantai utara bagian barat, timur ataupun pantai selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syakir Kurnia.2005. Data Envelopment Analysis Untuk Pengukuran Efisiensi. Modul Workshop Alat Analisis Magister Ilmu Ekonomi dan **Studi Pembangunan**. UNDIP Semarang.
- Akhmad Fauzi.2005. **Kebijakan Perikanan dan Kelautan**. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Akhmad Fauzi dan Suzy Ana.2005. **Permodelan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan**. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ambar Teguh Sulistyani.2004. **Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan**, Yogyakarta: Gava Media.
- A Budi Risharyanto.2006. **Efisiensi dan Peningkatan Kinerja TPI**, thesis, MM UNDIP : *tidak dipublikasikan*
- As'ad. 1989. **Seri Ilmu Manajemen Sumberdaya Manusia, Psikologi Industri**. Bandung :Penerbit Alumni.
- Biro Pusat Statistik Jawa Tengah
- Bustani Mahyuddin.2001. **Peranan Pelelangan Ikan Dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan**. *Makalah Falsafah Sains, Program S3, IPB*
- Kajian Budaya Maritim,2004, **Pengembangan Perencanaan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata**
- Budi Sudaryanto,2003. **Analisis Efisiensi Tempat Pelelangan Ikan (TPI)-Studi di Pantura Barat Jawa Tengah**. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol.13 No 1 Maret 2003*
- Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Tengah dan Dewan Riset Daerah.2006, Kajian Strategis Analisis Kinerja Efisiensi TPI di Jawa Tengah.**Laporan Penelitian** : Tidak dipublikasikan
- Edi Susilo.2003. **Membangun Adaptor Sosial**. Laporan Penelitian Proyek Cofish Banyuwangi.
- Freddy Rangkuti. 2006. **Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis**. Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kusnadi,2002. **Konflik Sosial Nelayan**. Yogyakarta: LkiS

- Kusnadi.2007. **Strategi Hidup Masyarakat Nelayan**. Yogyakarta : LkiS,
- Kusnadi,2003. **Akar Kemiskinan Nelayan**. Yogyakarta : LKiS
- Miller and Meiners, 1997, **Teori Ekonomi Mikro Intermediate**, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Terjemahan : Haris munandar
- Mulyadi,2005. **Ekonomi Kelautan.Jakarta** : Rajawali Press.
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 20043 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan .
- R Nugroho Purwantoro.2004. Efektifitas Kinerja Pelabuhan dengan Data Envelopment Analysis. **Usahawan** No 05 Th.XXXIII. Mei 2004.
- Suhartini, A.Halim, Imam Khambali, Abd. Basyid.2005. **Model-model Pemberdayaan Masyarakat**. Yogyakarta : Pustaka Pesantren.
- Tedy Herlambang et al., 2000, **Ekonomi Mikro : Suatu Pendekatan Praktis**, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____, 2002, **Ekonomi Mikro : Sebuah Kajian Komprehensif.** , Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Indah Susilowati,Agung Sudaryono, Tri Winarni A,2004, **Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi-UMKMK) dalam Mendukung Ketahanan Pangan di kabupaten/Kota Pekalongan, Jawa Tengah**. Lemlit UNDIP, Semarang
- Soetomo.2006.**Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat**. Jakarta :Pustaka Belajar
- Soedarsono.1983. **Pengantar Ekonomi Mikro**. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial. Jakarta.
- Soekartawi.1990. **Teori Ekonomi Produksi, dengan pokok Bahasan Analisis Fungsi Cobb-Douglass**. Rajawali Press. Jakarta.
- Stoner,F.J.1995. **Manajemen**. Jakarta : PT. Penerbit Hallindo.
- Sulistiyani Dyah P. 2005.**Analisis Efisiensi Tempat Pelelangan Ikan Kelas 1,2,dan 3 di Jawa Tengah dan Pengembangannya Untuk Peningkatan Kesejahteraan Nelayan**. Thesis MSDP UNDIP : tidak dipublikasikan

- Surochiem,2001. **Dimensi-dimensi Penting Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Partisipasi pada Masyarakat Pesisir.** *Jurnal Neptunus, Vol8, No 1 Maret 2001,50-56, Surabaya*
- Sulaksono, Ari dan Amin Setiawan.2004. Model Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Pembangunan Masyarakat Pantai Dalam Implementasi Proyek Cofish di Jawa Tengah, *Makalah Seminar dan Workshop Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Pembangunan Masyarakat Pantai*
- Syarif Makmur.2007. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi.Rajawali Pers.Jakarta.
- Wahyono,Ari.dkk.2001.**Pemberdayaan Masyarakat Nelayan.** Yogyakarta :Media Pressindo.